

HIMPUNAN SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN TAHUN 2005

Periode April - Juni 2005



**BIRO HUKUM DAN HUMAS
DEPARTEMEN PERTANIAN**



DAFTAR ISI

Halaman

1. Pidato Menteri Pertanian Pada Acara Temu Kesepakatan Mitra Agribisnis Eksklusif Sumatera Selatan. "Membangun Komitmen Untuk Makmur Bersama Berbasis Agribisnis" 1
2. Pengarahan Menteri Pertanian Pada Rapat Kerja Nasional Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian 6
3. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar Sehari "Evaluasi, Sosialisasi Dan Antisipasi Peraturan Pemerintah" No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan" 16
4. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Talk Show Membangun Kembali Sektor Agribisnis Di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) 23
5. Keynote Speech Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Keamanan Pangan Pada Seminar Sehari Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan 34
6. Keynote Speech Menteri Pertanian RI Pada Seminar Pemberdayaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Pekan Baru 45
7. Sambutan Dan Pengarahan Menteri Pertanian Pada Acara Temu Mitra Eksklusif Agribisnis Propinsi Jawa Tengah. 51
8. Sambutan Menteri Pertanian Dalam Seminar Sehari "Ekonomi Politik Perberasan Nasional" dan Launching Buku "Pertanian

Indonesia Kini Dan Esok". Gedung Serbaguna Lembaga Riset perkebunan Indonesia Bogor.	58
9. Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Trubus Agro Expo 2005	66
10. Sambutan Menteri Pertanian Pada Peluncuran Buku Menumbuhkan Ide Dan Pemikiran: Pembangunan Sistim Dan Usaha Agribisnis, 60 Tahun Bungaran Saragih	73
11. Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Panen Ke-10 Juta Ekor Ayam Pedaging Pola Kemitraan Desa Tegalrejo, Kec. Lawang Kidul Muara Enim 2005.	80
12. Pidato Pembekalan Menteri Pertanian RI Pada Acara Pengambilan Sumpah Dokter Hewan Tahap I Tahun 2005 Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.	85
13. Sambutan Pengarahan Menteri Pertanian Pada Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2005	95
14. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar Penggalian Potensi Sembilan Tanaman Obat Unggulan Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto.	102
15. Sambutan Menteri Pertanian Thema Kebijakan Pemerintah Dalam Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan	112
16. Sambutan Menteri Pertanian Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2006	119



17. Arahan Menteri Pertanian Pada Pertemuan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura 2005 128
18. Sambutan Dan Pengarahan Menteri Pertanian RI. Pada Rapat Koordinasi Teknis Nasional Peternakan (Rakorteknas) Tahun 2005 136
19. Sambutan Dan Pengarahan Menteri Pertanian Pada Rapat Kerja Nasional Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Ciawi, 16-17 Mei 2005 143
20. Pidato Menteri Pertanian Pada Acara Temu Mitra Agribisnis Propinsi Jawa Timur "Membangun Komitmen Untuk Makmur Bersama Berbasis Agribisnis" 149
21. Pengarahan Menteri Pertanian Pada Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Serta Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tahun 2005 157
22. Sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia Pada Acara Pembukaan "Agro & Food Expo 2005" Di Gedung Semanggi Expo Kawasan Bisnis Terpadu Sudirman Jakarta 169
23. Sambutan Menteri Pertanian Pada Musyawarah Nasional Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Yang Ke-V 177
24. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Rembug Ilmiah Pembangunan Pertanian Propinsi Jambi Himpunan Alumni IPB Daerah Jambi 2005 182
25. Keynote Speech Menteri Pertanian RI Pada Semiloka Pengembangan Perkebunan KAKAO Se Sumatera Di Bukit Tinggi 2005 188



26. Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara PKS Expo 2005 Bengkulu	200
27. Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Rembug Paripurna KTNA Nasional. Surabaya, 6 Juni 2005	206
28. Sambutan Menteri Pertanian RI. Pada Acara Pencanangan Pengembangan Usaha Pertanian Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Bagi Hasil (Sistem Syariah) Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 2005	213
29. Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Peresmian Dan Pengembangan Agribisnis Cabe Merah Berbasis Penelitian Di Kabupaten Sragen 2005	222
30. Sambutan Menteri Pertanian RI. Pada Upacara Hari KRIDA Pertanian Ke 33 Th 2005	227
31. Sambutan Menteri Pertanian Pada Pencanangan Tanam Jagung (Desa Kramat, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buro, Maluku) 2005	235
32. Sambutan Menteri Pertanian Pada Peringatan 1 Abad Lembaga Penelitian Tanah Di Indonesia. Bogor 2005	244
33. Sambutan Menteri Pertanian Pada Pencanangan Tanam Jagung. Desa Kramat, Dusun Air Buaya, Kabupaten Buru, Prop. Maluku 2005	252



**PIDATO SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA ACARA
TEMU KESEPAKATAN MITRA AGRIBISNIS EKSKLUSIF
SUMATERA SELATAN
“MEMBANGUN KOMITMEN UNTUK MAKMUR BERSAMA
BERBASIS AGRIBISNIS”
Palembang, 5 April 2005**

- Yth. Gubernur Sumatera Selatan
- Yth. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;
- Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan yang
Saya Hormati;
- Koordinator Forum Makmur Bersama; dan

Hadirin Sekalian yang saya hormati;

Assalamu' alaikum Warokhmatullohi Wabarakatuh;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, bahwa kita bisa hadir dalam acara yang saya nilai realistis dan apabila dikemas dan ditindaklanjuti secara konsisten baik pelaksanaannya maupun pengawasan, akan mampu menepis berbagai pandangan skeptis tentang kemampuan kebersamaan kita, untuk membangun sektor pertanian menjadi “leading sector” perekonomian wilayah maupun nasional. “Membangun Komitmen Untuk Makmur Bersama Berbasis Agribisnis” merupakan topik



yang tepat untuk diangkat pada acara ini, dalam upaya kita menggalang kembali kekuatan ekonomi bangsa ditengah berbagai bencana dan cobaan yang kita hadapi dalam skala nasional, wilayah maupun lokal. Pada kesempatan pagi ini pula, teriring do'a juga kita sampaikan untuk saudara-saudara kita di Nias, Aceh dan beberapa daerah lainnya yang terkena musibah bencana alam, semoga mereka diberi kekuatan dan kita mampu memberikan kontribusi nyata untuk membantu percepatan pemulihan pembangunan di daerah-daerah bencana tersebut, sehingga segera dapat dicapai tingkat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Para hadirin yang saya hormati;

Kita semua menyadari bahwa sektor pertanian di Indonesia sama seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, merupakan sektor yang unik dan mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Karena disatu sisi, perannya tidak hanya sebagai sektor penyedia pangan, tetapi juga masih sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar dan tempat bergantung kehidupan hampir 70 persen penduduk serta sekaligus diandalkan sebagai sumber devisa negara. Namun disisi lain, kita juga dihadapkan pada suatu tantangan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah penduduk terus meningkat, sementara ketersediaan lahan pertanian yang subur, tidak bertambah. Lahan yang tersedia itupun setiap tahun terus berkurang akibat semakin tidak jelasnya tata ruang, sehingga terjadi konversi lahan, bagi



pengembangan sektor-sektor lain di luar pertanian. Berbagai kebijakan sektoral terasa tumpang tindih, parsial dan bemuansa jangka pendek. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap berbagai aspek lainnya, diantaranya meningkatnya ketidak pastian berinvestasi di sektor pertanian. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah terhadap kompleksitas permasalahan tersebut, kita harus bangkit, kita harus tempatkan sudut pandang bahwa justru karena kompleksitas permasalahan tersebut kita mendapatkan amanah dari Allah dan rakyat untuk menyelesaikannya. Dan untuk menyelesaikannya, kita sadar tidak mungkin dikerjakan sendiri. Untuk itu, kita harus sepakat untuk bekerja sama dan saling mendukung serta menyamakan persepsi bahwa membangun negeri ini, tidak hanya untuk generasi kita semata, tetapi hingga ke generasi-generasi yang akan datang. Untuk itu, salah satu langkah mendasar yang perlu kita sepakati bersama adalah melakukan pengelolaan tata ruang yang baik, yang utuh dan komprehensif, bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga menengah dan jangka panjang. Mari kita dengan sangat serius ke depan ini, memastikan, bahwa kita mengelola ruang yang ada ini dengan sebaik-baiknya, adil, berkelanjutan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Langkah berikutnya yang perlu kita bangun secara simultan, khususnya untuk lebih menjamin kepastian berinvestasi dan menggalang kepercayaan perbankan di sektor pertanian, yaitu



“road map” agribisnis perkomoditas unggulan wilayah maupun nasional, yang dapat menginformasikan secara jelas dan rinci tentang kondisi agribisnis komoditas unggulan tertentu di wilayah tertentu, mulai dari sub sistem hulu sampai ke hilir termasuk didalamnya dukungan infrastruktur yang tersedia, transportasi serta kebijakan, proses perijinan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan informasi-informasi pendukung lainnya, yang dapat diakses secara mudah dan transparan oleh setiap stakeholder.

Saudara Gubernur; dan Hadirin yang terhormat;

Langkah-langkah strategis yang saya ungkapkan tadi, tentunya harus diikuti oleh langkah-langkah lainnya yang sering kali bersifat spesifik wilayah. Namun demikian, yang perlu ditekankan disini adalah semuanya itu harus dibangun dengan modalitas tekad komitmen untuk maju bersama secara konsisten. Untuk itu mulai hari ini, marilah kita uji kekuatan moralitas tersebut, dengan diawali di Sumatera Selatan ini. Hal yang sama juga akan dilakukan di propinsi propinsi lainnya, dan saya mendapatkan laporan bahwa yang sudah terjadwal dan bersedia untuk membangun komitmen untuk makmur bersama berbasis agribisnis ini diantaranya adalah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Gorontalo. Insya Allah, propinsi-propinsi lainnya juga akan melakukan yang hal yang sama.

Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada Forum Makmur Bersama dan Komite Penanggulangan Kemiskinan yang



bekerjasama dengan Pemerintah propinsi, memprakarsai Gerakan Membangun untuk Menuju Kemakmuran Bersama ini. Saya percaya, bahwa pertemuan hari ini yang diantaranya teragendakan penandatanganan kesepakatan kemitraan antar stakeholder termasuk didalamnya perbankan, dan juga kegiatan forum dialog “membangun komitmen mendukung agribisnis” di Sumatera Selatan, tidak hanya selesai hanya sampai pada tataran wacana di hotel ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah komitmen dan konsistensi pelaksanaannya. Untuk itu, saya mendukung adanya usulan untuk dibentuknya Tim monitoring dan pengawasan terpadu tentang pelaksanaan dari komitmen-komitmen yang Insya Allah akan terbangun pada hari ini.

Kepada Saudara Gubernur beserta jajarannya serta masyarakat Sumatera Selatan, saya ucapkan selamat dan saya sebagai Menteri Pertanian mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik, dan Insya Allah ke depan kita akan terus bersinergi untuk bersama kita membangun pertanian demi kemakmuran rakyat.

Wassalamualaikum Warokhmatullohi Wabarakatuh.

MENTERI PERTANIAN

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN PADA
RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KARANTINA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

Jakarta, 6 April 2004

**MEWUJUDKAN SISTEM PERKARANTINAAN YANG
TANGGUH, PROFESIONAL, BERSIH DAN EFISIEN**

Oleh

**Dr. Ir. Anton Apriantono, MS
Menteri Pertanian**

Yang terhormat,

- Saudara Kepala Badan Karantina Pertanian, dan
Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian,
- Para Pejabat Eselon I lintas sektor terkait,
- Peserta Rakernas Badan Karantina Pertanian,
- Serta hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadhirat Allah SWT, yang berkenan memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian kita membangun sektor pertanian, termasuk mewujudkan sistem perkarantinaan yang Tangguh, Profesional, Bersih dan Efisien.



Kedepan kita berharap diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan kesinambungan pembangunan sektor pertanian untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Kepulauan Nusantara yang kaya dengan sumberdaya hayati merupakan karunia sekaligus amanah Allah SWT kepada rakyat Indonesia. Berkaitan dengan amanah di atas, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya amanah merupakan tuntutan iman sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa "Tidak ada iman pada orang-orang yang tidak ada amanah dalam dirinya, dan tidak ada agama pada orang yang tidak bisa dipegang janjinya".

Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi moral dan akhlak yang mulia, kita bangun sektor pertanian dengan melaksanakan 3 program utama Departemen Pertanian, yang meliputi: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Visi Departemen Pertanian adalah mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi serta arah kebijakan untuk melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN diletakkan pada urutan pertama dengan satu pemikiran



bahwa aparat yang profesional akan mendukung manajemen pembangunan pertanian yang bersih, peduli, transparan, dan kredibel. Dengan demikian, pembangunan pertanian akan lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan berdampak kepada pemanfaatan sumberdaya pertanian secara lebih optimal dan memberikan insentif bagi investasi.

Saya menyambut baik penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan 2 hal penting. Pertama, dengan Rapat Kerja ini akan dihasilkan kebijakan dan program di bidang perkarantinaan untuk mendukung manajemen pembangunan pertanian yang bersih, transparan dan bebas KKN.

Kedua, pada peserta dapat mengembangkan persepsi dan komitmen untuk meningkatkan kinerja karantina pertanian yang lebih bersih, peduli sesuai dengan nilai/semangat yang melandasi pembangunan pertanian kita. Bersih yang dimaksud disini adalah bebas dari KKN, amanah, transparan dan akuntabel; sedangkan peduli berarti memberikan fasilitas, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, aspiratif dan keberpihakan terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam tatanan global perkarantinaan antar negara seperti Indonesia dituntut untuk mengikuti prinsip-prinsip Perjanjian



Penerapan Sanitary dan Phytosanitary (SPS), yaitu : konsistensi, kesetaraan, transparansi dan ilmiah, serta menghindari restriksi terselubung yang dapat mengganggu perdagangan internasional.

Pada saat ini maupun di masa yang akan datang, kita menghadapi perubahan-perubahan yang terus-menerus baik di tingkat global maupun nasional yang bersifat mendasar di berbagai bidang antara lain ekonomi, pertanian, perdagangan dan pemerintahan, yang berimplikasi langsung terhadap sistem perkarantina pertanian di masa depan.

Pertama, dalam perkembangan global kita dihadapkan sistem perdagangan bebas antar negara antara lain dengan menerapkan Ketentuan Sanitary dan Phytosanitary secara terpadu, melalui pengelolaan oleh suatu kelembagaan pelayanan yang terintegrasi. Penerapan SPS terpadu meliputi: (a) bidang perlindungan dan karantina tumbuhan, (b) bidang kesehatan dan karantina hewan, (c) bidang keamanan pangan (*fresh product, semi processed product and manufactured product*), (d) bidang kelestarian lingkungan, sehingga memberikan nilai tambah berupa peningkatan ketangguhan, efektivitas dan efisiensi.

Kedua, perkembangan ekonomi global telah menciptakan kekuatan-kekuatan ekonomi regional dimana secara kolektif seperti Uni Eropa menerapkan ketentuan prosedur dan persyaratan SPS dengan tingkat perlindungan kesehatan yang



lebih tinggi untuk melindungi kepentingan regional. Implikasi dari kondisi tersebut mengharuskan negara-negara pengeksport produk pertanian berupaya memperbaiki *Good Agricultural Practices* untuk dapat memenuhi standar persyaratan Uni Eropa. Ketidakmampuan berakselerasi terhadap perubahan persyaratan SPS negara pengimpor, berarti akses pemasaran produk pertanian nasional menjadi terhambat bahkan samasekali menjadi tertutup.

Ketiga, perkembangan era teknologi informasi di bidang SPS telah membuka secara transparan kondisi dan status hama dan penyakit hewan dan tumbuhan sedunia yang disajikan dalam situs web dan dapat diakses secara mudah melalui internet. Dengan ketersediaan informasi SPS tersebut telah dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk meningkatkan ketentuan prosedur dan persyaratan SPS untuk menjaring arus impor produk pertanian dari negara-negara lain. Implikasi dari perkembangan tersebut mengakibatkan negara pengeksport, seperti Indonesia harus melakukan negosiasi dengan Taiwan, sekaligus melakukan meningkatkan penguasaan teknologi terapan untuk mendukung daya saing produk nasional.

Keempat, perkembangan standarisasi penerapan ketentuan SPS sebagaimana disepakati bersama di tingkat multilateral menunjukkan bahwa negara-negara maju lebih mampu melaksanakan ketentuan standar internasional dalam



pengaturan mekanisme impor dan ekspor. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia belum mampu melaksanakan standarisasi internasional dalam sistem perdagangan ekspor maupun impor. Implikasi dari kondisi yang tidak seimbang tersebut mengingatkan kepada kita untuk meningkatkan kemampuan berakselerasi dengan standar ketentuan internasional. Ketidakmampuan untuk menerapkan ketentuan standar SPS internasional berarti kita akan dinilai lemah dalam melindungi kepentingan nasional.

Kelima, dalam perkembangan transparansi tentang ketentuan SPS antar negara anggota WTO, memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi National Enquiry Point (NEP) dan National Notification Body (NNB) semakin solid perannya memberikan fasilitasi terhadap perdagangan antar negara. Kerjasama dan koordinasi yang efektif antara instansi terkait yang berkompeten akan memberikan good image tentang kinerja pelaksanaan ketentuan SPS di Indonesia.

Keenam, dalam perkembangan kesetaraan implementasi SPS global menunjukkan bahwa kesepakatan tentang kesetaraan dalam Penerapan SPS lebih merupakan sebagai peluang bagi negara-negara anggota WTO, ketimbang kemampuan untuk mencapai kesetaraan. Keterbatasan negara berkembang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen dan modal menyebabkan negara maju mengungguli dalam kesetaraan



tersebut . Implikasi dari kondisi itu mendorong kita untuk melakukan upaya khusus dalam mencapai kesetaraan di bidang SPS, sekurang-kurangnya dapat mengimbangi perubahan ketentuan SPS negara lain. Konsekuensi upaya tersebut, kita perlu melakukan pengembangan kemampuan internal untuk merespon perubahan global.

Ketujuh, perkembangan fasilitasi perdagangan global memberikan dorongan terhadap setiap negara anggota WTO seperti Indonesia untuk melakukan reformasi sistem Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan penumpang di pelabuhan laut dan bandar udara internasional. Implikasi dorongan reformasi sistem CIQS memposisikan jajaran karantina pertanian untuk selalu siap berakselerasi dengan kepentingan instansi terkait tanpa mengurangi kewaspadaan dan efektifitas pencegahan hama dan penyakit karantina.

Kedelapan, dalam perkembangan desentralisasi dan dekonsentrasi pemerintahan menunjukan Pemerintah Kota/ Kabupaten/Propinsi berlomba-lomba mengembangkan perekonomian wilayah, dimana peningkatan akses perdagangan dengan negara tetangga menjadi prioritas. Perkembangan akses pasar antar negara tersebut ditunjukkan oleh bertambahnya border post (pintu masuk/keluar) di wilayah perbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Implikasi dari



perubahan tersebut, kita harus meningkatkan kapasitas dan jangkauan karantina pertanian, termasuk wilayah perbatasan.

Kesembilan, dalam perkembangan reformasi di bidang pelayanan masyarakat, kita dituntut dapat memberikan akuntabilitas. Pencapaian akuntabilitas di bidang perkarantinaaan diupayakan melalui perbaikan sistem pelayanan karantina pertanian. Dalam perbaikan sistem karantina pertanian, pengembangan sumberdaya manusia profesional merupakan titik tumpu pembangunan perkarantinaaan yang tangguh, profesional, bersih. Oleh karena itu, penyiapan sumberdaya manusia yang profesional mulai dilakukan melalui seleksi tingkat nasional.

Kesepuluh, dalam perkembangan akuntabilitas pelayanan karantina, kita dituntut untuk melaksanakan transparansi di bidang manajemen sumberdaya manusia, kelembagaan, prosedur pelayanan dan keuangan, termasuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kehadiran sumberdaya manusia yang tangguh, profesional, bersih dalam sistem perkarantinaaan yang efisien dan transparan merupakan langkah nyata untuk mewujudkan pelayanan prima karantina pertanian ke depan.

Hadirin yang saya hormati,

Sistem perkarantinaaan yang tangguh, profesional, bersih dan efisien antara lain dicirikan oleh : (a) kemampuan dan jangkauan menangkal pemasukan dan penyebaran hama dan



penyakit karantina, (b) kemampuan mendukung daya saing produk nasional di pasar internasional, (c) kemampuan keahlian di bidang SPS, (d) kemampuan berakselerasi dengan ketentuan dan standar internasional, (e) kemampuan memberikan akuntabilitas, (f) tingkat transparansi manajemen sumberdaya manusia, kelembagaan, pelayanan dan keuangan, (g) tingkat efisensi perkarantinaan, (h) tingkat moral dan akhlak personil.

Saya berharap Jajaran Karantina Pertanian dapat memainkan perannya dengan baik dalam mewujudkan Visi dan Misinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance yang memiliki karakteristik utama kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Selain itu saya juga berharap lingkup Jajaran Karantina Pertanian dapat menghindari KKN dalam sistem perkarantinaan yang tangguh, profesional, bersih, dan efisien.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian arahan saya dalam Rakemas Badan Karantina Pertanian Tahun 2005, Pada kesempatan ini saya berpesan, bahwa sistem perkarantinaan pertanian mengemban fungsi perkarantinaan dan fungsi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dengan niat yang ikhlas mari kita wujudkan sistem perkarantinaan yang tangguh, profesional, bersih dan efisien. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Amin.



Dengan mengucapkan Bismillahir Rahmaanir Rahiim Rapat Kerja Nasional Badan Karantina Pertanian tahun 2005 secara resmi dibuka.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum warakhmatullahi wabarakhkatuh.

Jakarta, 6 April 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriantono, MS



**KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN
PADA SEMINAR SEHARI "EVALUASI, SOSIALISASI DAN
ANTISIPASI PERATURAN PEMERINTAH
NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN
GIZI PANGAN"**

Yang terhormat,

Peserta Seminar dan Undangan yang berbahagia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke Hadhirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, bahwa kita bisa hadir dalam acara seminar sehari dengan tema Peraturan Pemerintah No 28/2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan: Antisipasi Penerapan PP 28 dan Implikasinya bagi Pelaku Bisnis Pangan.

Saya menilai seminar yang diprakarsai oleh GAPMMI ini sangat penting dan merupakan langkah nyata dan proaktif dari GAPMMI dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh peserta seminar khususnya pelaku bisnis pangan mengenai PP 28, sehingga dapat menentukan langkah apa yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha. Seminar ini juga merupakan upaya simpatik dari GAPMMI untuk turut mensosialisasikan dan mengimplementasikan PP 28 sehingga pesan moral dari adanya PP ini dapat tercapai yaitu tersedianya



pangan yang memenuhi syarat-syarat mutu, gizi dan keamanan pangan.

Peserta seminar yang berbahagia,

Telah sama-sama kita ketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Karenanya, tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini mengacu kepada hasil kesepakatan FAO/WHO pada International Conference on Nutrition tahun 1992, bahwa memperoleh makanan yang cukup bergizi dan aman adalah hak setiap manusia. Oleh karena itu lahir UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan dan penjabaran operasional dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dengan harapan semakin jelas pengaturan tugas dan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah dan masyarakat.

Departemen Pertanian menyadari bahwa keamanan dan mutu dari produk pertanian (segar) akan menentukan keamanan, mutu, dan gizi dari produk selanjutnya setelah produk pertanian tersebut diolah, disimpan, dan disajikan. Menyadari tanggungjawab Departemen Pertanian yang begitu besar



sebagai institusi yang bertanggungjawab khususnya pada bagian hulu dari rantai pangan, maka Departemen Pertanian telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi pelaksanaan PP 28 ini. Beberapa langkah tersebut akan dikemukakan disini sekaligus akan kita informasikan sejauh mana kesiapan Departemen Pertanian untuk pelaksanaan PP 28 tersebut.

Sesuai dengan amanat PP 28, Departemen Pertanian bertugas menetapkan berbagai pedoman seperti cara budidaya yang baik, cara produksi pangan segar yang baik, cara distribusi yang baik dan bahkan dapat menetapkan pedoman-pedoman tersebut untuk diterapkan secara wajib. Terkait dengan jaminan mutu dan pengawasan pada tahun 2004 telah diterbitkan surat edaran Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengenai perlunya dibentuk Otoritas Kompeten pengawasan Keamanan Pangan Segar di daerah masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, di tingkat pusat telah ditunjuk Kelompok Kerja Keamanan pangan Segar.

Peserta seminar yang berbahagia,

Keseriusan kita dalam menangani keamanan dan mutu pangan, alhamdulillah mendapat respons positif baik dari stakeholder di dalam negeri maupun sponsor dari luar negeri. Mulai tahun 2004 telah terjalin kerjasama teknis dengan



Pemerintah Belanda untuk membangun sistem pengawasan keamanan pangan di Indonesia dengan titik berat utama pada produk unggas dan hortikultura. Selain itu, kerjasama dengan Winrock Internasional juga dijalin agar proses penguatan sistem keamanan pangan pada produk pertanian segar semakin cepat.

Berbagai pelatihan keamanan pangan seperti penerapan HACCP kepada para pelaku usaha di bidang pertanian juga telah dilakukan. Pelatihan kepada para penanggungjawab otoritas kompeten di daerah serta pelatihan kepada calon inspektur pangan segar telah dilakukan untuk mengantisipasi respons pelaku usaha terhadap diberlakukannya PP no 28 ini. Berbagai sosialisasi dan penyebaran pemahaman mengenai pentingnya mutu dan keamanan pangan khususnya di era global telah banyak dilakukan melalui berbagai seminar, workshop, maupun diskusi publik. Semua ini dimaksudkan untuk mengkondisikan masyarakat dan semua stakeholder agar siap dalam implementasi PP 28.

Selanjutnya terkait dengan tugas pembinaan sebagaimana diatur dalam pasal 51, Departemen Pertanian akan kembali mengaktifkan peran dari para penyuluh pertanian atau fasilitator yang selama ini telah diserahkan kepada masing-masing Pemda. Insya Allah dalam waktu dekat kepada para penyuluh atau fasilitator dari daerah-daerah yang telah memiliki Otoritas Kompeten akan diberikan pelatihan-pelatihan yang



terkait dengan penanganan keamanan dan mutu pangan.

Peserta seminar yang berbahagia,

Untuk membangun kepercayaan konsumen domestik dan internasional terhadap produk pertanian kita, berbagai program untuk meningkatkan mutu produk pertanian harus terus didukung. Salah satu upaya membangun kepercayaan tersebut adalah dengan pemberian sertifikat dan label yang sesuai. Untuk itu Departemen Pertanian telah meluncurkan program Sistem Sertifikasi Pertanian Indonesia yang dapat disingkat dengan 51 SAKTI, dengan sistem pelabelan PRIMA bagi produk yang telah memenuhi syarat mutu dan keamanan pangannya. Peluncuran program ini yang dikaitkan dengan pencanangan Gerakan Kampanye Sadar pangan Bermutu yang telah saya laksanakan pada tanggal 30 November 2004 melalui Stasiun televisi MetroTV. Kampanye ini adalah salah satu upaya agar PP 28 dapat diimplikasikan dengan baik.

Sosialisasi PP 28 tidak hanya kepada para produsen pangan, namun juga ke konsumen harus terus kita lakukan, dengan harapan pada ujungnya nanti, berdampak selain memberikan perlindungan kepada hak-hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman untuk dikonsumsi, juga memberikan jaminan keberlangsungan usaha bagi para pelaku atau produsen yang bergerak disemua rantai agribisnis. Kampanye membangun kesadaran konsumen Indonesia agar selalu mengkonsumsi produk



pertanian yang bermutu dan aman hasil produksi petani kita harus terus digalakkan. Banyaknya kasus-kasus foodborne disease di dalam negeri dan penolakan produk-produk kita di negara tujuan ekspor seharusnya membangunkan kesadaran kita betapa pangan yang tidak aman dan tidak bermutu akan membawa kerugian yang tidak terhitung bagi semua pihak termasuk bagi negara sendiri.

Upaya di atas sekaligus merupakan upaya untuk menghadang masuknya produk-produk impor yang nampaknya semakin merajalela saat ini. Disadari bahwa kita tidak bisa menolak masuknya produk dari negara lain tanpa alasan yang dapat diterima secara ilmiah (*scientific base*) sesuai dengan kesepakatan WTO akan perjanjian SPS dan TBT. Karenanya peran dari lembaga pengawasan pangan, dalam hal ini, harus ditingkatkan. Dalam rangka pengawasan produk pertanian yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia ini sesuai pasal 40 PP 28/2004, pemerintah akan mengkaji kemungkinan meningkatkan peran dan fungsi stasiun-stasiun karantina pertanian sebagai penjaga gawang masuk dan keluarnya produk pertanian.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kepada seluruh peserta seminar dan hadirin saya sampaikan selamat berdiskusi dan mudah-mudahan bisa menghasilkan kesepahaman dan menemukan solusi bila ada hal-hal yang masih kurang jelas dalam implementasi PP 28 tersebut.



Harapan kita, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan yang aman, bermutu dan sehat untuk kesejahteraan bersama. Kami yakin, dengan sinergi dan kerja keras kita semua yang kita cita-citakan, Insya Allah dapat kita wujudkan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 April 2005

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



Keynote Speech
Menteri Pertanian Pada Talk Show
MEMBANGUN KEMBALI SEKTOR AGRIBISNIS
DI PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
(NAD)

Yang terhormat,

- Saudara Rektor Institut Pertanian Bogor
- Saudara Direktur MMA-IPB
- Saudara Direktur Bina Swadaya dan Penerbit
PT Penebar Swadaya
- Saudara para Dosen dan Civitas Akademika IPB
- Saudara Alumni MMA-IPB
- Saudara peserta pertemuan dan hadirin sekalian
yang berbahagia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti acara Talk Show pada hari ini dengan tema "Membangun Kembali Sektor Agribisnis di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)".

Saudara-saudara peserta Talk Show yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, Saudara-saudara kita di NAD dan Sumatera



Utara mendapat cobaan dari Allah SWT, berupa gempa bumi yang disusul dengan Tsunami. Banyak korban jiwa dan harta yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Dari cobaan tersebut pula kita dapat melihat betapa rasa solidaritas masyarakat Indonesia dan bahkan dunia masih sangat menggembirakan, belum luntur, ditengah kekhawatiran kita akan kerusakan mental bangsa. Hal ini terlihat dari banyaknya bantuan berbentuk barang yang sampai sekarang masih menumpuk di gudang-gudang, bantuan bentuk uang yang terus mengalir, serta bantuan dalam bentuk lainnya.

Saudara-saudara peserta Talk Show yang berbahagia,

Di Sektor Pertanian, kerusakan terjadi berupa pada lahan usahatani sebagai akibat tsunami berupa erosi, sedimentasi dan salinasi air laut. Lahan/usaha pertanian yang mengalami kerusakan akibat tsunami tersebut meliputi : Lahan Sawah/ Hortikultura seluas kurang lebih 20.000 ha, dengan sekitar 1.000 ha diantaranya juga ditanami tanaman hortikultura. Lahan Perkebunan terkena seluas 37.000 ha, meliputi lahan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, pala, pinang, coklat, nilam dan jahe. Lahan kelapa merupakan lahan terluas yang mengalami kerusakan. Lahan Kering (Ladang) terkena seluas 31.500 ha, meliputi 24.500 ha untuk tanaman palawija (jagung, kedelai, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan 7.000 ha tanaman hortikultura. dilaporkan pula bahwa ternak yang hilang sejumlah 1.854.675 ekor, terdiri atas: sapi 78.450 ekor, kerbau 62.561



ekor, domba 16.133 ekor, kambing 73.100 ekor dan unggas 1.624.431 ekor.

Setelah dilakukan survey lapangan 20.370 ha lahan pertanian dinyatakan rusak berat (tertutup sedimen lebih dari 20 cm) dan 10.020 ha rusak sedang (sedimen setebal 10-20 cm) serta 7.110 ha rusak ringan (salinasi). Kerusakan lahan usahatani terjadi di 11 kabupaten dengan luasan terbesar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Aceh Besar, Aceh Barat dan Aceh Jaya.

Selain kerusakan pada lahan usahatani, kerusakan terjadi pula pada jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani, pematang sawah, terasering, serta bangunan pada petakan lahan usahatani. Demikian juga peralatan pertanian banyak yang hilang dan rusak, seperti cangkul, parang, traktor tangan, traktor besar, pompa air, alat pengolah hasil perkebunan seperti nilam, karet dan minyak kelapa serta pengolah dendeng.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Penyebab kerusakan pada lahan pertanian yang perlu mendapat perhatian segera adalah meningkatnya kadar garam (salinitas) serta tebalnya endapan lumpur. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan FAO, pantai barat NAD merupakan wilayah yang mengalami salinitas tertinggi, yaitu lebih dari 1.000 ppm atau 40 kali dari kondisi yang dapat ditolerir oleh tanaman untuk dapat tumbuh.



Demikian juga hasil survey Badan Litbang Pertanian diketahui bahwa di Aceh Besar dan Banda Aceh tingkat salinitas mencapai 1.100 - 5.000 ppm dan Daya Hantar Listrik (DHL ekstraksi 1 : 5) mencapai 3,6 - 9,8 dS/m. Pada endapan lumpur di permukaan lahan dengan kedalaman 0 - 10 cm salinitas mencapai 230 - 1.200 ppm dan DHL 0,3 - 1,3 dS/m.

Pengaruh air laut yang masuk ke daratan dengan ketinggian mencapai 20 m di pantai barat NAD menjangkau daratan sampai sejauh 6 km dari bibir pantai. Untuk rehabilitasi lahan sawah di pantai barat diperkirakan membutuhkan waktu 2- 5 tahun, sedang untuk wilayah pantai timur NAD yang relatif lebih ringan memerlukan waktu 1-2 tahun. Untuk lahan kering berdasarkan pengalaman di lapangan telah mulai dapat ditanami berbagai jenis tanaman, dalam waktu 5 minggu setelah terjadi pencucian (*leaching*) oleh air hujan.

Disamping kerusakan lahan, banyak aparat pertanian terkena dampak Tsunami. Diketahui 94 orang pegawai Pertanian yang meninggal dunia, 11 orang cidera, 160 orang hilang dan 371 orang (KK) kehilangan tempat tinggal/rumah dari 1.457 orang aparat. Pertanian di NAD. Dengan kondisi demikian, maka fungsi pelayanan pemerintah oleh aparat pertanian menjadi terhambat.

Dari hasil pendataan yang ada menunjukkan bahwa



gedung/kantor tempat kerja lingkup pertanian di Banda Aceh yang rusak berat ada 5 yaitu: 1) Kantor Kimbun Dinas Perkebunan; 2) Kantor Dinas Peternakan; 3) Stasiun Karantina Tumbuhan dan Hewan di pelabuhan laut Malahayati; 4) Kantor Badan Ketahanan Pangan dan 5) Kantor Balai Proteksi Tanaman pangan dan Hortikultura. Selain itu sarana dan prasarana kantor, serta laboratorium banyak yang mengalami kerusakan atau hilang. Sementara kantor/gedung yang mengalami rusak ringan adalah : Kantor Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih, serta perumahannya.

Saudara-saudara peserta Talk Show yang terhormat,

Normalisasi sektor pertanian perlu segera dilakukan dalam upaya pelaksanaan program pemulihan sektor pertanian pasca gempa dan tsunami. Sektor Pertanian di NAD merupakan salah satu sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi. Meskipun areal pertanian yang terkena langsung bencana relatif kecil yaitu kurang lebih 10 persen, namun dikhawatirkan dampak psikologis terhadap gerak pembangunan pertanian di NAD akan nyata. Oleh karena itu upaya gerakan perbaikan di wilayah maupun di luar wilayah bencana perlu segera dilakukan. Hal ini harus dilakukan mengingat: 1) Sektor pertanian di NAD tidak boleh berhenti bergerak agar dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai sampai tahun 2004 serta 2) Kehilangan hasil produksi di wilayah bencana dapat disubstitusi oleh peningkatan produksi di luar wilayah yang terkena bencana. Dengan demikian



diharapkan sektor pertanian akan bergerak normal kembali, lepas dari pengaruh psikologis bencana gempa dan tsunami.

Saudara-saudara peserta Talk Show yang terhormat,

Pembangunan sektor pertanian di NAD merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian nasional. Pembangunan pertanian dilakukan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah berperan dalam memberikan fasilitasi, motivasi dan regulasi. Terdapat tiga tahapan dalam rangka normalisasi sektor pertanian di daerah bencana NAD yaitu Tahapan Tanggap Darurat, Tahapan Rehabilitasi dan Tahapan Rekonstruksi.

Dalam tahapan Tanggap Darurat penanganan daerah bencana alam di NAD dan Sumatera Utara, jajaran Departemen Pertanian telah melakukan kegiatan-kegiatan yang pada intinya adalah segera membantu guna meringankan beban penderitaan masyarakat (pertanian) yang terkena cobaan. Kegiatan tersebut berupa: 1) Menghimpun dan menyalurkan bantuan (sarana produksi, temak), pemberian santunan, koordinasi dengan instansi terkait (pusat dan daerah), dan aktivitas Posko (daerah dan pusat); 2) Bantuan penyediaan tempat tinggal sementara bagi karyawan yang rumahnya hilang; 3) Perbaikan Sanitasi lingkungan kerjafkantor; 4) Pendampingan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan, dengan tujuan untuk secepatnya dapat memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat oleh dinas-dinas lingkup Pertanian; serta 5) Pengiriman Tim secara rutin ke NAD untuk memonitor secara



langsung perkembangan yang terjadi di lokasi.

Saudara-saudara peserta Talk Show yang terhormat,

Mengawali tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka dilakukan verifikasi data dengan tujuan untuk mengidentifikasi besarnya kerusakan dan kebutuhan bantuan yang akan disalurkan ke lokasi bencana, serta merumuskan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tahapan Rehabilitasi dilaksanakan mulai bulan April s/d Desember 2005, yang meliputi kegiatan - kegiatan: 1) Pemberian bantuan Saprodi dan permodalan bagi petani (terutama untuk pengamanan produksi daerah yang tidak terkena dampak); 2) Pembangunan fasilitas kerja; 3) Rehabilitasi kantor dan rumah dinas yang mengalami rusak sedangjringan; 4) Bimbingan dan pendampingan; 5) Fasilitasi dan rehabilitasi sumber daya pertanian (termasuk lahan); 6) Pemberian santunan untuk korban yang merupakan pegawai lingkup Pertanian.

Pada tahapan Rekonstruksi yang direncanakan mulai tahun 2006 hingga 2009 meliputi kegiatan-kegiatan: 1) Pembangunan Sarana Irigasi dan Lahan Usaha; 2) Pembangunan jalan usahatani; 3) Pembangunan Unit Pengolahan Hasil Pertanian; 4) Penyediaan Sarana Pertanian; 5) Operasionalisasi program berupa pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan petugaspetani, koordinasi dan konsultasi.



Saudara-saudara peserta Talk Show yang terhormat,

Untuk dapat melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sebaik-baiknya, maka diperlukan strategi yang tepat. Strategi yang digunakan agar upaya Normalisasi Sektor Pertanian dapat terlaksana dengan baik adalah: 1) Pemulihan Hak Kepemilikan Lahan ; 2) Pemulihan Sistem Produksi di Pedesaan; 3) Pengenalan Teknologi Baru; 4) Penguatan Organisasi Petani dan Masyarakat; 5) Pendampingan untuk Normalisasi Kelembagaan Pelayanan Pertanian.

Pemulihan Hak Pemilikan Lahan perlu dilakukan karena hanya 25 persen lahan di NAD yang memiliki dokumen resmi. Banyak dokumen pemilikan lahan tersebut hilang saat terjadinya bencana. Selanjutnya akibat banyaknya korban jiwa termasuk petani, maka kepemilikan oleh ahli waris harus segera didata, terutama untuk lahan-lahan yang tidak memiliki dokumen resmi. Hal ini akan sangat sulit dilakukan dan kehati-hatian yang tinggi sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya sengketa dan upaya penyerobotan lahan, khususnya lahan milik para janda dan yatim piatu. Oleh karena itu peran serta masyarakat yang selamat sangat penting untuk ikut aktif dalam upaya pemetaan kepemilikan lahan yang ada di lingkungan masing-masing. Apabila kepemilikan lahan sudah jelas, maka upaya rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih mudah dilakukan. Langkah awal untuk memulihkan hak kepemilikan lahan adalah dengan cara menumbuhkan



kelompok dalam suatu komunitas yang diketuai oleh tokoh masyarakat setempat di lingkungan komunitasnya.

Saudara-saudara peserta Talk Show yang terhormat,

Pemulihan Sistem Produksi di Pedesaan harus dilakukan secara terintegrasi dan holistik. Hal ini mengingat bencana yang terjadi telah menghancurkan ekonomi pedesaan, sebagai akibat hancurnya pertanian, rusaknya lahan, hilangnya ternak dan rusaknya sarana dan prasarana fisiko prioritas utama yang harus diberikan untuk menolong para petani dan masyarakat lainnya yang kehidupannya tergantung kepada pertanian (buruh tani, pedagang, pengolah produk tanaman dan pemasok saprotan) untuk memulai memproduksi dan perdagangan. Dalam jangka pendek bantuan kepada petani berupa bibit-bibit tanaman, temak, saprodi dan alat pertanian merupakan pilihan yang tepat. Kegiatan tersebut perlu diikuti oleh kegiatan-kegiatan seperti pengeringan lahan yang masih tergenang air laut, pencucian lahan yang terkena air laut, pembersihan sampah dan puing-puing bangunan, penggalian saluran irigasi dan drainase, serta perbaikan lahan usahatani lainnya. mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh petani, maka kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui padat karya. Disamping itu bantuan juga perlu diberikan kepada masyarakat lainnya seperti pengolah hasil pertanian, pedagang dan pemasok saprotan untuk membangun kembali pabrik, toko dan kios, misalnya dengan menghapus sebagian hutang mereka dan menyediakan modal kerja.



Pengenalan teknologi baru harus dilakukan karena banyak lahan pertanian yang mempunyai masalah salinitas. Perlu dilakukan pengenalan inovasi teknologi yang tepat untuk menanggulangnya, antara lain adalah melalui pengenalan varietas tanaman yang toleran salinitas tinggi. Selanjutnya diperlukan juga upaya untuk memonitor dan memecahkan masalah selama proses pemulihan lahan dan air selama beberapa tahun ke depan.

Saudara-saudara peserta Talk Show yang terhormat,

Organisasi petani dan masyarakat desa perlu menjadi pemain utama dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian. Sangatlah perlu bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan utama dilakukan bekerjasama dengan mereka dan atas inisiatifnya. Oleh karena itu penguatan Organisasi Petani dan Masyarakat harus dilakukan pula.

Mengingat banyak sumberdaya masyarakat (SDM) pertanian yang meninggal, baik petugas, petani maupun SDM lain yang berperan dalam pertanian, maka untuk mempercepat proses pemulihan diperlukan pendampingan. Pendampingan dilakukan dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik oleh aparat pemerintah, dan juga pendampingan terhadap petani dalam mengelola usahatani mereka. Tenaga pendamping untuk aparat didatangkan dari pusat dan propinsi lainnya, sedangkan pendampingan kepada petani dapat



dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir maupun sarjana baru, dan juga oleh LSM.

Selain SDM pertanian yang berkurang, sarana fisik untuk pelayanan pertanian juga banyak mengalami kerusakan. Oleh karena itu untuk mempercepat pemulihan pelayanan pemerintahan di bidang pertanian kepada masyarakat perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana gedung dan kelengkapan kerja.

Saudara-saudara peserta Talk Show yang terhormat,

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam rangka Pembangunan Pertanian Sektor Pertanian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana. Semoga niat baik kita bersama dalam rangka membangun kembali NAD mendapat petunjuk, perlindungan dan ridho dari Allah Swf.

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 9 April 2005

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN/ KETUA
HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
pada SEMINAR SEHARI PEMENUHAN HAK ATAS
KECUKUPAN PANGAN**

Jakarta, 13 April 2005

- Saudara perwakilan FAO dan lembaga-lembaga Internasional lainnya di Jakarta,
- Saudara Kepala Radan atau unit kerja yang menangani ketahanan pangan propinsi dan kabupaten;
- Saudara nara sumber;
- Saudara-saudara yang mewakili partai-partai politik;
- Saudara Undangan dan Hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita diberi karunia untuk mampu menghadiri dan mengikuti Seminar Sehari Pemenuhan Hak atas Kecukupan Pangan, dengan tema yang sangat menarik, yaitu Pendekatan Hak Azasi Manusia dalam Memerangi Kelaparan. Seminar Sehari ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia, c.q. Departemen Pertanian selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, dengan Food and Agriculture Organization (FAO), yang di dalam penyelenggaraannya bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM, Komnas HAM, serta World Food Programme (WFP).

Kumpulan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2005



Seminar ini saya nilai sangat penting dan tepat waktu, karena pertama, kita semua baru saja mengalami kejadian yang sangat memilukan, yaitu terjadinya bencana tsunami di Sumatera bagian Utara, kekeringan di NTT, serta disusul bencana gempa yang melanda Kabupaten Nias dan daerah sekitarnya. Kejadian-kejadian tersebut memberikan contoh yang baik bagaimana kesiapan kita dalam memenuhi hak atas kecukupan pangan saudara kita yang berada di daerah bencana tersebut. Kedua, pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu prioritas dan strategi pembangunan lima tahun ke depan. Tripple track strategy yang dijalankan pemerintah saat ini menempatkan pentingnya revitalisasi pertanian sebagai salah satu jalur dalam membangun kembali ekonomi nasional. Oleh karena itu, seminar ini hendaknya mampu memberikan sumbangan pemikiran guna merumuskan , langkah-langkah konkrit dan strategik dalam memenuhi hak kecukupan pangan masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi sosial-budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Secara mendasar, prinsip-prinsip rumusan materi HAM dalam sistem perundangan negara R.I, telah dirumuskan dalam UUD 1945, yang dapat dibaca baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan UUD 1945. Misalnya, pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa” adalah pengakuan HAM kolektif dari suatu



bangsa untuk bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain. Pengakuan ini sekaligus menegaskan kedudukan yang sejajar semua bangsa di dunia. Pengakuan adanya HAM kolektif sebagai suatu bangsa adalah perumusan yang lebih maju dari pada perumusan Deklarasi Universal HAM yang lebih menekankan kemerdekaan manusia secara perseorangan (individu). Pengakuan terhadap “perikemanusiaan” adalah intisari rumusan HAM, karena pada umumnya orang bersepakat bahwa HAM adalah hak dasariah yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Pemenuhan pangan tidak saja merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan, tetapi juga merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia generasi yang akan datang. Pengalaman paska krisis menunjukkan bahwa, sebagian besar PDB Indonesia dibangkitkan oleh konsumsi. rumah tangga, dimana alokasi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Saudara Hadirin yang saya hormati;

Pangan bukan sekedar komoditi yang diperjual-belikan. Bahkan, pangan juga bukan sekedar zat gizi yang kita konsumsi. pangan adalah sumberdaya yang unik dan merupakan perekat bagi setiap tingkatan masyarakat; mulai rumah tangga, daerah



sampai nasional. Sebagai hasil adaptasi antara manusia dan lingkungannya, pangan juga memiliki fungsi yang sangat kompleks, baik dari sisi sosial, ekonomi dan budaya.

Akhir-akhir ini, pangan juga telah berhasil menyatukan persepsi dan kepedulian nasional dan internasional tentang pentingnya penanganan masalah pangan secara komprehensif. Kepedulian internasional tersebut, antara lain ditunjukkan di dalam Rome Declaration on World Food Summit (Deklarasi Roma dalam KTT Dunia Pangan) 1996, yang ditandatangani oleh 112 kepala negara atau pejabat tinggi dari 186 negara peserta, di mana Indonesia salah satu diantaranya. KTT Dunia pangan pada 1996 tersebut juga menyepakati untuk mengurangi separuh dari numlah penduduk rawan pangan pada tahun 2015.

Pengertian Hak atas Pangan yang sekarang banyak terkait dengan KTT Dunia pangan tersebut. Dua paragraf pertama dari Deklarasi tersebut menjadi konsensus kebijakan; dan tujuan spesifik dari KTT pangan 1996 yaitu, yang pertama, berkenaan dengan pengakuan bahwa pangan merupakan hak yang paling azasi; dan kedua, kesepakatan untuk mengurangi jumlah penduduk rawan pangan menjadi setengahnya pada tahun 2015.

Hadirin yang saya hormati;

Melanjutkan KTT Pangan Dunia 1996, pada tahun 2002 telah diselenggarakan KTT pangan Dunia (World Food Summit:

five years later/WFSFYL) yang diselenggarakan di Roma. KTT pangan Dunia ini menghasilkan Deklarasi Aliansi Internasional untuk Mengikis Kelaparan (International Alliance Against Hunger), yang di dalamnya juga mengandung substansi pemenuhan hak atas pangan tersebut. Dalam salah satu butir Deklarasi Roma tersebut, bahkan diamanatkan untuk merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dilakukan dengan menyusun Pedoman Umum (Guidelines) untuk semua negara anggota. Saya menerima laporan bahwa penyusunan Pedoman Umum (Guidelines) tersebut sudah disepakati dalam sidang-sidang tahunan FAO beberapa waktu yang lalu, dimana implementasinya bersifat sukarela.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Secara umum, situasi ketahanan pangan nasional pada 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu saya rasa sudah cukup, bahkan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan, antara lain: (a) kecenderungan kenaikan produksi beberapa komoditas pangan penting, (b) lebih stabilnya pergerakan harga-harga pangan, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar nasional (puasa, Idul Fitri, Natal dan tahun baru), serta (c) meningkatnya peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah pangan.



Memang, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengevaluasi keberhasilan pemantapan ketahanan pangan dalam periode 100 hari, karena secara substansi dan esensi, hasil-hasil pembangunan ketahanan pangan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi, pemerintah telah menetapkan dasar-dasar yang kokoh dalam mengarungi fase-fase pemantapan ketahanan pangan pada tahap dan periode selanjutnya. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus stabilisasi harga pangan, khususnya beras, melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan Nasional; upaya untuk meningkatkan tarif beberapa komoditas pangan strategis; pengaturan impor beras dan gula; meningkatkan kuantitas penerima bantuan pangan untuk meningkatkan akses pangan golongan masyarakat tertentu (miskin) melalui peningkatan jumlah rumah tangga penerima raskin; serta melanjutkan perjuangan penerimaan Strategic Product dalam forum.WTO serta upaya-upaya lain yang signifikan.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Pelaksanaan Seminar Sehari ini dilaksanakan dengan mengundang partai-partai politik, agar apa yang dibahas dalam seminar ini dapat menjadi kepedulian seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik yang selalu memperjuangkan kepentingan konstituennya. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat

penting. Tanpa dukungan politis, tanpa komitmen politis, maka perwujudan ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan saja.

Dalam konsep nilai-nilai komitmen (progression of commitment values), komitmen politis merupakan komitmen yang paling rendah, karena orang hanya memiliki komitmen terhadap sesuatu yang bersifat terpaksa. Oleh karena itu dukungan komitmen politis saja tidak cukup. Perwujudan ketahanan pangan harus memenuhi kebutuhan intelektual, sesuai dengan, dan memenuhi, perkembangan keilmuan yang ada. Oleh karena itu juga diperlukan komitmen intelektual.

Ketahanan pangan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi pemerintah bersama-sama masyarakat. Implementasi tanggung jawab masyarakat ini harus bersifat sukarela, bukan terpaksa. Di samping itu, perwujudan ketahanan pangan juga harus merupakan tujuan dari seluruh pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen secara emosional dan spiritual, sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat diselenggarakan tanpa paksaan, dan merupakan panggilan jiwa.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Ketahanan pangan mensyaratkan dipenuhinya dua sisi



secara simultan, yaitu (a) sisi ketersediaan, yaitu tersedianya pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, dalam jumlah, mutu, keamanan dan keterjangkauannya serta stabilitas ketersediaannya secara lestari, dan (b) sisi konsumsi, yaitu adanya kemampuan setiap rumah tangga mengakses pangan yang cukup bagi masing-masing anggotanya untuk tumbuh, sehat, produktif dan bermanfaat dari waktu ke waktu. Kedua sisi tersebut memerlukan sistem distribusi yang efisien, yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan ke seluruh golongan masyarakat.

Aksesibilitas terhadap pangan secara bermartabat merupakan kondisi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara fisiologis, psikologis dan spiritual, serta bagi kelangsungan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak azasi atas pangan seyogyanya tidak dikembangkan atas dasar charity, tetapi harus memperhatikan dan memberikan keleluasaan masyarakat untuk memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan penerimaan dan kultur masyarakat, serta menjunjung tinggi sisi kemanusiaan.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Jika Deklarasi Universal HAM mengakui adanya hak-hak, maka kewajiban siapakah melaksanakan hak-hak itu? Di sinilah problematikanya. Para pakar tentu sependapat bahwa negaralah yang berkewajiban untuk menghargai, melindungi dan menjamin



hak-hak itu. Deklarasi tersebut dibangun agar negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat individunya. Di sini, kita menghadapkan individu dengan negara, di mana negara dibentuk melalui baik kumpulan individu, maupun kumpulan masyarakat.

Sebagai bagian dari suatu negara yang menganut Ketuhanan Yang Maha Esa, penyelenggaraan negara tentu harus menganut falsafah yang paling mendasar tersebut. Artinya kita mengakui bahwa manusia tercipta dan ada tidak dengan sendirinya, melainkan merupakan ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan, di samping memiliki hak azasi individualnya, yaitu terlepas dari rasa lapar, pada saat yang bersamaan manusia juga memiliki kewajiban azasinya. Sebagai anggota kelompok masyarakat, individu beserta masyarakatnya juga memiliki hak dan kewajiban azasinya. Dalam tataran yang lebih luas, pemerintah, termasuk pemerintah daerah juga memiliki hak dan kewajiban azasinya. Artinya, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada negara saja, tetapi juga masyarakat. Sebagai makhluk Allah SWT, dalam hal pemenuhan hak atas kecukupan pangan, kita mendapat tuntunan yang sangat jelas, yaitu: Bukan termasuk kaumku apabila dia tidur nyenyak, sementara tetangganya kelaparan, dan ia mengetahuinya. Hal ini menyiratkan bahwa pemenuhan hak atas kecukupan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi harus dibangun dari komunitas masyarakat yang paling kecil.



Saudara hadirin dan undangan yang berbahagia;

Pemenuhan hak atas kecukupan pangan harus dilihat sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang ada. Tentu kita setuju dengan prinsip Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan bahwa setiap rumah tangga berhak mendapat pangan yang cukup. Tetapi kenyataannya, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk memenuhinya. Dari kenyataan ini, kita akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar dalam filsafat hukum, "mungkinkah kita menuntut . dilaksanakannya suatu kewajiban kepada seseorang yang memang tidak sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut?.

Saudara hadirin dan undangan yang berbahagia;

Secara mendasar, kita akan menjawab, adalah mustahil untuk menuntut tanggung jawab seseorang, termasuk negara, untuk memenuhi tanggung jawab di luar batas kemampuannya. Karena itu, HAM harus dilihat juga sebagai rumusan-rumusan normatif yang mengandung aspirasi-aspirasi ideal kemanusiaan, termasuk di dalamnya hak atas kecukupan pangan.

Akhirnya, saya mengharapkan agar seminar sehari ini mampu. beberapa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu menyusun rumusan-rumusan aksi dan langkah konkrit pemenuhan hak atas kecukupan pangan sesuai dengan kondisi



ekonomi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pemerintah Brasilia, misalnya, menetapkan Program Zero Hunger sebagai upaya untuk memenuhi hak atas kecukupan pangan tersebut, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakatnya. Dengan demikian, saya juga mengharapkan agar Seminar Sehari ini mampu memberikan solusi yang tepat dalam kerangka waktu yang tertentu, dalam menggalang komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan daerah, dengan sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 7/1996 tentang pangan yang menyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab atas perwujudan ketahanan pangan.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya secara resmi membuka Seminar Sehari Pemenuhan Hak atas Kecukupan pangan ini.

Terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 13 April 2005

Menteri Pertanian/
Ketua Harian Dewan Ketahanan pangan,
ttd
Dr.Ir. Anton Apriantono, MS



**KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN RI
PADA SEMINAR PEMBERDAYAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT RAKYAT DI PEKAN
BARU, 15 -16 APRIL 2005**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Yang saya hormati Gubernur dan para pejabat Pemerintahan Daerah Propinsi Riau,
- Pengurus dan anggota PERAGI.
- Hadirin dan Hadirat, undangan serta seluruh peserta seminar.

Syukur Alhamdulillah, dalam keadaan sehat wal'afiat, kita semua dapat hadir dan mengikuti Seminar Pemberdayaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, yang diselenggarakan atas kerjasama Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI), Pemerintah Daerah Propinsi Riau, PT. Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor, di Pekanbaru.

Saya berupaya untuk hadir, memberikan pandangan saya dan menaruh harapan akan hasil Seminar ini, karena perkebunan kelapa sawit rakyat adalah salah satu unsur penting yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat kita.

Saudara Gubernur dan hadirin sekalian.

Kita ketahui bahwa kelapa sawit adalah salah satu



komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi, prospek yang baik, luas dan panjang kedepan, serta sangat sesuai untuk agroekosistem Indonesia. Di lain pihak kita sadar bahwa pendapatan masyarakat terutama petani kita relatif rendah, sehingga sebagian besar belum sejahtera. Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang tepat tentunya sangat berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kita lihat dalam kenyataannya baik perkebunan sawit rakyat yang telah ada dan upaya pengembangannya, menghadapi berbagai kendala sehingga umumnya belum memberikan hasil seperti harapan kita, yaitu petani kelapa sawit yang sejahtera. Hari-hari ini kita masih mendengar berbagai keluhan dan harapan pekebun sawit rakyat. Meskipun tanaman kelapa sawit adalah tanaman andalan dan bernilai ekonomi tinggi, relatif mudah membudidayakannya, kalau sistem dan pengelolaannya tidak tepat, tidak akan banyak memberi manfaat. Harapan kita tentu yang sebaliknya.

Saudara Gubernur dan hadirin,

Setelah sekitar 25 tahun berupaya mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat, total luasnya relatif masih kecil. Bagian yang sangat besar adalah perkebunan besar nasional dan swasta. Bahkan akhir-akhir ini swasta asing menguasai kebun kelapa sawit kita yang relatif luas. Kalau selama masa penjajahan, perusahaan asing (penjajah) menguasai perkebunan kelapa sawit besar dan dilindungi atau diadministrasikan oleh penjajah.



Sekarang perusahaan asing menguasai perkebunan kelapa sawit besar; ironisnya, dilindungi atau di administrasikan oleh pemerintah Indonesia. Pada waktu yang bersamaan perkebunan sawit rakyat yang luasnya tak seberapa, malah kurang mendapat perlindungan atau pembinaan. Luas perkebunan sawit rakyat sangat tidak proposional terhadap luas perkebunan besar nasional dan swasta, terasa ada nuansa tidak adil. Padahal Pembukaan UUD - 45 mengamanatkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa. Apakah kenyataan dilapangan mencerminkan amanat tersebut?

Saudara Gubernur dan peserta seminar,

Petani sebagai pengusaha kecil yang jumlahnya banyak menguasai kebun kelapa sawit relatif sempit, sementara pengusaha besar yang jumlahnya relatif sedikit menguasai kebun kelapa sawit yang sangat luas. Setiap petani hanya menguasai dua hektar kebun kelapa sawit atau kurang. Meskipun kita tahu beberapa petani menguasai 50 - 100 ha kebun kelapa sawit.

Pertanyaan kita apakah dengan dua hektar kebun kelapa sawit, petani sejahtera?, layak memperoleh kredit untuk menerapkan teknologi atau meremajakan tanaman sawitnya yang sudah tua? Dengan penerapan teknologi budidaya yang seadanya, dapatkah petani memperoleh hasil atau produktifitas yang tinggi?



Selain menguasai kebun yang relatif sangat luas, perusahaan besar menguasai pabrik kelapa sawit yang nilai tambahnya jauh lebih besar daripada nilai tambah kebun kelapa sawit. Petani belum sempat mencicipi nilai tambah pabrik kelapa sawit (PKS) yang sangat manis itu.

Perusahaan besar, relatif jauh lebih mudah memperoleh kredit dari pada petani (pengusaha) kebun rakyat kecil. Nuansa ketidakadilan atau ketidakamanan makin kentara. Si kuat mendapat dukungan yang kuat dan hambatan yang lemah, sedangkan si "lemah" sulit memperoleh dukungan dan hambatan yang dihadapinya sangat banyak dan berat.

Saudara Gubernur, peserta seminar dan hadirin yang saya hormati

Petani mengeluarkan tenaga dan belanja atau berhutang untuk membuka, menanam dan memelihara kebun kelapa sawitnya, selama beberapa tahun. Tiba waktunya untuk menikmati hasil jerih payahnya, petani menangis karena tidak ada PKS yang mengolah buah sawitnya, kalau ada, letaknya jauh, yang biaya angkutnya sedemikian besar, sehingga pendapatan bersihnya menjadi sangat sedikit. Untuk hidupnya saja tidak cukup, konon lagi untuk mengangsur pengembalian kredit dan menabung untuk meremajakan pohon sawitnya.

Perusahaan besar swasta dan "mungkin" juga PTPN, yang



semula akan membangun pabrik kelapa sawit dekat disekitar kebun kelapa sawit rakyat, ternyata mangkir dengari berbagai alasan. Tentu ada masalah yang belum terselesaikan disini. Bagaimanapun yang jadi korban adalah petani. Keadaan seperti itu sudah berlangsung beberapa waktu. Solusinya tak kunjung datang. Tentunya hal seperti itu tidak patut dibiarkan. Apapun masalahnya harus dicarikan solusinya. Saya sangat berharap seminar ini dapat mencerahkan kita untuk mendapatkan berbagai alternatif solusi atas masalah yang mungkin berbeda antar lokasi. Saya berharap dalam seminar ini petani diberi kesempatan untuk mengemukakan masalah mereka, pengalaman mereka, kondisi mereka, harapan mereka dan lain-lain. Pihak lain seperti perusahaan besar swasta maupun negara, perbankan, pakar dan lain-lain urun pendapat mencari solusi. Mungkin masih ada beberapa masalah lain yang dihadapi dalam memberdayakan perkebunan kelapa sawit rakyat yang tidak sempat saya kemukakan disini. Silahkan saudara hadirin peserta seminar, termasuk dari propinsi lain, mengemukakan masalahnya dan bersama-sama mencarikan solusinya. Saya sangat berterima kasih PERAGI memprakarsai seminar ini yang didukung PEMDA Propinsi Riau, PTPN V dan IPS.

Saudara Gubernur, peserta seminar dan hadirin sekalian.

Tujuan kita membangun pertanian adalah untuk mensejahterakan petani dan warga masyarakat lain yang terkait dengan pertanian. Sebagaimana yang saya kemukakan



terdahulu. Kesejahteraan yang dimaksudkan belum tercapai. Disamping itu tentu kita harapkan kebutuhan kita baik untuk konsumsi lokal, keperluan bahan baku industri, perolehan devisa atau pengurangan belanja devisa dapat dipenuhi.

Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap agar seminar pemberdayaan perkebunan kelapa sawit rakyat dapat merumuskan beberapa alternatif sistem dan pengelolaannya, yang selanjutnya dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Saya juga berharap tidak hanya untuk kelapa sawit, namun hendaknya juga untuk tanaman lain. Semoga Allah SWT menyertai, memberkati dan meridloi upaya kita. Sekali lagi terima kasih saudara Gubernur dan jajarannya, pengurus dan anggota PERAGI, Direksi PTPN V (Persero) beserta jajarannya, Institut Pertanian Bogor atas prakarsa dan penyelenggaraan seminar ini.

Billahi taufiq wal-hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 April 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr.Ir. Anton Apriyantono, MS.



**SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA TEMU MITRA EKSKLUSIF AGRIBISNIS
PROPINSI JAWA TENGAH
Semarang, 19 April 2005**

- Yth. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang saya hormati;
- Gubernur Propinsi Jawa Tengah
- Yth. Bupati lingkup Propinsi Jawa Tengah; atau yang mewakili;
- Para Praktisi, Pemerhati dan Peneliti Agribisnis;
- Rekan - rekan Pers, serta para undangan sekalian yang saya hormati;

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarakatuh.

Sungguh suatu hal yang membahagiakan dan sudah sepatutnya kalau kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, karena hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi, dalam upaya memperkuat kesamaan persepsi kita, dalam menempatkan agribisnis sebagai motor penggerak perekonomian wilayah dan pedesaan. Semoga pertemuan ini dapat menjadi perekat diantara kita untuk bersama menggerakkan sektor pertanian secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku yang terlibat didalamnya, mulai dari petani di subsistem hulu sampai kepada para pelaku di subsistem hilirnya secara seimbang. adil dan berkelanjutan.



Kehadiran Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ditengah-tengah kita hari ini, menunjukkan kepada kita semua bahwa sektor pertanian tidak hanya terkait dengan aspek-aspek pembangunan ekonomi semata, namun juga keberhasilan pembangunan sektor ini akan berdampak sangat nyata terhadap perbaikan kualitas kehidupan bagian terbesar masyarakat Indonesia terutama di wilayah dan pedesaan. Dengan karakteristik yang dimilikinya, pembangunan pertanian di Indonesia merupakan program pembangunan yang memerlukan sinergitas lintas sektoral dan lintas Departemen. Hal ini berarti, Prioritas penanganannya tidak cukup hanya sebatas ruang lingkup Departemen Pertanian dan koordinasi instansi-instansi bidang ekonomi, namun juga harus disinergikan dengan instansi-instansi yang menangani bidang sosial dan kesejahteraan. Dan juga dibutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari otoritas keuangan, keamanan dan Pemerintah Daerah.

Kebutuhan dukungan yang kuat lintas sektor untuk percepatan pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di pedesaan semakin dirasakan, karena berbagai fakta terungkap bahwa untuk beberapa komoditas strategis dan unggulan, seperti padi dan sawit, misalnya, pada pengelolaan di tingkat budidaya, biaya produksi di Indonesia relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, namun dikarenakan kurang memadainya infrastruktur pendukung pada saat pasca panen, penyimpanan, distribusi dan



transportasi menyebabkan biaya produksi secara keseluruhan rantai agnbisnis dan tingkat kehilangan hasil menjadi sangat tinggi. Implikasinya diantaranya adalah terjadinya perbedaan harga yang sangat mencolok antara harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen akhir. Produk pertanian kita menjadi kurang mampu bersaing, ketidakpastian usaha di sektor pertanian menjadi tinggi, sehingga pada gilirannya usaha keras para petani dan pembinanya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha taninya, seringkali tidak seimbang dengan hasil yang diperolehnya. Posisi tawar petani menjadi lemah dan sering kali mereka menjadi korban para spekulan yang memanfaatkan berbagai kelemahan petani dan sifat dari prod uk pertanian yang mudah rusak. Petani semakin terjebak dalam. praktek-praktek sistem “ijon”, karena sulitnya mereka untuk akses permodalan. Dalam hal ini, Pemerintah bukannya tidak memberikan perhatian pada masalah petani terhadap permodalan. Berbagai kredit program dengan dana trilyunan rupiah telah dikucurkan untuk sector riil terutama untuk usaha kecil menengah, termasuk didalamnya untuk usaha pertanian yang sebagian besar tergolong usaha mikro, kecil dan menengah. Namun kenyataan di lapangan, apa yang sudah disepakati di tingkat pemegang kebijakan, seringkali tidak sejalan dengan pelaksanaannya di tingkat lapangan. Proses yang rumit dan kurang transparan ditambah terbatasnya fasilitator yang mampu menjembatani karakteristik sistem perbankan dengan karakteristik pertanian rakyat yang ada di Indonesia, menyebabkan penerapan kredit program sering kali tidak tepat sasaran.



Hadirin yang saya hormati;

Fenomena yang saya uraikan tadi merupakan fakta empiris yang harus kita selesaikan bersama. Komitmen bersama perlu kita bangun tidak hanya pada tataran pemegang kebijakan, tetapi juga pada setiap jenjang dibawahnya sampai pada tingkat aparat operasional di lapangan. Dalam hal ini, peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat strategis dalam memantau pelaksanaan pembangunan pertanian termasuk di dalamnya kredit-kredit program untuk petani dan para pelaku agribisnis skala usaha” kecil dan menengah lainnya pada subsistem hilir.

Saya melihat Komite Penanggulangan Kemiskinan atau yang sering disingkat dengan “KPK” yang diketuai oleh Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dengan jaringan yang dimilikinya mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten, dapat dijadikan sebagai perangkat yang strategis oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan dan perannya perlu dimaksimalkan tidak hanya pada pemantauan kredit-kredit program yang digulirkan oleh KPK, tetapi juga kredit-kredit program lainnya. Dan karena sebagian terbesar masyarakat miskin yang membutuhkan penguatan permodalan adalah masyarakat tani di pedesaan, maka besar harapan saya berbagai kredit program yang dikurangkan oleh pemerintah melalui bank-bank nasional, swasta dan daerah, karena namanya saja kredit bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, maka mekanismenya seharusnya.



Sedapat mung kin disesuaikan dengan karakteristik masyarakat petani Indonesia. Dan pada pagi hari ini, "Alhamdulillah" kita patut berbahagia, karena akan menyaksikan bersama penyerahan akad kredit program dan nota kesepakatan dari beberapa perbankan dan lembaga keuangan alternatif lainnya kepada para petani dan pelaku agribisnis. Untuk itu, saya sebagai Menteri Pertanian maupun sebagai pribadi memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya yang selama ini dikenal sebagai salah satu Propinsi yang memberikan perhatian yang besar untuk pembangunan pertanian. Mudah-mudahan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus kita tingkatkan demi tercapainya kemakmuran petani dan masyarakat agribisnis.

**Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
Saudara Gubernur; dan Hadirin yang saya hormati;**

Percepatan pembangunan pertanian, tidak terlepas dari peran investor swasta yang bergerak di berbagai subsistem agribisnis. Dari laporan yang saya terima, pola-pola kemitraan antara para investor agribisnis dengan masyarakat tani di propinsi Jawa Tengah berkembang dengan pesat. Tentunya ini merupakan sesuatu yang menggembirakan kita semua, dan akan terus kita ciptakan kondisi yang semakin kondusif untuk lebih banyak lagi menarik calon-calon investor lainnya datang ke Jawa Tengah untuk berinvestasi di bidang agribisnis. Untuk itu, berbagai perangkat yang dapat memberikan informasi sebanyak



mungkin tentang potensi dan prospek investasi agribisnis di propinsi Jawa Tengah perlu dipersiapkan. Diantaranya yang perlu kita bangun secara simultan, khususnya untuk lebih menjamin kepastian investasi dan menggaling kepercayaan perbankan ke sektor pertanian adalah “road map” agribisnis untuk setiap komoditas yang diunggulkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. “Road map” agribisnis ini diharapkan dapat menginformasikan secara jelas dan rinci tentang kondisi agribisnis komoditas unggulan tertentu di wilayah tertentu, mulai dari sub sector hulu sampai ke hilir termasuk didalamnya dukungan infrastruktur yang tersedia, transportasi serta kebijakan, proses, biaya dan waktu penyelesaian perijinan, dan informasi-informasi pendukung lainnya, yang dapat diakses secara mudah dan transparan oleh setiap pelaku maupun calon pelaku agribisnis.

Hadirin yang terhormat;

Langkah-langkah strategis yang saya ungkapkan tadi, tentunya harus diikuti oleh langkah-langkah lainnya yang sering kali bersifat spesifik wilayah. Namun demikian, yang perlu ditekankan disini adalah semuanya itu harus dibangun dengan modalitas tekad komitmen untuk maju bersama secara konsisten. Untuk itu mulai hari ini, marilah kita uji kekuatan modalitas tersebut.

Dalam hal ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Forum Makmur Bersama yang bekerjasama dengan Pemerintah



Propinsi Jawa Tengah, memprakarsai Gerakan Membangun untuk Menuju Kemakmuran Bersama ini. Saya percaya, bahwa pertemuan hari ini yang diantaranya juga teragendakan kegiatan forum dialog “menggali investasi agribisnis di Propinsi Jawa Tengah”, tidak hanya selesai hanya sampai sebatas diskusi di ruangan ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah komitmen dan konsistensi pelaksanaannya. Untuk itu, saya mendukung adanya usulan untuk dibentuknya Tim monitoring dan pengawasan terpadu tentang pelaksanaan dari komitmen-komitmen yang InsyaAllah akan terbangun pada hari ini.

Kepada Saudara Gubernur, Saudara Bupati beserta jajarannya serta masyarakat Jawa Tengah, saya ucapkan selamat dan saya sebagai Menteri Pertanian mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik , dan InsyaAllah ke depan kita akan terus bersinergi untuk bersama kita membangun pertanian untuk kemakmuran rakyat. Terimakasih.

Wassalamu' alaikum Warokhmatullohi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr.Ir. Anton Apriyantono, MS.



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN dalam SEMINAR
SEHARI “EKONOMI POLITIK PERBERASAN NASIONAL”
dan LAUNCHING BUKU “PERTANIAN INDONESIA: KINI
DAN ESOK”**

**Gedung Serbaguna Lembaga Riset perkebunan
Indonesia Bogor, 20 April 2005**

Yang terhormat:

- Bapak Prof. Bungaran Saragih,
- Bapak Prof. Sjarifudin Baharsjah,
- Bapak Prof. Bunasor Sanim,
- Bapak Prof. Go Ban Hong,
- Bapak Ir. Mindo Sianipar,
- Ketua Komisi IV DPR RI
- Saudara Dr.Ir. Bayu Krishnamurthi, MS, Staf Khusus Menko Perekonomian
- Saudara Eselon I Departemen Pertanian
- Saudara Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Badan Ketahanan pangan Propinsi seluruh Indonesia Saudara peserta seminar dan hadirin sekalian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara seminar yang mengambil tema: “Ekonomi Politik Perberasan Nasional” yang



telah didahului oleh Launching Buku yang disusun oleh Saudara Dr. Kaman Nainggolan berjudul "Pertanian Indonesia: Kini dan Esok". Kepada Saudara Dr. Kaman Nainggolan saya sampaikan penghargaan yang tinggi, karena di sela-sela waktunya yang padat dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Bimas Ketahanan pangan, masih menyempatkan diri untuk menuangkan ide, pemikiran dan pengalamannya ke dalam tulisan/buku ini. Dengan terbitnya buku "Pertanian Indonesia: Kini dan Esok" maka bertambah lagi sumber khasanah pengetahuan pertanian yang ada. Saya yakin buku ini akan bermanfaat bagi seluruh praktisi, mahasiswa, pemerhati dan peminat masalah pertanian di Indonesia.

Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak-Bapak senior saya yang telah bersedia hadir secara pribadi dengan kita semua untuk memberikan pencerahan dan solusi terhadap permasalahan pangan yang masih kita hadapi sekarang. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh undangan yang hadir di ruangan ini, yang telah menyempatkan waktunya di antara kesibukan kita masing-masing. Ini menandakan bahwa topik seminar ini sangat menarik dan menunjukkan kepedulian kita dalam membangun pertanian yang lebih baik ke depan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan dan pencerahan untuk senantiasa arif dan istiqomah dalam mengemban amanah masing-masing untuk memajukan bangsa dan negara terutama dalam mensejahterakan rakyat.



Saudara-saudara peserta seminar yang terhormati

Pangan memiliki dimensi yang sangat luas dan sangat kompleks, menyangkut berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan produksi dan ketersediaan pangan, distribusi dan pemasaran, cadangan pangan serta pengelolaan konsumsi pangan. Jenis pangan yang dikonsumsi pun sangat beragam karena dipengaruhi oleh norma dan budaya yang berlaku, kondisi lingkungan alam dan status sosial ekonomi seseorang. Perlu kita pahami bersama, bahwa pangan sebagai sumber energi tidak hanya terbatas kepada beras saja, masih banyak bahan pangan lainnya sebagai sumber energi yang dapat dihasilkan secara domestik seperti jagung, sagu dan umbi-umbian. Tetapi hingga saat ini makan pokok utama yang dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama adalah beras.

Beras merupakan komoditas strategis yang masih memerlukan intervensi dan pengendalian dari pemerintah, karena pada saat ini, sekitar 95 persen penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokoknya, dan sekitar 23,7 juta rumah tangga petani sumber pendapatannya bergantung pada usahatani padi. Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,5 persen per tahun, tekanan terhadap peningkatan ketersediaan beras akan semakin tinggi. Hal ini akan mengakibatkan kebutuhan impor beras menjadi semakin meningkat apabila tidak disertai upaya-upaya peningkatan produksi dalam negeri. Jika hal tersebut terjadi,



jelas tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan, ekonomi nasional bahkan stabilitas nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Namun demikian, upaya-upaya untuk meningkatkan produksi beras dihadapkan pada beberapa masalah dan tantangan yang antara lain adalah: (a) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (b) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (c) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (d) rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan; (e) persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman; dan (f) ketidakpastian perilaku iklim.

Produksi pangan Indonesia saat ini dihasilkan oleh sekitar 23,7 juta rumah tangga petani dengan kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,25 ha. Rendahnya penguasaan lahan sawah tersebut mengakibatkan rendahnya aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan, teknologi dan sarana produksi. Keadaan ini menyebabkan kesulitan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas apabila fasilitasi pemerintah semakin kecil. Tentu saja pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam memberikan fasilitasi yang betul-betul diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya.



Belum lama berselang, pemerintah telah menyempurnakan Kebijakan Perberasan Nasional, INPRES Nomor 2 tahun 2005. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk tetap memberikan insentif harga kepada petani. Sebagaimana diketahui jumlah gabah yang dibeli pemerintah kurang lebih hanya 7 persen dari produksi nasional. Namun, dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.330/kg GKP di penggilingan diharapkan akan mengangkat senti men harga gabah di tingkat petani, terutama pada saat panen raya.

Saya ingin kembali menekankan bahwa, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) bukanlah satu-satunya bentuk fasilitasi pemerintah untuk petani. Serangkaian kebijakan lainnya, seperti pelarangan impor beras pada saat musim panen raya untuk melindungi petani dari rendahnya harga beras dunia, penyesuaian tarif impor beras sejak Januari 2005 dari Rp. 430/kg menjadi Rp 450/kg, fasilitasi pengembangan teknologi maupun pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jaringan irigasi dan sebagainya juga telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan dan memajukan perekonomian pedesaan. Dengan demikian, jelas pemerintah tetap berpihak kepada petani. Kadar keberpihakan itu tentu sangat debatable tergantung dari pandangan masing-masing pihak yang berkepentingan.



Sementara itu, opini yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa HPP yang ditetapkan oleh pemerintah hanya berkontribusi kurang dari 15 persen terhadap pendapatan petani, sehingga kebijakan perberasan dalam rangka peningkatan pendapatan petani harus semakin difokuskan pada penanganan permasalahan non-harga. Hal ini berarti bahwa seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama harus menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya perdagangan beras lokal yang lebih baik dan mampu memberikan margin keuntungan yang lebih besar kepada petani.

Saudara-saudara peserta Seminar yang saya hormati;

Saya meyakini bahwa kebijakan sebaik dan sebagus apapun akan tinggal menjadi kebijakan apabila pelaksanaannya tidak tepat. Oleh sebab itu saya ingin menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pelaku untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sudah bukan rahasia lagi kalau praktek-praktek manipulatif dan koruptif sangat mungkin terjadi dalam segala bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga dalam proses pengadaan beras. Petani kita sangat miskin dan sangat mengharapkan dapat menikmati hasil yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya. Karena itu, saya mengharapkan agar kita semua memfokuskan diri kepada peningkatan kesejahteraan petani



sebagai tujuan utama kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

Pada seminar yang mengambil tema “Ekonomi Politik Perberasan Nasional” hari ini, bersama-sama mari kita mendiskusikan beberapa topik yang terkait langsung dengan perberasan khususnya mengenai kebijaksanaan pangan energi masa depan, perdagangan beras global dan dukungan politik nasional. Saya mengharapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir di sini dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi sehingga di akhir acara kita akan memperoleh kesepakatan untuk bersama-sama memperbaiki dan membangun pangan nasional menuju ke arah yang lebih baik. Semoga hasil dari seminar ini dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak yang terkait dan bermanfaat bagi petani Indonesia.

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam seminar ini. Semoga melalui seminar ini semua pelaku menjadi lebih peduli dan siap menjalankan tugasnya masing-masing untuk membangun pangan Indonesia yang bermartabat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya pada kita semua.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, saya membuka secara resmi seminar “Ekonomi Politik Perberasan nasional”.



Terima kasih,

Billahitaufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bogor, 20 April 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr.Ir. Anton Apriyantono, MS.



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA TRUBUS AGRO EXPO 2005
Jakarta, 21 April-1 Mei 2005**

Yang terhormat,

- Manajemen Majalah Trubus,
- Para Pelaku usaha bisnis hortikultura, Peserta Festival,
- Undangan dan hadirin sekalian.

Assalamua'laikum warakhmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena dengan rahmat dan hidayah Nya, kita pada pagi ini dapat hadir bersama pada acara Pembukaan Trubus Agro Expo 2005. Acara ini merupakan forum komunikasi dan media sosialisasi tahunan bagi para pelaku agribisnis, khususnya hortikultura yang dapat mengetengahkan berbagai kemajuan teknologi dan produk yang telah dicapai dalam pengembangan agribisnis hortikultura di Indonesia.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Majalah Trubus atas terselenggaranya acara ini. Melalui penyelenggaraan acara seperti ini diharapkan akan mampu menumbuhkan minat masyarakat dan juga calon investor, untuk terjun dan menekuni agribisnis hortikultura yang memang merupakan bidang usaha yang mempunyai prospek



yang menjanjikan. Saya harapkan dari acara ini dapat terjalin interaksi yang sinergis antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong perkembangan agribisnis hortikultura di tanah air. Majalah Trubus, yang selama ini memang telah lama bergerak di bidang media informasi dalam memajukan agribisnis hortikultura di Indonesia, tetap diharapkan menjadi salah satu mitra penting bagi Departemen Pertanian dalam membangun dan mengembangkan agribisnis hortikultura. Secara Nasional dapat dikatakan bahwa majalah Trubus dan publikasi-publikasinya yang lain telah menjadi acuan dan sumber informasi yang dapat menggairahkan perkembangan usaha hortikultura.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Usaha hortikultura, yang berupa tanaman buah, sayuran, tanaman hias atau biofarmaka, sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini karena komoditas hortikultura diproduksi bukan untuk keperluan para petani secara subsistem, tetapi produksi ditujukan untuk dipasarkan atau untuk bisnis. Apalagi produk ini pada umumnya mempunyai nilai ekonomis yang baik serta mempunyai permintaan pasar yang kontinyu. Oleh karena itulah komoditas hortikultura dinilai sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai usaha, baik berupa usaha skala kecil sebagai penunjang pendapatan keluarga, skala menengah ataupun skala komersial yang cukup besar.



Pada saat ini salah satu tantangan dalam pengembangan hortikultura di dalam negeri adalah terkait dengan masalah mutu. Pada era perdagangan global sekarang ini, tuntutan dan kesadaran konsumen akan keamanan dan mutu pangan semakin tinggi. Tantangan yang harus dihadapi terkait dengan mutu tersebut adalah bahwa produk hortikultura Indonesia harus mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh negara-negara lain, yang pada umumnya negara maju. Produk hortikultura Indonesia harus mempunyai mutu dan standar keamanan yang setara dengan produk negara lain.

Departemen Pertanian telah menetapkan angka sasaran produksi hortikultura Nasional dengan kenaikan rata-rata 4 % per tahun. Program yang diketengahkan mencakup (1) perluasan areal tanam dengan benih varietas unggul dan teknologi maju, (2) pembinaan penerapan teknologi dan Panduan Budidaya yang Benar atau Good Agriculture Practices (GAP), (3) penumbuhan kelembagaan usaha dan usaha kemitraan, (4) penggalangan investasi usaha dan promosi serta pengembangan pasar, dan (5) perbaikan regulasi.

Strategi tersebut bersifat multi sektoral perlu koordinasi yang sinergis antara stake holders dengan pihak-pihak yang terkait.



Yang kita amati di pasar ialah bahwa saat ini produk hortikultura impor khususnya buah, tersedia cukup banyak dengan harga yang lebih murah, tampilan dan mutu fisik menarik, serta tersedia dengan mudah bagi konsumen di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bahwa produk buah dalam negeri masih kalah bersaing, bahkan di dalam negeri sendiri sekalipun. Keadaan ini harus secepatnya kita atasi dengan cara meningkatkan mutu produk buah di dalam negeri, dibarengi dengan peningkatan efisiensi produksi agar harga jualnya lebih rendah dibandingkan harga jual produk impor.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pemerintah tidak ingin menutup mata terhadap persaingan yang kurang sehat, oleh mudah masuknya produk hortikultura asal impor. Disamping secara bersamaan kita berupaya untuk meningkatkan produksi dan mutu produk hortikultura Indonesia, kita juga harus mengendalikan produk buah asal impor agar tidak mematikan usaha perbuahan di dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura dalam negeri, pemerintah telah melaksanakan penyesuaian besarnya tarif impor untuk beberapa komoditas hortikultura dengan mengacu pada aturan yang dipersyaratkan oleh WTO. Pengenaan tarif impor yang lebih tinggi bagi beberapa komoditas hortikultura ini berarti bahwa harga jual produk impor tidak lagi sangat murah, dan ini diharapkan akan memberikan kesempatan bagi produsen hortikultura di dalam negeri untuk dapat



meningkatkan usaha dan dapat memperbaiki mutu produknya, sehingga mampu bersaing dengan produk hortikultura impor.

Di samping itu mulai tahun 2005 Departemen Pertanian mencanangkan penerapan Panduan Budidaya Buah yang Benar (Good Agricultural Practices-GAP) bagi pelaku usaha kebun buah skala komersial. Petani atau pekebun yang telah mengikuti GAP ini akan mendapat sertifikat mutu produk yang dikenal dengan nama Prima, yang terdiri dari Prima III, Prima II dan Prima I, sesuai dengan tingkat pencapaian yang dipersyaratkan dalam GAP. Pengenaan sertifikat Prima ini diharapkan secara bertahap akan mampu memperbaiki kualitas produk hortikultura, khususnya untuk buah-buahan dan juga komoditas hortikultura lainnya. Dengan adanya sertifikat Prima, konsumen diharapkan dapat memberikan apresiasi dan kecintaan terhadap produk hortikultura nasional yang bermutu. Pada tahun 2005 ini, telah dilakukan peninjauan dan kerjasama dengan pengelola pasar swalayan untuk dapat memanfaatkan produksi buah dari kebun-kebun yang telah disertifikasi sebagai pemasok buah-buahan atau sayuran.

Undangan dan hadirin sekalian yang terhormat,

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan produksi dan mutu adalah dengan mengajak dan mendorong pihak swasta sebagai pelaku usaha (investor), untuk berinvestasi guna mengembangkan hortikultura. Potensi hortikultura Indonesia yang besar sampai saat ini, dapat dikatakan masih belum banyak dilirik



oleh investor. Untuk memenuhi permintaan pasar dunia akan produk hortikultura, serta menghadapi persaingan yang semakin ketat, diperlukan pelaku-pelaku usaha skala menengah dan besar yang dapat bertindak sebagai lokomotif dalam penetrasi pasar internasional.

Usaha agribisnis hortikultura skala menengah hingga skala besar perlu dirintis agar produk hortikultura Indonesia memiliki daya saing di pasar nasional maupun pasar internasional. Dengan usaha komersial skala menengah, yang dapat merupakan kumpulan atau agregasi para petani komoditi sejenis skala kecil, maka efisiensi produksi dan mutu produk lebih mudah ditingkatkan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya menghimbau dan mengajak para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usaha, menuju usaha hortikultura komersial yang berdaya saing, di pasar domestik dan pasar internasional. Pemerintah akan memberikan kemudahan, fasilitasi dan insentif yang menarik bagi investor hortikultura termasuk dalam perijinan, perolehan benih (bibit), usaha kemitraan dan aspek lainnya. Kegiatan-kegiatan seperti Agro Expo 2005 ini diharapkan dapat berfungsi sebagai wahana yang efektif untuk menyampaikan potret prospek agribisnis, khususnya agribisnis hortikultura, sehingga dapat merangsang minat swasta untuk berinvestasi dalam usaha hortikultura.



Undangan dan hadirin sekalian,

Untuk pengembangan usaha hortikultura diperlukan dukungan, kerjasama dan keterpaduan upaya dari semua pihak, baik instansi pemerintah, produsen, pedagang, pelaku usaha, penyedia jasa transportasi, maupun jasa perbankan. Untuk itu saya mengharapkan, melalui event Trubus Agro Expo 2005 ini, dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara semua anggota stakeholders hortikultura, yang dapat ditindaklanjuti dengan berbagai program kegiatan, sehingga ke depan pembangunan hortikultura akan lebih berhasil.

Dengan pesan dan harapan-harapan tersebut, serta dengan memohon Ridho Allah SWT disertai ucapan Bismillahirrahmannirrahim, Trubus Agro Expo 2005 secara resmi saya nyatakan dibuka.

Billahitaufik wal hidayah,

Wassallammua'laikum warakhmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 21 April 2005

Menteri Pertanian RI,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono M.S



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA
PELUNCURAN BUKU MENUMBUHKAN IDE DAN
PEMIKIRAN: PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA
AGRIBISNIS, 60 TAHUN BUNGERAN SARAGIH**

Jakarta 27 April 2005

**MELANJUTKAN, MELENGKAPI DAN MEMPERTAJAM
PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS:
APRESIASI KEPADA PROF. BUNGERAN SARAGIH**

Yang terhormat :

- Saudara Prof. Dr. Bungaran Saragih, Mantan Menteri Pertanian
- Prof. Dr. A.A Matjik, Rektor IPB;
- Para Undangan dan Hadirin Sekalian.

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang atas berkah dan karunia-Nya kita memperoleh nikmat kesehatan dan kesempatan berkumpul bersama dalam peluncuran buku "Menumbuhkan Ide dan Pemikiran Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis" yang ditulis oleh para mantan murid, kolega dan kerabat kerja Prof. Dr. Bungaran Saragih sebagai kado ulang tahun ke-60, tepatnya pada tanggal 17 April lalu. Selamat ulang tahun untuk Pak Bungaran Saragih, semoga tetap sehat, bahagia, dan panjang umur.



Kalau para penulis buku ini adalah para mantan murid, kerabat kerja dan koleganya, maka akan lebih lengkaplah kiranya kalau saya menyambut peluncuran buku tersebut sebagai penerus Prof. Bungaran Saragih dalam mengemban amanah sebagai Menteri Pertanian.

Memang Prof. Bungaran Saragih bukanlah penggagas awal konsep maupun istilah sistem agribisnis. Pak Bungaran bukan pula yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut di Indonesia. Namun saya kira kita semua setuju beliau yang mempopulerkan istilah sistem agribisnis, penggagas strategi pembangunan sistem dan usaha agribisnis, dan menerapkannya pada tataran praksis tatkala Prof. Bungaran menjadi Menteri Pertanian pada tahun 2000-2004.

Salah satu karya besar Prof. Bungaran Saragih ialah dalam mengubah pola pikir tentang pembangunan pertanian di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut adalah: Pertama, mereorientasi pembangunan pertanian dari mengejar pertumbuhan produksi ke mendorong peningkatan kesejahteraan petani, dan mengubah posisi petani dari obyek menjadi subyek pembangunan pertanian. Kedua, mengubah cara pandang dan strategi pembangunan pertanian dari parsial dan sempit pada "on-farm" menjadi ke sistem-holistik dan luas, mencakup subsistem sarana dan prasarana "on-farm", dan pasca panen. Masalah utama pembangunan pertanian bukan



pada "on-farm" melainkan pada "off-farm" dan oleh karena itu, pembangunan pertanian harus dilaksanakan dengan pendekatan sistem integratif. Ketiga, merancang kebijakan utama pembangunan pertanian dalam menghadapi perdagangan global melalui konsep proteksi dan promosi. Perdagangan bebas yang sehat dan adil, adalah baik bagi petani dan pembangunan pertanian di Indonesia. Namun sepanjang perdagangan dunia masih belum sehat dan adil maka Indonesia berhak dan harus melindungi petaninya. Keempat, mencoba mengubah *image* atau citra mengenai usaha pertanian, dari usaha gurem dan kuno menjadi usaha komersial sebagai layaknya suatu bisnis modern.

Perubahan-perubahan pola pikir di atas, sungguh amat membantu saya sebagai Menteri Pertanian penerus beliau.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana dikatakan Prof. Bungaran Saragih dalam berbagai kesempatan, selama tahun 2000-2004 pembangunan pertanian telah berhasil keluar dari cekaman krisis dan kini siap tumbuh cepat berkelanjutan. Saya kira, kita setuju dengan pendapat Pak Bungaran bahwa masyarakat pertanian telah berhasil dalam "memadamkan kebakaran" yang dipicu oleh krisis multi dimensi tahun 1997-2000. Ini pun amat membantu pekerjaan saya dalam melanjutkan kepemimpinan di Departemen Pertanian.



Oleh karena itulah, berbeda dengan pandangan sebagian pihak, ganti menteri ganti pula strategi dan kebijakan dasarnya, saya akan melanjutkan arah dan strategi pembangunan yang telah dirintis Prof. Bungaran Saragih. Sudah barang tentu, setelah melakukan kaji ulang, saya perlu melakukan improvisasi di sana-sini.

Pertama, pembangunan sistem dan usaha agribisnis merupakan kerangka pikir konseptual yang baik, namun penerapannya akan berhasil bila dilengkapi dengan ruh atau spirit yang baik. Untuk itulah saya menekankan perlunya penumbuhan ruh pembangunan pertanian yakni “bersih dan peduli”. Bersih berarti semua aktor pembangunan pertanian, utamanya aparatur pembangunan, harus bekerja sesuai dengan aturan dan peraturan, bebas dari KKN, dan bekerja keras, sesuai dengan amanah yang diembannya. Peduli berarti seluruh aparatur pembangunan harus berpihak untuk kemaslahatan petani dan golongan termiskin dan terlemah rakyat Indonesia.

Kedua, penajaman sasaran pembangunan pertanian terutama akan difokuskan untuk pemberdayaan petani gurem, golongan petani termiskin yang masih mendominasi sektor pertanian dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan mereka. Untuk itu, program pembangunan pertanian akan diarahkan untuk memfasilitasi dan memberdayakan usaha peningkatan nilai tambah dan multi-usaha keluarga tani. Meminjam istilah Profesor



Bungaran Saragih, pembangunan pertanian akan difokuskan pada pengembangan sistem agribisnis berbasis komunitas yang bersifat "people driven". Dalam kaitan ini, upaya pendampingan di lapangan kepada para petani dan penyediaan dana penjaminan bagi penyediaan kredit untuk usaha pertanian dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk mempercepat pemberdayaan mereka.

Ketiga, melanjutkan kebijakan proteksi dan promosi dengan improvisasi dalam konsistensi dan koherensi rancangannya sehingga lebih berhasil dan berdaya guna. Pada tataran perdagangan global kita akan terus memperjuangkan hak perlakuan khusus dan berbeda melalui konsep "special products" dan "special safeguard mechanism" pada perundingan WTO.

Dalam pada itu, kita harus terus memperjuangkan perlindungan kepada petani dan usaha pertanian melalui subsidi dan dukungan harga domestik sebagai bagian esensial dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian keberlanjutan usaha pertanian kita.

Dalam kaitan itu, pada saat ini Departemen Pertanian tengah menyusun rancangan kebijakan subsidi pupuk tahun 2006. Saya akan berupaya keras agar DPR dan instansi terkait dapat mendukungnya. Kita juga tengah merancang kebijakan komprehensif revitalisasi industri gula, dengan memperhatikan



kepentingan produsen (petani) dan konsumen secara seimbang. Kita juga telah mempertajam kebijakan perberasan nasional melalui Inpres No.2 Tahun 2005. Dalam Inpres tersebut harga gabah pembelian pemerintah telah dinaikkan lagi dan istilah Harga Dasar Gabah Pembelian Pemerintah telah diganti dengan Harga Gabah Pembelian Pemerintah. Namun saya ingin menegaskan bahwa perubahan istilah tersebut (kata Harga Dasar tidak disebut lagi, sama sekali tidak mengubah komitmen pemerintah untuk sungguh-sungguh mendukung harga gabah petani.

Kita juga tengah mengkaji ulang pajak dan tarif pada berbagai produk pertanian. Namun saya ingin mengingatkan semua praktisi agribisnis bahwa proteksi yang kita perjuangkan adalah dalam rangka membantu promosi usaha. Kita harus mencegah sindroma inefisiensi dan eskalasi proteksi yang justru akan menimbulkan ketergantungan terhadap proteksi secara berkelanjutan.

Sekali lagi, apa yang kini dan akan kami lakukan bersama jajaran Departemen Pertanian adalah melanjutkan, melengkapi, mempertajam dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Bungaran Saragih selama menjabat Menteri Pertanian pada periode 2000-2004. Dalam banyak hal pekerjaan saya memang lebih mudah. Namun tantangannya sungguh jauh lebih berat. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat



berulang tahun kepada Pak Bungaran. Saya berharap Pak Bungaran tetap konsisten dengan komitmennya membantu pembangunan pertanian untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani.

Terima kasih,

Wassalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr.Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA ACARA PANEN KE-10 JUTA EKOR AYAM
PEDAGING POLA KEMITRAAN DESA
TEGALREJO, KEC. LAWANG KIDUL MUARA ENIM
TANGGAL, 28 APRIL 2005**

- Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Selatan
- Sdr. Bupati Muara Enim
- Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
- Para Peternak di Kabupaten Muara Enim
- Para Undangan dan Hadirin Sekalian yang Saya hormati

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokatuh,

Saya sungguh merasa sangat berbahagia pada pagi hari ini berada bersama masyarakat Muara Enim Sumsel dalam rangka mengikuti acara panen ke-10 juta ekor ayam pedaging pola kemitraan. Untuk ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memperkenankan kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pemanenan ini.

Acara panen yang ke-10 juta ekor ayam pedaging ini sebenarnya merupakan akumulasi dari keberhasilan-keberhasilan yang setiap kira-kira tiga bulan sekali terjadi panen ayam broiler. Saya hanya menandai panen kali ini yang ternyata telah mencapai 10 juta ekor ayam pedaging. Bagi masyarakat



Muara Enim jumlah ini sangat berarti, dalam arti kata sumbangannya untuk pendapatan masyarakat dan gizi setempat. Oleh karena itu dimasa-masa mendatang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, panen yang ke 100 juta ekor akan juga dapat kita saksikan bersama. Pekerjaan ini tentu saya rasa cukup berat, tapi sekaligus juga tantangan.

Apabila kita coba cermati perkembangan industri ayam ras broiler di tanah air, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir perkembangannya cukup menarik. Pada tahun 70-an ayam ras sama sekali belum tercantum dalam statistik pertanian kita. Kini jumlahnya telah mencapai lebih 1 milyar ekor. Perkembangan yang cukup dramatis ini telah mendorong pertumbuhan subsektor pertanian pada umumnya. Pada saat ini kontribusi ayam ras dalam mendorong pertumbuhan subsektor peternakan sekitar 25%. Selain itu pertumbuhan yang sangat tinggi dalam industri ayam ras ini telah merubah konsumsi orang Indonesia akan pangan hewani. Pada tahun 70-an proporsi konsumsi orang Indonesia akan pangan hewani hampir 60% didominasi oleh daging sapi dan daging unggas pada waktu itu hanya 20%. Sekarang proporsi itu menjadi terbalik yaitu daging unggas mendominasi pangan hewani orang Indonesia, yaitu sebesar 60% dan 20-30% daging sapi. Dalam perkembangan semacam ini maka industri ayam ras di Indonesia seolah-olah menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru peternak kita.



Namun demikian peranan ayam ras yang cukup dramatis tersebut ternyata juga mengandung kerawanan-kerawanan. Saya katakan demikian karena tingkat produksi daging dan telur ayam yang sangat tinggi tersebut ternyata komponen-komponen untuk menjalankan proses produksinya 60-70% tergantung pada impor. Sehingga sebenarnya industri ayam ras kita tergolong industri yang *foot loose*, karena belum mengakar kepada sumber daya lokal. Bibit, bahan baku pakan, bahan baku obat hewan dan teknologi lainnya sebagai besar masih di impor.

Pada kondisi ini ada beberapa alternatif kebijakan yang harus ditempuh secara holistik. Pertama, kita harus berpaling kepada komoditi ternak lainnya yang telah diakrapi oleh penduduk pedesaan, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam kampung dan itik. Komoditi ini sangat kental berbasis sumber daya lokal, ia menjadi sangat tahan terhadap guncangan-guncangan ekonomi dan moneter. Kedua, mengembangkan industri ayam ras yang secara bertahap bertambah banyak kandungan lokalnya, misalnya kita harus membangun pabrik makanan ternak skala kecil yang memanfaatkan bahan baku lokal, mengurangi impor obat hewan dengan produksi obat dan vaksin hewan yang lebih kompetitif. Dalam hal pembangunan pabrik skala kecil maka pabrik-pabrik ini harus tersebar diberbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas sekitar 5 ton/hari dan memanfaatkan bahan baku setempat, yaitu jagung dan tepung ikan. Pentingnya kita mengembangkan komoditi berbasis



sumberdaya lokal, dibuktikan oleh ayam ras itu sendiri. Pada waktu krisis, pertumbuhan subsektor peternakan menjadi -3,9% karena terpuruknya industri ayam ras yang tidak memanfaatkan bahan baku pakan lokal sehingga saat ini pertumbuhan subsektor peternakan belum pulih sepenuhnya dari dampak krisis moneter.

Saya sangat bergembira sekali bahwa perkembangan ayam ras pedaging ditempat ini dihasilkan dari pola kemitraan. Namun saya ingin jelaskan bahwa pola kemitraan yang benar adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan saling tergantung. Bukan sebaliknya sehingga menjadikan peternakan rakyat atau plasma menjadi tergantung kepada perusahaan dan bahkan adakalanya posisi peternakan rakyat tersebut kian terjepit. Akhirnya asset yang ia miliki, yaitu lahan dan kandang menjadi milik perusahaan langsung maupun secara tidak langsung. Pada sisi lain dengan sendirinya upaya-upaya untuk peningkatan posisi tawar peternak rakyat dituntut kerja keras dan profesionalisme peternakan rakyat itu sendiri. Dalam kerangka inilah pemerintah daerah memiliki peranan yang sentral.

Saya percaya bahwa pola kemitraan yang ada ditempat ini; telah menganut prinsip-prinsip kesetaraan dan egaliter. Dalam kondisi semacam ini peternak ayam ras broiler tidak lagi menjadi *price taker* tapi menjadi *price setter*, yaitu mempunyai kekuatan menentukan harga outputnya dan perusahaan menjamin pasar. Kalau ini terjadi maka telah terjadi pergeseran *mind set* atau



paradigma dari semata-mata peningkatan produksi kepada peningkatan pendapatan petani. Pemerintah selalu akan berupaya melindungi petani sebagai produsen sehingga para petani termasuk peternak selalu bergairah melakukan usahanya.

Demikianlah pokok-pokok dan arahan sambutan saya, saya sampaikan selamat kepada pemerintah daerah kabupaten Muara kesekian kalinya berhasil membuat tonggak-tonggak penting pembangunan pertanian. Saya hargai jerih payah para peternak dan saya selalu mengharap agar keberhasilan-keberhasilan tersebut diikuti pula peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**PIDATO PEMBEKALAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH DOKTER
HEWAN TAHAP I TAHUN 2005 FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN
BOGOR, TANGGAL, 30 April 2005**

Yang terhormat;

- Saudara Rektor Institut Pertanian Bogor,
- Saudara Ketua dan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Hewan, Saudara Pimpinan Fakultas di Lingkungan IPB,
- Saudara-Saudara para staf Pengajar FKH IPB,
- Saudara-Saudara para Orang Tua/Wali Dokter Hewan Baru,
- Para Dokter Hewan Baru yang saya muliakan dan saya banggakan, serta Para Undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan karuniaNya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Sabtu 30 April 2005 kita semua berkesempatan mengikuti dan menghadiri Upacara Pengambilan Sumpah Dokter Hewan (PSDH) Fakultas Kedokteran Hewan IPB Tahap I Tahun 2005.



Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pertanian Bogor, khususnya Fakultas Kedokteran Hewan yang telah berhasil membina, membimbing dan mendidik sejumlah mahasiswa, yang pada hari ini membuktikan dirinya menyelenggarakan upacara PSDH tidak kurang dari 60 orang dokter hewan baru sebagai insan-insan akademis yang diharapkan dapat mengisi dan membangun bangsa dan negara, dalam mengejar ketinggalan akibat krisis moneter yang melanda negara kita beberapa tahun lalu dan telah berdampak multi dimensi, sehingga pada akhirnya tenaga-tenaga profesional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun bidang pertanian pada umumnya serta bidang peternakan dan kesehatan hewan pada khususnya.

Ini menunjukkan bahwa PSDH hari ini tidak terlepas dari kerja keras dan pembinaan seluruh civitas akademika FKH-IPB dalam menjalankan Tridharmanya yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh karena itu hubungan antara alumni dengan almamaternya dapat terus dijalin dan dipelihara, agar lebih lanjut dapat bermanfaat dalam pencapaian tujuan yang lebih besar guna membangun ketertinggalan dibidang penyakit hewan dan kesehatan hewan dibanding dengan negara-negara maju.



Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Selaku pimpinan Departemen Pertanian sewajarnya pula saya mengucapkan terima kasih kepada FKH-IPB karena dengan segala fasilitas dan kemampuan yang ada, FKH-IPB sebagai salah satu dari 5 (lima) Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan yang ada di Indonesia mempersembahkan lagi dokter-dokter hewan baru yang menjadi insan-insan akademis penggerak dan pemacu pembangunan serta dapat menjadi *agent of development*.

Pada kesempatan ini pula saya menyambut gembira dan penuh haru atas terselenggaranya Upacara PSDH ini, gembira karena pertama dengan PSDH ini berarti menambah kuantitas dokter hewan yang siap bekerja untuk membangun bangsa dan negara melalui profesi yang dimilikinya, kedua FKH-IPB untuk kesekian kalinya mempersembahkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan karena minimnya Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan sebagai sumber pencetak dokter hewan. Haru karena merupakan perjalanan sejarah dalam kehidupan bagi dokter hewan baru dan orang tua/walinya dalam menghadiri upacara PSDH yang sederhana tetapi penuh hikmat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam era globalisasi, perdagangan bebas dan otonomi daerah, maka pembangunan pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu bidang yang mutlak dan harus dikelola secara efisien

untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya dan karena itu *good governance* menjadi prinsip dasar yang harus dijalankan dengan karakteristik utama yaitu *credibility, accountability dan transparency*.

Untuk menjalankan pembangunan pertanian yang dilandaskan atas dasar prinsip-prinsip tersebut setidaknya ada 3 (tiga) kata kunci yang perlu dicermati yaitu (1) senantiasa muncul suatu tantangan, (2) selalu timbul tuntutan dan (3) perlunya tuntunan yang harus dapat memberi kesejukan. Tantangan yang muncul membawa kita untuk bekerja lebih keras dan ulet untuk mengatasinya guna mencapai tujuan yang diidam-idamkan. Tuntutan yang timbul merupakan akibat dari adanya upaya-upaya membangun dalam kaitan perubahan kondisi yang ada. Sedangkan tuntunan yang diharapkan disini adalah memberi pedoman dan petunjuk dalam melakukan langkah-langkah konkrit yang didasari atas karakteristik utama tanpa mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan,

Profesi kedokteran hewan sebagai salah satu profesi tertua dimuka bumi ini mempunyai kekhususan tersendiri sebagaimana tertera dalam semboyan "Kesehatan Hewan untuk Kesejahteraan Manusia". Semboyan ini mengandung pengertian yang sangat luas yaitu bagaimana dokter hewan dalam menjalankan profesinya memberikan perhatian dan pelayanan



kesehatan terhadap hewan, yang pada akhirnya untuk ketentraman dan kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Prinsip-prinsip kedokteran hewan berupa pencegahan penyakit lebih diutamakan dari pada pengobatan menjadi pedoman seluruh tenaga teknis kesehatan di seluruh dunia, dengan tetap berdasarkan asas Kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang saat ini telah kita rasakan, menuntut kehati-hatian dan kewaspadaan kita semua, kerana terbukti penyakit hewan selain dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit ke hewan lainnya, juga dapat menularkan penyakit kepada manusia sebagaimana kita kenai sebagai penyakit *zoonosis* atau *food borne disease*. Sistem kewaspadaan dini dan keadaan darurat wabah penyakit hewan, menjadi suatu keharusan untuk setiap saat segera diterapkan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejadian suatu penyakit hewan menular utama, tanpa melanggar peraturan dan ketentuan yang telah diatur secara nasional maupun internasional.

Pengetahuan tentang epidemiologi semakin penting peranannya dalam mengkaji dan menganalisa kemungkinan kejadian suatu penyakit hewan menular. Hal ini pun perlu ditunjang dengan sistem informasi yang handal, akurat dan transparan. Beberapa negara telah banyak belajar dengan terjadinya wabah penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (*Food*



and Mouth Disease/FMD), Penyakit Sapi Gila (*Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE*), Penyakit Rabies (*Rabies/Lyssa*) serta penyakit Flu Burung (*Avian Influenza/AI*). Indonesia merupakan salah satu negara yang masih bebas penyakit FMD dan BSE, hal ini patut kita syukuri karena akan menjadikan hewan dan produk hewan Indonesia mempunyai arti dan nilai yang lebih kompetitif dari negara lainnya, selain itu dampak positif lainnya adalah usaha budidaya dan pengolahan hasil peternakan secara potensial dapat maju dan berkembang pesat.

Namun kejadian penyakit AI pada akhir tahun 2003 lalu membuat kita terperangah dan baru menyadari bahwa masih banyak kelemahan dalam kesisteman kesehatan hewan di negara kita, sehingga diperlukan upaya-upaya antisipasi kondisi tersebut antara penyelenggara pemerintah dengan masyarakat dunia peternakan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat munculnya wabah penyakit AI tersebut. Oleh karena itu kejadian ini patut dijadikan cambuk dan tantangan untuk lebih waspada dan meningkatkan profesionalismenya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan hewan untuk mencegah kejadian penyakit hewan berikutnya serta dalam rangka meningkatkan produksi peternakan untuk kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia.

Para Orang tua / wali serta dokter hewan baru yang saya muliakan,



Sebagaimana yang baru kita saksikan pengambilan dan pengucapan sumpah dokter hewan, maka setidaknya memberi makna dan arti yang luhur terhadap kemanusiaan karena tidak akan menggunakan pengetahuannya yang berlawanan dengan hukum perikemanusiaan. Ini menunjukkan kesungguhan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan profesi kedokteran hewan yang berarti sebagai warga negara harus menunjukkan sikap dan budi pekerti yang luhur guna memberi manfaat, meninggikan kedudukan dan mengembangkan serta menerapkan ilmu yang dimiliki dan karena itu yang lebih penting adalah pengambilan sumpah ini tidak saja disaksikan oleh hadirin sekalian, akan tetapi ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selama sekian tahun dididik dalam profesi kedokteran hewan, tentu banyak harapan dan cita-cita yang terkandung di dalam benaknya dimana cita-cita dan harapan tersebut sangat ideal tetapi belum tentu dapat diterapkan dan dicapai secara keseluruhan, sehingga hal ini akan menjadi batu ujian dan tantangan sebagaimana diuraikan di atas dan karena itu akan menjadi kuliah tambahan di lapangan untuk membuat dokter hewan menjadi tangguh dan amanah menghadapi perkembangan dunia global dan perdagangan bebas saat ini, mudah-mudahan dengan bekal dan ilmu pengetahuan yang dimiliki merupakan amanah untuk memenuhi harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia.



Tantangan profesi dokter hewan ke depan diperkirakan tidak hanya pada dunia kesehatan hewan semata-mata, tetapi akan beranjak kepada segi pengamanan hayati (*biosafety dan biosecurity*), pengamanan pangan (*food safety dan food security*) serta kelestarian lingkungan hidup (*ecosystem protection*). Pengamanan hayati mulai dibayangi dengan ancaman rekayasa genetika (*Genetically Modified Organism/GMO*) dan species asing berbahaya (*Alien Species*). Pengamanan pangan disibukkan dengan cemaran dan residu bahan berbahaya (obat, pestisida, logam berat, zat pengawet dan pewarna). Kelestarian lingkungan hidup dengan ancaman penggunaan gas berbahaya dan sinar radioaktif.

Pada saat ini disadari bahwa penyelenggaraan negara saat ini masih menjunjung tinggi derajat pemerintah (*birocratie*) disertai sejumlah kewenangannya (*authority*), namun diyakini lambat laun akan beralih kepada derajat kompetensi dan profesionalisme. Jabatan-jabatan fungsional yang berorientasi pada standar kompetensi dan profesionalisme akan terus ditumbuhkembangkan, seiring dengan upaya merampingkan jabatan struktural yang sangat potensial akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kesemuanya itu memerlukan dorongan semangat dan



moril seluruh masyarakat, khususnya yang berkecimpung di dunia pendidikan, karenanya tetap diperlukan pembelajaran ilmu kedokteran hewan dan keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, kemudian analisis dan pengkajian perkembangan teknologi bidang deteksi dan diagnosa penyakit hewan dan dampaknya bagi kesehatan manusia, lalu penyesuaian dan diselaraskan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan perkembangan dunia perdagangan bebas saat ini, maka Insya Allah keluaran dunia pendidikan kita akan semakin bertambah baik sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam menciptakan insan manusia Indonesia seutuhnya, sejahtera lahir dan batin.

Saudara-saudara dan para undangan yang saya hormati,

Demikian sedikit pembekalan yang dapat saya sampaikan terutama kepada dokter hewan baru yang diambil sumpahnya pada hari ini. Sumpah merupakan amanah dan komitmen Saudara untuk diabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Janganlah berpikir bahwa dengan ilmu pengetahuan tersebut mengharap apa yang dapat Saudara peroleh dari masyarakat dan negara, tetapi berpikirlah apa yang Saudara dapat berikan dan sumbangkan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Akhirul kata kami ucapkan selamat kepada dokter hewan



baru, semoga mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT, Amin.
Terima Kasih.

Wabillahi Taufik wal hidayah
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bogor, 26 Maret 2005

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS.



**Sambutan Pengarahan Menteri Pertanian
Pada Acara
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TANAMAN PANGAN TAHUN 2005
TANGGAL 3 MEI 2005, DI JAKARTA**

Yang terhormat,

- o Saudara para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian Para Kepala Dinas Pertanian Propinsi beserta para Kepala UPTD BPSBTPH dan BTPH
- o Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti acara "Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2005". Saya merasa berbahagia mendapat kesempatan bertemu dengan Saudara-Saudara sekalian pada saat yang tepat. Saya menilai pertemuan kali ini sangat penting dan strategis, yaitu mulainya musim tanam 2005 yang merupakan bagian dari upaya fasilitasi pencapaian produksi tahun 2005 dengan berbagai tantangan dan gangguan yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya.



Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu dari enam prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu adalah Revitalisasi Pertanian, yang dijabarkan ke dalam tiga program utama, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Sasaran yang ingin dicapai dari program peningkatan ketahanan pangan adalah: 1) ketersediaan pangan tingkat nasional sampai tingkat rumah tangga yang cukup, aman dan halal; 2) peningkatan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, dan 3) peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengatasi kasus kekurangan pangan.

Program pengembangan agribisnis mempunyai sasaran untuk meningkatkan jumlah dan kualitas usaha di bidang pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Kegiatan utamanya meliputi : 1) peningkatan produktivitas, produksi dan kualitas produk pertanian, 2) pengembangan pengolahan industri pedesaan, 3) pengembangan pasar dan perbaikan sistem pemasaran hasil, dan 4) mendorong penyediaan sarana dan prasarana usaha pertanian.

Sementara sasaran yang ingin dicapai dari program peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya kapasitas, posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani/



pelaku usaha pertanian. Kegiatan utamanya meliputi : peningkatan kapasitas petani, pemberdayaan organisasi petani, pengembangan layanan informasi petani, peningkatan kompetensi aparatur pertanian, dan perlindungan hukum bagi petani.

Saudara-saudara peserta Rakor yang saya hormati,

Tahun 2005 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian dengan sistem penganggaran yang baru, anggaran terpadu (*unified budget*) dan berbasis kinerja (*performance budget*), maka dirasakan banyak hal baru juga bagi kita semua. Kalau dulu dilakukan oleh para Pemimpin Proyek, sekarang dengan sistem baru Saudara-saudaralah yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk itu saya berpesan agar Saudara mempelajari semua peraturan dan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang menyalahi peraturan perundangan, dan juga menghindari in-efisiensi penggunaan anggaran.

Terkait dengan pelaksanaan dana dekonsentrasi, selaku pengguna Anggaran, saya mengharapkan agar dalam rapat ini kita mampu menyamakan persepsi, menyatukan kekuatan dan menggalang keterpaduan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan di era otonomi. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, diyakini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja kita semua.



Saudara-saudara peserta Rakor yang terhormat,

Pembangunan tanaman pangan saat ini dan ke depan tetap memiliki peranan penting dan prioritas, karena selain berfungsi dalam memantapkan ketahanan pangan, juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, penghematan devisa negara, pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta merupakan sumber penghidupan sebagian besar masyarakat terutama di pedesaan. Berdasarkan angka sementara tahun 2004, produksi komoditas utama tanaman pangan secara umum mengalami peningkatan. Produksi padi dapat mencapai 54 juta ton GKG lebih, sehingga kita dapat mencapai swasembada seperti yang pernah dicapai pada 20 tahun yang lalu. Begitu juga untuk jagung dapat mencapai 11 juta ton lebih pipilan kering, dan kedelai 723 ribu ton biji kering. Khusus untuk kedelai, tahun 2004 ini merupakan awal tahun kebangkitan kembali produksi, setelah periode tahun-tahun sebelumnya terus mengalami penurunan.

Ke depan sudah saatnya, kita memberikan perhatian pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, tentunya dengan tetap mempertahankan produksi sesuai kebutuhan. Untuk itu, mulai tahun 2005, akan dilaksanakan upaya-upaya terobosan pemberdayaan petani, antara lain kegiatan penjaminan dan pendampingan.

Perlu disadari bersama bahwa pelaksana utama pembangunan pertanian adalah petani sendiri dan dibantu oleh



para "stakeholder" yang bergerak di bidang penyediaan sarana produksi, permodalan, alat mesin pertanian, pengolahan, pemasaran dan lain-lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi dan perlindungan agar sistem pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik, dan bila perlu pemerintah memberikan subsidi serta bantuan.

Kegiatan penjaminan melalui penyediaan dana penjaminan dimaksudkan untuk memfasilitasi aksesibilitas petani/kelembagaan petani terhadap permodalan kredit dari perbankan. Sementara itu, pendampingan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan petani/kelembagaan petani agar mandiri dan memiliki posisi tawar yang kuat. Melalui kedua program baru tersebut, diharapkan akan mampu mempercepat pemberdayaan kelembagaan petani/kelembagaan petani dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani yang selama ini masih tertinggal.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Dalam memasuki musim tanam 2005 (April-September), berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, musim kemarau tahun 2005 secara umum diperkirakan normal, dan dimulai bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian untuk daerah-daerah yang diperkirakan curah hujannya di bawah normal, seperti sebagian besar Banten, pantai utara Jawa Barat, DIY, pantai utara Jawa Timur bagian timur, Kalsel, Sulsel bagian



barat dan utara, Gorontalo, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT agar dapat diantisipasi sejak dini.

Dalam kaitan ini, saya mengingatkan kembali agar dilakukan langkah-langkah nyata antara lain: 1) pemantauan secara intensif keadaan kekeringan dan serangan OPT, 2) pemantauan ketersediaan sarana produksi, 3) perbaikan sarana dan prasarana irigasi, 4) bila memungkinkan dilakukan pemberian bantuan sarana produksi bagi petani yang tanamannya mengalami puso, 4) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.

Dengan demikian, diharapkan produksi tanaman pangan pada tahun 2005 akan lebih meningkat dari Angka Ramalan I, dan dapat mencapai sasaran-sasaran program 2005 sebagaimana yang telah ditargetkan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Apa yang telah dicapai itu, tidak terlepas dari kerja keras para petani dan peranserta seluruh stake holders. Tentu, keberhasilan tersebut jangan membuat kita kendor bekerja. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, kita harus tetap optimis dapat memanfaatkan potensi yang ada, khususnya sumberdaya alam, teknologi, dan sumberdaya manusia. Melalui perbaikan manajemen yang dilandasi oleh komitmen “bersih dan peduli” serta transparansi, kita yakin dapat meraih kinerja yang lebih baik lagi.



Bagi para Kepala Dinas Pertanian Propinsi, saya harapkan dalam rakor ini Saudara-saudara dapat melakukan diskusi berbagai aspek secara tuntas, sehingga sekembalinya ke daerah masing-masing tidak ada lagi hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya apa yang didapatkan di Rakor ini segera disosialisasikan, dan dioperasionalkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan pula penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kontribusi dan dukungan langsung maupun tidak langsung dari Saudara-saudara baik di daerah maupun di pusat maupun di daerah, sehingga program 100 hari Departemen Pertanian yang telah lalu, mendapat nilai yang baik.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga niat baik kita bersama mendapat petunjuk, perlindungan dan ridha dari Allah swt.

Billahi taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Jakarta, 3 Mei 2005

Menteri Pertanian RI

tff

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN PADA
SEMINAR PENGGAJIAN POTENSI SEMBILAN TANAMAN
OBAT UNGGULAN INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
Purwokerto, 6-7 Mei 2005
UPAYA PEMANFAATAN TANAMAN OBAT INDONESIA
UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT**

Yang terhormat :

- o Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
- o Dekan Fakultas Farmasi dan staf dosen Univ. Muhammadiyah Purwokerto, Para Peneliti, Produsen dan Pengusaha Agribisnis Biofarmaka,
- o Hadirin yang Berbahagia

Assalamualaikum wr. wb.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia- Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Seminar Penggalan Potensi Tanaman Obat Unggulan Indonesia. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah, khususnya Dekan Fakultas Farmasi dan segenap civitas akademica yang secara proaktif telah mengambil langkah dalam upaya penggalan potensi tanaman obat unggulan Indonesia. Saya berharap penggalan potensi ini dapat mengidentifikasi jenis tanaman obat baru,



kandungan senyawa aktif, khasiat dan cara pengolahan menjadi produk komersial, serta diikuti dengan pelestarian sumber daya hayati, sehingga tidak terjadi kelangkaan tanaman obat unggulan tersebut.

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan hasil kajian yang pernah dilakukan, ditemukan sebanyak 1.845 jenis tumbuhan yang memiliki khasiat obat yang tersebar di berbagai habitat, formasi hutan dan ekosistem alam lainnya. Dari potensi tumbuhan obat yang dimiliki oleh alam Indonesia, baru sekitar 50 jenis tanaman yang telah dibudidayakan, sedangkan selebihnya dipanen dari alam. Dari 50 jenis tanaman obat tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan sembilan tanaman obat unggulan yaitu kunyit (*Curcuma domestica*), temulawak (*Curcuma xanthorriza*), jati belanda (*Guazuma ulmifolia*), mengkudu (*Morinda citrifolia*), daun salam (*Syzygium polyanthum*), cabe jawa (*Piper retrofractum*), sambiloto (*Andrographis paniculata*), jahe merah (*Zingiber officinale*), dan jambu biji (*Psidium guajava*). Dari penelitian, dibuktikan bahwa kunyit, temulawak, dan jati belanda mampu menurunkan kadar kolesterol; mengkudu dan daun salam dapat menurunkan kadar gula darah; cabe jawa sebagai afrosidiak; sambiloto dan jahe merah sebagai antineoplasma; serta daun jambu biji sebagai pembangkit trombosit bagi pasien demam berdarah.

Namun selain sembilan spesies tanaman tersebut masih sangat banyak jenis tanaman obat yang secara empiris telah diakui memiliki manfaat terapi sebagai bio medisn, bio-kosmetika dan bio-terapi. Agar bahan obat-obatan alamiah-nabati tersebut diakui secara formal sebagai obat yang berdasarkan data dan bukti ilmiah, diperlukan adanya penelitian senyawa bahan aktif, khasiat, efikasi, interaksi, dan efek sampingan dari penggunaannya.

Penelitian tersebut hendaknya tidak seluruhnya dibebankan kepada perusahaan jamu sebagai peramu bahan menjadi biofarmaka, tetapi hendaknya secara gotong-royong dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh ahli farmasi. Dengan ikut aktifnya Fakultas Farmasi diharapkan mampu mengidentifikasi senyawa aktif, mengisolasinya sebagai bahan baku obat dan meramu menjadi phito-farmaka. Usulan yang sudah sering dikemukakan adalah perlunya menempatkan phitofarmaka sebagai obat yang dapat dimasukkan dalam resep pengobatan. Apabila phito- farmaka telah diketahui senyawa aktifnya dan jumlahnya dapat distandarisasi, maka pemberian resep berupa phito-farmaka secara medis menjadi lebih mudah dipertanggung jawabkan. Hingga saat ini saya menilai masih sedikit sekali dilakukan penelitian-penelitian tersebut secara independent dan mandiri, sehingga khasiat biofarmaka sering dilebih-lebihkan, cocok untuk pengobatan bermacam-macam penyakit.



Hadirin yang saya hormati,

Pengembangan produksi tanaman obat (biofarmaka) telah lama diupayakan di Indonesia, namun dalam era persaingan internasional diperlukan pengusahaan yang lebih terencana secara terpadu. Pengembangan produksi tanaman biofarmaka harus didukung enam pilar yang saling menguatkan yaitu :

Penelitian Dasar dan Terapan,

Penelitian untuk mengidentifikasi jenis (spesies) tanaman berkhasiat, varietas atau strain yang memiliki senyawa aktif tinggi perlu digalakkan. Di samping itu perlu dilakukan penelitian kandungan biokimia aktif, tehnik isolasi, dan efikasi senyawa guna menunjang pengembangan industri biofarmaka. Khasiat yang telah diketahui secara empiris perlu dibuktikan secara ilmiah, seperti halnya obat kimiawi sintetis.

Kita perlu mendata kekayaan spesies tanaman biofarmaka, apa saja jenis yang ada dan di mana terdapatnya. Pembangunan kebun koleksi tanaman obat sudah sangat mendesak, mengingat cepatnya laju kerusakan agroekosistem dan pemiskinan plasma nutfah Indonesia yang disebabkan oleh penggundulan hutan, pembukaan lahan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan juga oleh pengambilan bahan biofarmaka dari habitat aslinya secara eksploitatif.



Subsistem Produksi yang menghasilkan bahan baku berkualitas

Untuk memperoleh produk dengan kandungan senyawa aktif yang optimal, diperlukan tehnik budidaya yang baku pada wilayah adaptasi yang paling sesuai. Mengingat banyaknya spesies atau jenis tanaman biofarmaka, maka perlu ditentukan spesies prioritas yang akan diproduksi secara luas, dengan pertimbangan : jumlah permintaan, nilai ekonomi, kesesuaian terhadap agroklimat Indonesia dan keunggulan daya saing di pasar dalam negeri dan pasar internasional. Tanaman unggulan yang telah dicanangkan oleh Badan POM kiranya dapat dijadikan acuan, namun perlu juga diperhatikan produk spesifik lokasi seperti kencur, lengkuas, kumis kucing, antanan, buah merah (*Pandanus conoideus*) dari Papua, pasak bumi (*Eurycoma apiculata*) dari Kalimantan. Wilayah produksi biofarmaka perlu dipetakan sesuai dengan konsep bioregional, yaitu wilayah produksi yang dinilai sesuai secara agroklimat.

Pembinaan dan Penyuluhan kepada petani produsen

Pengetahuan dan wawasan para pelaku produksi biofarmaka pada umumnya masih terbatas. Budidaya biofarmaka masih dilakukan secara tanaman sampingan belum merupakan usaha produksi tanaman pokok, kecuali usaha produksi kencur di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sebagian besar cara penanaman dilakukan secara asalan, tidak mengikuti tehnik anjuran baku. Untuk mendapatkan bahan baku yang bermutu dan



memenuhi standar produk, maka pembinaan dan penyuluhan yang intensif dan terpadu antar instansi untuk menerapkan teknik anjuran baku atau Standard Prosedur Operasional (SPO) perlu dilakukan dan mendapatkan perhatian yang serius; Departemen Pertanian telah menerbitkan SP untuk komoditi biofarmaka utama.

Pengembangan Produk Biofarmaka berdasarkan informasi ilmiah

Pengembangan produk biofarmaka perlu dilandasi pengetahuan kandungan senyawa aktif dan efikasinya. Nenek moyang kita secara turun-temurun telah mengembangkan "*indigenous knowledge*", berupa formula obat tradisional yang bersumber pada pengalaman empiris, budaya dan adat istiadat serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Kekayaan formula asli ini akan memberikan nilai tambah apabila dikombinasikan dengan informasi ilmiah bahan obat dan teknologi industri manufaktur masinal, sehingga menghasilkan hasil olahan yang bermutu tinggi.

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap biofarmaka-phitofarmaka

Masyarakat farmasi dan kedokteran dihimbau untuk memberikan perhatian terhadap potensi pemanfaatan obat-obatan alamiah biofarmaka/ phitofarmaka. Kesadaran masyarakat dalam praktek penggunaan obat-obatan atau



jamu-jamuan yang berasal dari biofarmaka, belum mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang sewajarnya. Hal ini dapat berdampak kontra-produktif terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pengembangan industri biofarmaka, sebagai akibat salah penggunaan atau dosis yang tidak tepat. Untuk itu saya mengharapkan agar biofarmaka dapat dimasukkan dalam bagian kurikulum Fakultas Farmasi dan Kedokteran. Mungkin juga diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Kesehatan, untuk memberikan peluang obat asli Indonesia yang telah memenuhi persyaratan uji klinis empiris dan persyaratan Badan POM dapat diresepkan dalam pelayanan kesehatan.

Promosi, pemasaran dan ekspor

Untuk menjadikan produk biofarmaka sebagai penggerak ekonomi masyarakat diperlukan pengembangan pasar dalam negeri dan ekspor. Dibandingkan dengan pasar obat hasil industri farmasi, pangsa pasar biofarmaka tidak lebih dari 5 % nya, dengan nilai ekonomi sekitar Rp.562 milyar per tahun. Total ekspor bahan biofarmaka dan olahannya mencapai US\$ 35 juta pada tahun 2003, lebih rendah diantara negara-negara Asean. Kedua pasar tersebut perlu dikembangkan agar biofarmaka menjadi penggerak ekonomi nasional.

Saya percaya apabila keenam kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terkoordinasi, maka pengembangan produksi



biofarmaka dapat lebih terdorong maju, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Hadirin yang terhormat,

Potensi ekonomi biofarmaka sangat besar, baik untuk pemenuhan pasar dan industri dalam negeri maupun untuk ekspor. Kebutuhan industri jamu tradisional skala rumah tangga dan industri skala rumah tangga dan industri-besar akan bahan baku biofarmaka setiap tahun mencapai 250.000 ton dari berbagai jenis tanaman biofarmaka. Kebutuhan bahan baku tersebut akan terus meningkat, berkaitan dengan peningkatan serapan pasar jamu/ biofarmaka dalam negeri dan ekspor jamu ke luar negeri.

Peluang pasar intemasinal diperkirakan mencapai US \$ 20 milyar pada tahun 2005 dan masih terus tumbuh, pada saat ini banyak dimanfaatkan oleh China, India, negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara pengguna biofarmaka yang menjadi peluang pasar ekspor adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Hongkong, Taiwan, Inggris dan Canada. Negara-negara Eropa Timur dan Timur Tengah juga merupakan target pasar produk olahan biofarmaka, sebagai "food-supplement" .

Untuk merespon meningkatnya pasar dalam negeri dan pasar internasional tersebut Departemen Pertanian mendukung pengembangan produksi biofarmaka di sentra-sentra produksi



dengan mengalokasikan anggaran APBN-dekonsentrasi di 13 Kabupaten pada delapan Propinsi wilayah bioregional biofarmaka.

Para pengusaha swasta diimbau untuk mengembangkan investasi memproduksi bahan baku biofarmaka dengan skala komersial, terutama di luar Jawa yang lahannya masih tersedia. Indonesia berpeluang untuk mengisi pasar internasional tersebut dengan produk spesifik seperti cabe Jawa, temulawak, jahe, lengkuas, dan sebagainya dalam bentuk produk organik, yang diproduksi secara ramah lingkungan. Dengan penerapan standard mutu yang tinggi dan penyiapan bahan yang baik, produk tersebut akan memberikan nilai tambah tersendiri di pasar internasional.

Hadirin yang berbahagia,

Kebijakan pengembangan produksi biofarmaka khususnya pada on-farm adalah pengembangan sentra produksi pada wilayah bioregional disertai dengan peningkatan mutu sesuai dengan permintaan pasar, melalui penerapan budidaya maju dengan mengacu pada SP dan GAP (*Good Agriculture Practices*).

Kegiatan produksi bahan biofarmaka tidak dapat dipisahkan dengan standar mutu-bahan dan cara memproduksi dengan tehnik anjuran baku. Penyediaan "Peta Pewilayahan



Produksi Komoditas” khusus untuk biofarmaka yang telah tersedia juga perlu segera diimplementasikan. Peta tersebut akan menjadi panduan bagi pelaku usaha, tentang komodita apa, dimana sebaiknya diproduksi, dan berapa luas lahan tersedia. Tanaman biofarmaka sebagian besar berasal dari hasil alam yang belum dibudidayakan secara baku, sesuai kaidah teknologi produksi. Oleh karena penggunaan produk biofarmaka sebagai obat berkaitan erat dengan kandungan bahan aktif atau dosis, mutu bahan dan keselamatan produk, maka pembimbingan teknik produksi perlu diintensifkan. Pembinaan penerapan manajemen mutu produk juga mendesak untuk dilakukan, menuju dipatuhinya standar mutu SNI.

Hadirin yang berbahagia,

Demikian pidato kunci yang dapat saya sampaikan. Semoga seminar ini dapat memberikan manfaat bagi Pengembangan Agribisnis Biofarmaka Indonesia.

Wasalamu'alaikum wr.wb.

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono,MS



SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
Thema
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MEMASYARAKATKAN PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI
JEMBATAN MENUJU PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN

Pada Acara

Seminar Nasional dalam Pekan Agribisnis Nasional 2005 oleh DPP Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEP) Universitas Tanjungpura, Pontianak, 9 Mei 2005

Yang saya hormati,

- Saudara-Saudara para peserta Seminar Nasional dalam Pekan Agribisnis Nasional 2005 oleh DPP Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) yang bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEP) Universitas Tanjungpura.
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan



syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara Seminar Nasional ini dalam keadaan sehat-walafiat dan dalam lindungan Nya.

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan sekaligus kehormatan bagi saya dapat menghadiri undangan ini untuk saling membuka wawasan tentang agribisnis yang berkesinambungan serta khususnya prospek pengembangan pertanian organik di Indonesia. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak kepada hadirin sekalian marilah kita dapat secara bersama-sama mencurahkan perhatian dan pikiran kita untuk mengembangkan sektor pertanian dengan lebih memberdayakan petani/ kelompok tani dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil-hasil pertanian.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian Departemen Pertanian melandaskan pada nilai dan ruh yang Bersih dan Peduli.

Visi Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah "Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani". Sedangkan Misi Pembangunan Pertanian adalah: 1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang



tinggi; 2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganeekaragaman konsumsi; 4) Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional; 5) Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan; 6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya dalam upaya peningkatan produksi pangan, maka pemerintah melaksanakan kebijakan penyediaan subsidi pupuk yang dimaksudkan agar petani mampu membeli dan menggunakan pupuk sesuai dengan rekomendasi pemupukan berimbang dalam usahatannya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pangan Nasional disamping untuk meningkatkan pendapatan petani. Rekomendasi pemupukan berimbang adalah merupakan anjuran penggunaan pupuk an-organik/kimia dengan tiga unsur hara utama yaitu Nitrogen, fosfat dan kalium dalam jumlah proporsional sesuai kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara tersebut dalam tanah. Oleh karena itu pemupukan berimbang bersifat spesifik komoditi dan spesifik lokalita.

Dalam rangka mencapai produktivitas dan mutu hasil



pertanian yang tinggi, disamping menggunakan pemupukan berimbang, pada saat ini perlu disertai dengan pemanfaatan pupuk organik.

Pemupukan organik diperlukan dalam dua aspek manfaat, yaitu pertama adalah untuk memperbaiki mutu kesuburan lahan pertanian dan yang kedua adalah dalam rangka untuk menghasilkan produk pertanian organik.

Lahan pertanian terutama sawah-sawah yang selama beberapa dekade telah diusahakan untuk intensifikasi tanaman pangan jadi pada saat ini kondisinya telah kritis. Akibat dari pemakaian bahan-bahan kimia baik pupuk maupun pestisida secara terus-menerus ternyata telah menurunkan kesuburan lahan yang ditandai dengan miskinnya kandungan bahan organik dalam tanah.

Saudara hadirin sekalian,

Penurunan kesuburan lahan oleh menipisnya kandungan bahan organik menyebabkan pemupukan menjadi kurang efektif yang ditunjukkan oleh penurunan produktivitas tanaman.

Konsisi krisis pada lahan-lahan sawah tersebut perlu segera diupayakan langkah-langkah perbaikan, mengembalikan kesuburannya melalui penggunaan pupuk organik secara intensif.



Disisi lain produk-produk pertanian organik pada saat ini telah mulai banyak permintaan baik di dalam negeri maupun internasional, karena produk tersebut dinilai aman dari bahaya residu bahan kimia disamping ramah terhadap lingkungan hidup.

Dalam hal ini pemerintah melalui Departemen Pertanian telah menyiapkan perangkat kebijakan pengaturan tentang pupuk organik sebagai dasar untuk melindungi konsumen dan petani serta sebagai instrumen pedoman untuk menghasilkan produk pertanian organik bermutu guna menyongsong kebutuhan perdagangan global.

Kebijakan pemerintah untuk mendorong pemanfaatan pupuk organik maupun sistem pertanian organik ini telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi di daerah-daerah, uji coba melalui demplot-demplot (*demonstrasi plot*) yang menunjukkan hasil yang menggembirakan di lapangan. Dari berbagai hasil uji coba/ demplot menunjukkan bahwa dengan menggunakan pupuk organik dan pestisida organik disamping diperoleh manfaat efisiensi penggunaan pupuk kimia/anorganik dapat juga bermanfaat meningkatkan kesuburan lahan, serta menghasilkan produk pertanian organik.

Saudara-saudara sekalian,

Kebijakan pemerintah dalam menciptakan fasilitas bagi pengembangan pertanian organik diharapkan mampu



mendorong dihasilkannya produk-produk pertanian organik yang memiliki keunggulan komparatif serta dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan petani di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga diharapkan akan memacu tumbuhnya industri lokal dalam negeri yang mampu memproduksi sarana pertanian organik baik pupuk organik maupun pestisida organik yang berkualitas untuk menopang perkembangan pertanian organik.

Disetiap daerah tersedia sangat melimpah bahan-bahan untuk membuat sarana pertanian organik, disamping saat ini telah banyak diciptakan teknologi sederhana pembuatan pupuk organik maupun sarana pertanian organik lainnya.

Pemerintah . daerah kami harapkan dapat berperan dalam memfasilitasi tumbuh kembangnya sistem pertanian organik pada berbagai komoditas unggulan di daerahnya, sehingga mampu dihasilkan produk-produk pertanian organik berkualitas yang mampu menciptakan nilai tambah dan devisa melalui usaha pertanian yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagai lembaga perguruan tinggi saya harapkan juga dapat berperan serta aktif dalam menggerakkan berbagai komponen masyarakat pertanian dalam menggalakkan pertanian organik dimasa sekarang dan masa yang akan datang.



Dengan kata lain bahwa pemerintah sangat mendukung pengembangan pertanian organik sebagai langkah strategis bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Akhirnya saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu memohon kepada Allah SWT semoga upaya yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat banyak khususnya bagi masyarakat petani agar dapat meningkat kesejahteraannya, sehingga kita dapat keluar dari berbagai kesulitan yang kita hadapi.

Terimakasih saya sampaikan kepada Saudara para penyelenggara seminar ini atas prakarsa dalam upaya pengembangan pertanian organik di Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua untuk dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Wabillahirtaufiq wal hidayah,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono,MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN TAHUN 2006
JAKARTA, 11 MEI 2005**

Yang terhormat,

- o Saudara Pejabat Eselon I dan II Lingkup Departemen Pertanian dan Instansi Terkait;
- o Saudara Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian Propinsi;
- o Undangan Yang berbahagia;

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwaataalla, atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga pada pagi hari ini kita hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian tahun 2006. Saya menilai pertemuan ini sangat penting dalam upaya kita untuk mempertajam arah dan membangun sinergi kegiatan pembangunan pertanian yang kita lakukan. Diharapkan dengan langkah-langkah ini pembangunan pertanian yang kita laksanakan semakin menunjukkan hasil yang lebih baik.

Saudara-Saudara Sekalian;

Saat ini dan kedepan, pembangunan ekonomi nasional diprioritaskan kepada aspek-aspek :(1) Pertumbuhan ekonomi; (2) Perluasan kesempatan kerja; dan (3)



Pengentasan kemiskinan.

Setelah perekonomian kita mengalami krisis, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, baik untuk memulihkan pendapatan maupun mengejar keteringgalan kita dari negara lain. Kita harus mengupayakan agar pada tahun-tahun yang akan datang ekonomi nasional bertumbuh sekitar 6-8% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga kita perlukan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2004, tingkat pengangguran mencapai 10,3 juta jiwa atau 9,9 % dari angkatan kerja. Jumlah penduduk miskin pada tahun yang sama mencapai 36,1 juta jiwa atau 16,6 % dari jumlah penduduk. Sekitar 55,7 % dari penduduk miskin tersebut adalah petani dan nelayan.

Saudara Saudara Sekalian:

Dalam mewujudkan pencapaian prioritas prioritas nasional tersebut, peran sektor pertanian sangat strategis. Dalam tahun 2005-2009, pertumbuhan sektor pertanian diharapkan mencapai rata-rata 3,29 % per tahun. Untuk memperluas kesempatan kerja, sektor pertanian masih diharapkan menyerap tenaga kerja yang paling besar yaitu 41,3 juta tahun 2005 menjadi 44,5 juta tahun 2009 (42,2 % dari angkatan kerja). Kontribusi sektor pertanian dalam penanggulangan kemiskinan ditandai dengan menurunnya penduduk miskin di perdesaan dari 18,9% tahun 2005 menjadi 15,0% tahun 2009.



Disamping aspek aspek makro seperti diatas, sektor pertanian masih berperan besar dalam pemantapan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan pokok (beras) harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri minimal sebesar 90 persen. Idealnya tentu kita dapat terus swasembada seperti dicapai pada masa yang lalu. Dari sisi kualitas pangan, konsumsi pangan asal temak dan produk hortikultura diharapkan terus meningkat. Untuk itu produksi komoditas tersebut perlu terus didorong sehingga dapat tersedia setiap saat, diwilayah manapun dengan harga yang terjangkau.

Saudara Saudara Sekalian:

Sejalan dengan tantangan diatas, maka pelaksanaan pembangunan pertanian saat ini dan kedepan memerlukan perubahan-perubahan, yaitu antara lain: Pertama, orientasi pembangunan pertanian tidak semata kepada tujuan peningkatan produksi, tetapi lebih kepada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta pendapatan pelaku usaha. Pengalaman masa lalu menunjukkan peningkatan produksi saja ternyata tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani dan daya saing pertanian. Kedua, pergeseran pendekatan komoditi kepada pendekatan usaha. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebebasan petani untuk memilih komoditi yang diusahakan, sehingga yang perlu dikembangkan adalah usahanya. Salah satu penjelasan mengapa daya saing kita lemah adalah karena kurangnya petani pengusaha di Indonesia; Ketiga, sesuai dengan



tuntutan partisipatif, pelaksanaan pembangunan pertanian diarahkan kepada peningkatan sebesar besarnya peran serta masyarakat, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. Anggaran pemerintah yang terbatas diarahkan dalam rangka membangkitkan sebesar besarnya investasi masyarakat, termasuk modal sosial; Keempat, diperlukan komitmen yang lebih tinggi lagi dalam kepedulian kepada pertanian dan pelaku pembangunan pertanian (petani). Peningkatan kepedulian dicirikan oleh peningkatan dalam memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan dan aspiratif.; dan Kelima, dalam meningkatkan kepedulian diperlukan pelaksana pembangunan pertanian yang bersih, yaitu bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel.

Saudara Saudara Sekalian:

Kebijakan strategis yang terus diupayakan oleh Departemen Pertanian bersama instansi terkait meliputi beberapa hal, Pertama, advokasi kebijakan makro yang kondusif untuk pembangunan pertanian, yaitu: inflasi yang rendah, nilai tukar stabil dan suku bunga (riel) yang positif; Kedua, kebijakan harga dan perdagangan yang memberikan insentif memadai bagi petani, melindungi petani dari perdagangan internasional yang tidak adil, serta mendorong kelancaran perdagangan



komoditas pertanian di dalam negeri. Dalam kaitan ini, Departemen pertanian terus mengusulkan penggunaan dana talangan (LUEP) yang lebih besar untuk memfasilitasi pembelian gabah; Ketiga, terus mengupayakan kebijakan pembiayaan pertanian yang lebih sesuai dengan ciri pertanian Indonesia. Untuk ini kita sedang mengembangkan pola perbankan syariah dengan dana penjaminan; Keempat, terus mendorong pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik. Dengan terbentuknya Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, kebijakan investasi dan pengembangan lahan dan air irigasi diharapkan bisa lebih intensif lagi.

Saudara- Saudara yang Saya hormati:

Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009 dilaksanakan melalui Tiga Program, yaitu (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan dalam rangka fasilitasi bagi peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui: (1) peningkatan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan serta produk-produk olahannya. (2) Pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menguntungkan petani (3) pengembangan budaya dan produksi pangan lokal, dan (4) pengembangan kelembagaan pangan yang dibangun dari masyarakat sebagai kelembagaan



usaha yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Operasionalisasi Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan; menjaga ketersediaan pangan pangan yang cukup, aman dan halal di setiap daerah setiap saat; dan antisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan.

Program Pengembangan Agribisnis ditujukan dalam rangka fasilitasi berkembangnya usaha agribisnis baik sub sistem hulu, on farm, maupun sub sistem hilir yaitu pengolahan, pemasaran hasil dan sub sistem penunjangnya, yang dibangun oleh masyarakat petani dengan mengembangkan peluang-peluang usaha pada semua sub sistem. Operasionalisasi Program Pengembangan.

Agribisnis dilakukan melalui pengembangan sentra/kawasan agribisnis komoditas unggulan. Dengan program ini diharapkan akan tumbuh kawasan-kawasan agribisnis komoditas unggulan yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi, sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi nasional maupun regional.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ditujukan dalam rangka fasilitasi pemberdayaan, percepatan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan perlindungan terhadap petani



serta usahanya. Operasionalisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilakukan melalui pemberdayaa penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi lainnya.

Saudara Saudara Sekalian:

Sesuai dengan penerapan otonomi daerah pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional antara lain rencana tata-ruang pengembangan kawasan dan program pengembangan kawasan termasuk sasaran serta upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangannya. Propinsi bertanggungjawab dalam keberhasilan pengembangan yang bersifat lintas wilayah Kabupaten/ kota, dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam keberhasilan peningkatan ketanahanan pangan, pengembangan komoditi unggulan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya.

Mengingat bagian terbesar dari pelaksanaan pembangunan pertanian berada di propinsi dan kabupaten/kota, maka keberhasilan pembangunan pertanian secara keseluruhan sangat tergantung kepada pelaksana pembangunan di daerah. Oleh karena itu saya mengharapkan perhatian dan kerja keras Saudara Kepada Dinas/Badan di propinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Sebagai aparat Pemerintah Daerah Saudara dituntut untuk mensinergiskan prioritas-prioritas daerah masing masing dengan sasaran



sasaran sektor pertanian secara nasional.

Saudara Saudara Sekalian:

Penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Selama ini perencanaan dilaksanakan atas dasar azas *top-down policy* dan *bottom-up planning*. Pemerintah (pusat) menetapkan kebijakan makro pengembangan kawasan, Sedangkan penyusunan rancangan pembangunan pertanian dilakukan dari bawah secara berjenjang melalui media Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota, Musrenbang Tingkat Propinsi, dan Musrenbang Tingkat Nasional.

Dalam mekanisme pembangunan pertanian, aspek monitoring, pelaporan dan evaluasi merupakan aspek terlemah, akibat rendahnya perhatian terhadap kegiatan tersebut. Kita sepakat bahwa kegiatan-kegiatan monitoring dan pelaporan penting dalam penyempurnaan pelaksanaan, dan penyusunan rencana kegiatan tahunan ke depan harus didasarkan kepada hasil hasil evaluasi tahun sebelumnya. Pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi ini merupakan indikator komitmen pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut akan menentukan prioritas fasilitasi tahun berikutnya. Untuk itu aspek ini harus mendapat perhatian lebih besar lagi.



Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhir kata, kepada seluruh peserta saya sampaikan selamat berdiskusi dan menghasilkan rumusan yang disepakati dalam pembangunan pertanian.

Wabillahi taufik wal hidayah,
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 11 Mei 2005

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**ARAHAN MENTERI PERTANIAN PADA PERTEMUAN
SINKRONISASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA 2005
(CISARUA, 12 -14 MEI 2005)**

Yang saya hormati ;

- Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Departemen Pertanian
- Para Kepala Dinas Pertanian Propinsi I Dinas yang menangani hortikultura.
- Kepala UPTD, BPSB dan BPTPH
- Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti acara Pertemuan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura 2005.

Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pesan-pesan dan harapan kepada Saudara-Saudara, agar pertemuan yang saya anggap penting ini dapat memberikan luaran optimal, dalam rangka sinkronisasi antar institusi dan antar daerah dalam pelaksanaan pengembangan hortikultura pada tahun 2005. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat dibicarakan program



kegiatan dan tantangan yang kita hadapi di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota, bahkan di tingkat internasional dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri hortikultura secara efisien dan efektif.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya mengharapkan agar komoditas hortikultura dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani, meskipun diusahakan dalam jumlah dan luasan yang relatif tidak begitu besar. Persoalannya adalah, bagaimana bimbingan dan pembinaan manajemen dari Saudara-saudara sebagai Kepala Dinas, terhadap usaha hortikultura untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya secara maksimal, sehingga daya saing para pelaku bisnis hortikultura unggul di pasar lokal, nasional dan global.

Harapan petani untuk memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas hortikultura ini cukup besar ; oleh karena itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memfasilitasi mereka mengembangkan usaha bisnis dengan sebaik-baiknya. Perhatian pemerintah melalui Departemen Pertanian terhadap pengembangan komoditas hortikultura ini cukup besar antara lain melalui kebijakan, berbagai kegiatan program dan proyek, dan alokasi dana dekonsentrasi untuk mendukung pengembangan agribisnis hortikultura. Melalui peningkatan produksi, mutu produk dan ketersediaan produk secara



kontinyu, diharapkan komoditi hortikultura menjadi penggerak ekonomi pedesaan dan menjadi sumber pendapatan tunai serta kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan kerja keras kita semua untuk menghasilkan produk-produk hortikultura yang berkualitas dalam jumlah yang dapat mencukupi kebutuhan pasar, untuk buah-buahan, sayuran, tanaman hias maupun biofarmaka bagi pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Saya mengharapkan para Kepala Dinas dapat mengidentifikasi dan sekaligus mengembangkan komoditi unggulan spesifik wilayah masing-masing. Pengembangan komoditi spesifik wilayah ini harus dilakukan dengan menerapkan teknologi baku dan dalam skala yang luas sehingga mencapai skala ekonomi komersial. Hanya dengan pengusahaan dalam skala luas dan dengan teknologi maju itulah kita dapat masuk dalam kompetisi pasar internasional. Masing-masing daerah dalam pemerintahan otonomi ini hendaknya dapat menawarkan kemudahan dan fasilitasi investasi di bidang usaha agribisnis hortikultura. Komoditi pisang, jeruk, mangga, belimbing, nenas, pepaya, manggis, rambutan, durian memiliki prospek untuk dikembangkan guna mengisi pasar dalam negeri maupun ekspor. Demikian juga berbagai jenis sayuran, tanaman hias dan biofarmaka tropis mempunyai peluang besar di pasar internasional.



Salah satu program Departemen Pertanian yang akan dilakukan pada tahun 2005 ini adalah program penjaminan kredit melalui Bank Syariah dan pendampingan. Kita menyadari bahwa dua masalah mendasar yang harus mendapat perhatian serius yaitu kompetensi sumberdaya petani yang masih, belum memadai serta kemampuan penyediaan modal yang lemah. Dengan dana penjaminan yang disediakan kepada Bank Syariah diharapkan dapat memfasilitasi aksesibilitas petani/ kelompok tani terhadap kredit modal secara lebih mudah. Pendampingan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan petani/ kelompok tani agar mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Melalui kedua program tersebut, diharapkan mampu mempercepat pemberdayaan kelembagaan petani/ kelompok tani dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagaimana telah sering saya kemukakan, pembangunan pertanian ke depan harus memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat, bukan seperti penanganan sebagaimana biasanya (*business as usual*). Perhatian Pemerintah yang sangat besar terhadap pengembangan pertanian dewasa ini, harus kita jadikan momentum untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian. Untuk itu perlu adanya terobosan di bidang perencanaan dan kebijakan pertanian yang bersifat terpadu dan komprehensif di tingkat makro dan mikro sehingga dapat memberikan hasil yang nyata



dan cukup besar. Dalam konteks demikian maka aspek efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber dana menjadi prasyarat mutlak. Saya mengharapkan terjadinya perubahan perilaku (mindset) dalam mengelola dana proyek (APBN/APBD) menjadi lebih efisien dengan menghilangkan dan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pencapaian sasaran program termasuk pemberian pelayanan kepada pejabat, baik dari Pusat maupun Daerah. Perubahan perilaku seperti ini harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai birokrasi. Hanya dengan demikianlah budaya efisiensi dan efektivitas bisa bergulir secara lancar dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, perencanaan jangka menengah pembangunan pertanian perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, terintegrasi dengan unsur pendukung infrastruktur, pemasaran, aspek hukum, pembiayaan dan sarana pendukung lainnya. Pengembangan komoditas unggulan perlu lebih fokus dengan mempertimbangkan penyediaan pangan dalam negeri, pengembangan industri pertanian, dan pengembangan komoditas untuk ekspor.

Pengembangan pertanian jangka panjang yang ingin dicapai adalah sistem pertanian industrial yang berkelanjutan, berdaya saing, mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani yang pada gilirannya menciptakan pengembangan ekonomi nasional.



Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah (tahun 2005-2009) telah ditetapkan strategi Umum sebagai berikut; (1) Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN, (2) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, (3) Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan, (4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian, (5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, (6) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna dan (7) Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian. Sejalan dengan strategi tersebut, maka Program Pembangunan Pertanian 2005 - 2009 yang telah ditetapkan adalah; (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam alokasi penganggaran pembangunan pertanian, sebagian besar dari dana pembangunan pertanian dialokasikan ke daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi, untuk propinsi dan kabupaten/kota. Terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan dana dekonsentrasi ini, saya berpesan agar Saudara-Saudara dapat menfaatkannya secara bersih, jujur dan bertanggung jawab, sepenuhnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian dan mensejahterakan petani. Dalam pertemuan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi, menyatukan kekuatan dan

menggalang keterpaduan antara pusat dan daerah dan antar institusi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan pertanian.

Pada prinsipnya peran aparatur pertanian adalah sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator bagi kepentingan petani, pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan pertanian. Karena itu aparatur dan jajaran Departemen Pertanian perlu bekerja lebih keras dan profesional, yang dilandasi moral membangun yang tinggi. Kita perlu tetap meningkatkan kinerja dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan memegang teguh komitmen dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hortikultura yang transparan dan bebas KKN. Oleh karena itu hindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Keberhasilan dalam pembangunan pertanian, termasuk subsektor hortikultura, adalah merupakan hasil kerja para petani dan peran serta semua pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Melalui perbaikan manajemen dengan dilandasi oleh komitmen “bersih dan peduli” serta transparansi, kita yakin dapat meraih kinerja yang lebih baik lagi di masa depan.



Saya berharap agar hasil-hasil dari pertemuan sinkronisasi ini dapat membekali Saudara-Saudara dalam melaksanakan kegiatan di daerah masing-masing, serta terjalannya koordinasi antar institusi Pusat dengan Daerah dan antar daerah. Dengan demikian maka sinergisme dan optimalisasi dalam pemanfaatan sumberdaya dapat diwujudkan, yang akhirnya berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan agribisnis hortikultura secara nasional. dan amal bakti kita memperoleh rahmat dan diberkati oleh Allah SWT. Selamat bekerja

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Jakarta, 13 Mei 2005

Menten Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN DAN PENGARAHAN
MENTERI PERTANIAN RI. PADA RAPAT
KOORDINASI TEKNIS NASIONAL PETERNAKAN
(RAKORTEKNAS) TAHUN 2005**

Yang Terhormat :

- o Saudara Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan,
- o Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan,
- o Para Kepala Dinas Peternakan (Yang Menjalankan Fungsi Peternakan) Provinsi dari Seluruh Indonesia,
- o Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan,
- o Hadirin Sekalian,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Pada kesempatan ini, marilah pertama-tama kita Panjatkan Puji dan Syukur ke-Hadirat Allah SWT, karena hanya oleh perkenan-Nya saja kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakorteknas) Peternakan Tahun 2005. Saya menyambut gembira diselenggarakannya Rakorteknas yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei 2005 di Jakarta. Saya menganggap kegiatan ini cukup penting, karena sesuai dengan kaidah dari sebuah siklus manajemen, kegiatan ini dapat dimasukkan pada tahapan awal dalam pelaksanaan suatu



Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2005 yang seharusnya dilaksanakan pada awal tahun.

Secara bersama-sama dengan jajaran Pertanian lainnya, kemarin telah kita laksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2005. Apapun wujud dan nama dari sebuah pertemuan, kepada kita dituntut untuk selalu menghasilkan suatu output bagi kelancaran pembangunan pertanian/ pembangunan nasional.

Saudara Sekalian,

Selanjutnya saya ingin menyampaikan, sesuai dengan agenda pemerintahan, maka untuk 5 tahun ke depan Departemen Pertanian harus menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pertanian yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN); Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009 yang disusun secara partisipatif, transparan dan bertanggungjawab ; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009 ; dan Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan perundangan lainnya.

Renstra Departemen Pertanian 2005-2009 disusun sebagai pedoman bagi aparat pertanian dalam melaksanakan



pembangunan pertanian dengan tetap berpegang dan memperhatikan kinerja Departemen Pertanian periode sebelumnya, kendala yang dihadapi dan kekuatan yang dimiliki, serta antisipasi dinamika lingkungan dan tantangan global di masa depan. Renstra Departemen Pertanian 2005-2009 akan menguraikan analisis perkembangan strategik; ruh, visi dan misi; tujuan dan sasaran; strategi dan kebijakan; serta program dan kegiatan Departemen Pertanian dalam fasilitasi pembangunan pertanian. Pesan saya kepada seluruh aparat Departemen Pertanian agar nantinya selalu memanfaatkan dokumen Renstra Departemen Pertanian ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Melalui Renstra ini pula kita akan dapat mengevaluasi secara periodik terhadap tingkat keberhasilan yang dicapai.

Sebagai sebuah dokumen penting pembangunan pertanian ke depan, Renstra ini hendaknya dijadikan suatu acuan bagi stakeholders pembangunan pertanian terutama jajaran birokrasinya dalam arti luas, sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu: Membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh; Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan dan Membangun



sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut, maka Departemen Pertanian menetapkan 3 (tiga) program pembangunan pertanian tahun 2005 - 2009, yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis; dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Selanjutnya dengan tetap mengacu kepada Renstra Departemen Pertanian tersebut akan dijabarkan lebih dalam Masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Saudara Sekalian,

Departemen Pertanian ke depan akan mengembangkan Pola Syariah, dan tahun ini sebagai uji coba Pendampingan dan Penjaminan pola tersebut disediakan dana yang berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun ini sekitar Rp 95 milyar. Sebagai bentuk uji coba, tentu kepada kita dituntut agar uji coba ini dapat berhasil, sehingga pada tahun selanjutnya akan dapat ditingkatkan kegiatannya, dan tahun 2006 direncanakan anggarannya sebesar Rp 400 milyar. Secara bertahap dan pasti, ke depan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa block grant akan semakin diperketat dan pada saatnya sudah tidak ada lagi bentuk BLM ini.



Berbicara tentang besaran anggaran APBN di suatu instansi hendaknya tidak serta merta menunjukkan/menyiratkan tingkat kinerja instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan semangat untuk peningkatan efisiensi anggaran, maka ke depan besar kemungkinannya akan terjadi pengurangan-pengurangan anggaran di tiap Departemen. Disamping itu ke depan agar dapat dipertegas lagi tentang dana dekonsentrasi pembangunan pertanian hendaknya diarahkan pada pembiayaan non fisik, sedangkan pembiayaan fisik hendaknya dibiayai dari dana pembantuan.

Saudara Sekalian,

Melalui Rakorteknas Ditjen. Bina Produksi Peternakan ini, saya berharap agar dapat dicapai suatu forum konsultatif dua arah untuk kepentingan dan kelancaran semua kegiatan pembangunan peternakan yang telah direncanakan tahun 2005 ini. Kepada aparat pertanian yang berada di daerah, secara khusus saya berpesan agar sebagai perangkat pemerintah daerah di bidang pertanian senantiasa dapat menjembatani dan memfasilitasi kegiatan pertanian di wilayahnya masing-masing sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Sehingga tidak akan terjadi suatu alokasi yang salah terhadap pembiayaan pembangunan pertanian, yang berakibat pada mahal nya biaya pembangunan pertanian.

Pada saat ini walaupun kasus Avian Influenza telah



menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, namun harus tetap diwaspadai kemungkinan mewabah kembali. Berbagai isu penting terkait dengan dinamika pembangunan peternakan di Indonesia, antara lain tentang penolakan terhadap permintaan dari Malaysia untuk bibit sapi potong, pengurusan populasi ternak besar (sapi potong), ketergantungan bahan pakan (tepung ikan) dan bibit impor, merebaknya wabah Avian Influenza, membanjirnya produk peternakan ilegal di pasaran dll, agar dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menghadapi masa depan pembangunan pertanian di Indonesia.

Saudara Sekalian,

Akhirnya saya ingin mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW yang saya pandang sangat relevan dengan suasana perubahan seperti sekarang ini, yang kira-kira artinya : “Siapa yang keadaannya hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung, Siapa yang keadaannya hari ini sama dengan hari kemarin maka dia termasuk orang yang merugi, dan Siapa yang keadaannya hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia dilaknat Allah SWT”. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut.

Demikianlah sambutan dan harapan saya, semoga bermanfaat dan rumusan dari pertemuan ini dapat lebih meningkatkan kinerja pembangunan sub sektor peternakan, terutama dilandasi oleh ruh Departemen Pertanian yang bersih



dan peduli. Akhirnya dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahhirohmanirohim, Pertemuan Koordinasi Teknis Nasional Peternakan 2005, saya nyatakan dibuka.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Jakarta, 12 Mei 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA NASIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PERTANIAN CIAWI, 16-17 MEI 2005**

Yang terhormat,

Para Peserta Rapat Kerja Nasional Para Undangan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir pada acara Rapat Kerja Nasional Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian ini. Agenda rapat ini merupakan hal yang penting, karena dari pertemuan ini diharapkan dapat dirumuskan dan disepakati langkah-langkah sinkronisasi dan koordinasi antar institusi pusat dan daerah dalam mengimplementasikan hasil-hasil Musyawarah Rencana Pengembangan Pertanian yang baru diselenggarakan minggu lalu.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara optimal sumberdaya pertanian baik sumberdaya fisik maupun sumberdaya manusianya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian. Amanat pembangunan pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi



nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu yang tertuang dalam agenda Revitalisasi Pertanian dengan tujuan antara lain: (1) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, (2) mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, (3) meningkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian, mengembangkan aktifitas ekonomi pedesaan, dan (4) meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil. Untuk pencapaian tujuan tersebut, Departemen Pertanian menuangkannya dalam Rencana Strategis Pembangunan Pertanian dengan Visi Pembangunan Pertanian tahun 2005-2009 yakni “terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani”.

Para hadirin yang saya hormati,

Sektor pertanian diyakini dan terbukti dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional; yang tercermin dari kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB),. penyediaan pangan dan bahan baku industri, devisa, sumber pendapatan dan lapangan kerja sebagian besar masyarakat. Namun demikian, sesungguhnya sektor pertanian dimasa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat dan permasalahan yang semakin banyak; baik masalah dan kendala dari agenda yang belum terselesaikan pada masa



lalu maupun masalah dan tantangan baru berkenaan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis global maupun domestik.

Tantangan dan masalah yang harus segera kita pecahkan bersama-sama antara lain: (1) keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya pertanian, (2) lemahnya sistem alih teknologi dan kurang tepatnya sasaran, (3) terbatasnya akses terhadap layanan usaha utamanya permodalan, (4) panjangnya rantai tata niaga dan belum terciptanya "*fair trading*", (5) rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, (6) lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani, (7) lemahnya koordinasi antara lembaga terkait, serta (8) kebijakan ekonomi makro yang belum berpihak pada petani.

Masalah dan tantangan tersebut di atas dapat kita atasi bila semua pihak yang terkait mempunyai komitmen yang tinggi dengan kepedulian terhadap petani dan pertanian yang tercermin pada program-program yang konkrit, transparan dan akuntabel serta diselenggarakan oleh aparat yang amanah dan profesional. Seiring dengan itu, kita hendaklah selalu in line dengan perubahan paradigma dalam tatanan dan orientasi pemerintahan yang antara lain; dari pemerintahan yang merencanakan sekaligus melaksanakan (*steering and rowing*) menjadi merencanakan dan mengendalikan (*steering rather than rowing*); dari pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik; pengurangan



peran pemerintah secara bertahap dan gradual yang selanjutnya diisi oleh peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan pertanian dan upaya-upaya untuk menghadapi tantangan serta penyelesaian masalah sebagaimana tersebut diatas, maka isu pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian sangat strategis karena SDM pertanian adalah penggerak dan pelaku pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan SDM pertanian sebagai bagian integral dalam pembangunan pertanian haruslah dirancang dengan seksama mengacu pada tujuan pembangunan pertanian.

Sumberdaya manusia pertanian merupakan elemen yang paling krusial untuk dikembangkan. Untuk saudara-saudara ketahui, SDM aparatur (pegawai) Departemen Pertanian berjumlah 19.589 orang pada tahun 2003 yang terdistribusi pada 11 unit kerja Eselon 1 dan unit pelaksana teknisnya. Sebanyak 47% diantaranya berkualifikasi SLTA. Sedangkan dari sekitar 50 juta petani dan buruh tani, 70% diantaranya berpendidikan SD. Secara nasional, sektor pertanian menampung sekitar 45% dari tenaga kerja.

Secara keseluruhan, kualitas sumberdaya manusia



Indonesia yang ditunjukkan oleh Human Development Index dengan variabel antara lain kualitas pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan itu berada pada peringkat 111 dari 174 negara (UNDP, 2003); jauh dibawah peringkat negara tetangga kita Malaysia yang masih dua digit, bahkan kita masih berada di bawah peringkat Vietnam. Dari sisi pendapatan, sekitar 75% penduduk berpenghasilan dibawah garis kemiskinan berada di pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Hadirin yang berbahagia,

Dengan kondisi kualitas sumber daya manusia khususnya pada sektor pertanian sebagaimana saya sebutkan diatas, saya minta seluruh jajaran yang terlibat dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian lebih bekerja keras mensinkronkan gerak langkah dengan mendorong pelibatan masyarakat secara aktif. Operasionalisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian khususnya dalam kaitan dengan program peningkatan kesejahteraan petani diprioritaskan pada pemberdayaan penyuluhan pertanian dan pendampingan petani dalam mengakses kebutuhan berusahatani. Selain itu, program-program pemberdayaan masyarakat lokal khususnya pemberdayaan ekonomi dan sosialnya agar diteruskan baik melalui pendampingan dalam memperkuat kelembagaan petani, mengakses permodalan/kredit mikro dan fasilitas publik lainnya. Program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan wilayah seperti agropolitan agar dipertajam fokus kegiatannya dan pola pembinaannya.



Program pengembangan aparatur agar diarahkan pada peningkatan kualitas yang tidak hanya peningkatan penguasaan ketrampilan, ilmu dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan, tetapi juga peningkatan kualitas moral dan spiritual menuju birokrat yang amanah. Dengan manajemen pemerintahan yang bersih, peduli, dan akuntabel diharapkan tercapainya *good governance* di lingkungan Departemen Pertanian.

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, aman dan negara yang kuat, diperlukan tiga pilar; yaitu *good governance* dan pemerintahan yang legitimate; pengusaha yang baik yakni memiliki moral dan etika bisnis; serta rakyat yang madani, yaitu patuh pada aturan dan taat pada norma. Disini terlihat bahwa kata kunci menuju masyarakat sejahtera dan negara kuat adalah kualitas sumberdaya manusia sebagai entitas terpenting dalam pembangunan.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ciawi, 16 Mei 2005

Menteri Pertanian RI,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**PIDATO MENTERI PERTANIAN PADA ACARA
TEMU MITRA AGRIBISNIS PROPINSI JAWA TIMUR
“MEMBANGUN KOMITMEN UNTUK MAKMUR
BERSAMA BERBASIS AGRIBINIS”**

Surabaya, Mei 2005

- Yth. Gubernur Propinsi Jawa Timur
- Yth. Pejabat Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Jawa Timur;
- Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan; dan Koordinator Forum Makmur Bersama, serta Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati;

Assamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarakatuh;

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat kemudahan kita bersilaturahmi hari ini, dalam upaya memperkuat komitmen bersama membangun agribisnis untuk kesejahteraan bangsa khususnya masyarakat Jawa Timur.

Baru saja kita mendengarkan dengan seksama pemaparan langsung dari Gubernur Jawa Timur tentang keragaan dan kebijakan pembangunan pertanian propinsi Jawa Timur, dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Komite Penanggulangan Kemiskinan tentang strategi nasional untuk menanggulangi kemiskinan, yang kita semua tahu bahwa



sebagian besar masalah kemiskinan dialami oleh masyarakat pedesaan dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian. Yang menarik dan saya garis bawahi juga tersirat komitmen dari Bank Mandiri sebagai bank BUMN terbesar di Republik ini melalui berbagai programnya untuk mendukung percepatan pembangunan usaha kecil dan menengah termasuk didalamnya usaha pertanian.

Mendengar ketiga pemaparan tersebut, saya sebagai Menteri Pertanian merasa lega, setidaknya pada pagi ini, sudah terjalin komitmen bersama untuk menangani berbagai kendala dan tantangan pembangunan pertanian menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Disebutkan tadi bahwa pembangunan pertanian menjadi salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan kebijakan tersebut didukung sepenuhnya oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan, serta sejalan dengan program Bank Mandiri. Komitmen ini harus kita catat sebagai modalitas untuk percepatan pembangunan agribisnis sebagai motor penggerak perekonomian wilayah dan pedesaan. Insya Allah, apabila modalitas ini dikemas dan ditindaklanjuti secara konsisten baik pelaksanaan maupun pengawasannya, akan mampu menepis berbagai pandangan skeptis tentang itikat dan kemampuan kebersamaan kita, untuk membangun sektor pertanian di Indonesia pada umumnya, khususnya propinsi Jawa Timur.



Dengan karakteristik yang dimilikinya, pembangunan pertanian di Indonesia memerlukan sinergitas program lintas sektoral dan lintas instansi. Hal ini berarti, prioritas penanganannya tidak cukup hanya sebatas ruang lingkup Departemen dan Dinas Pertanian serta koordinasi instansi-instansi bidang ekonomi, namun juga harus disinergikan dengan instansi-instansi yang menangani bidang sosial dan kesejahteraan, serta lingkungan. Dan juga dibutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari otoritas keuangan, keamanan serta Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan desa.

Hadirin yang Saya Hormati;

Setelah 60 tahun bangsa ini merdeka, telah banyak aspek pembangunan yang dicapai oleh para penduhulu kita termasuk didalamnya pembangunan di sektor pertanian, namun kita juga tidak bisa menepis bahwa masih banyak dan bahkan semakin banyak dan kompleks permasalahan yang harus kita hadapi dan selesaikan saat ini dan dimasa yang akan datang sejalan dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik. Di sektor hulu, misalnya, masalah-masalah mendasar yang terkait dengan konversi, frakmentasi, status kepemilikan dan degradasi serta tata ruang lahan pertanian memerlukan pemecahan secara tuntas. Hal yang sama juga kita hadapi pada infrastruktur pendukungnya diantaranya, ketersediaan jalan usaha tani dan kualitas jalan desa. Selain itu, sifat alami yang mudah rusak dari produk-produk pertanian, juga menuntut fasilitas transportasi dan fasilitas



pelabuhan yang memadai. Dalam hal ini, manajemen rantai pendingin mulai dari sentra produksi sampai di pelabuhan dan di tangan konsumen akhir, menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan konsumen atas produk pangan yang segar, bermutu, aman dan halal. Pada hari ini juga hadir direktur eksekutif “Cold Chain Project” yang merupakan proyek bantuan hibah untuk peningkatan “*capacity building*” manajemen rantai pendingin di Kawasan Timur Indonesia termasuk didalamnya Jawa Timur. Seperti saya sebutkan tadi, manajemen rantai pendingin ini merupakan salah satu bagian “*critical*” dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing, untuk itu saya mengharapkan proyek ini tidak hanya sekedar “*project just for project*”, tetapi benar-benar mampu menghasilkan contoh konkrit yang bisa direplikasikan di daerah-daerah lainnya.

Amanah penting lainnya yang harus kita tuntaskan adalah lemahnya posisi tawar petani, yang tidak jarang mereka menjadi korban para spekulan yang memanfaatkan berbagai kelemahan petani dan sifat dari produk pertanian yang mudah rusak. Petani semakin terjebak dalam praktek-praktek sistem “ijon”, karena sulitnya mereka akses permodalan. Dalam hal ini, pemerintah bukannya tidak memberikan perhatian pada masalah petani terhadap permodalan. Berbagai kredit program dengan dana trilyunan rupiah telah dikucurkan untuk sektor riil terutama untuk usaha kecil dan menengah, termasuk didalamnya untuk usaha



pertanian yang sebagian besar tergolong usaha mikro, kecil dan menengah. Namun kenyataan di lapangan, apa yang sudah disepakati di tingkat pemegang kebijakan, seringkali tidak sejalan dengan pelaksanaannya di tingkat lapangan. Proses yang rumit dan kurang transparan serta terbatasnya fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan karakteristik perbankan dan pertanian rakyat, menyebabkan pelaksanaan kredit program seringkali tidak tepat sasaran dan menimbulkan biaya tinggi.

Saudara Gubernur; dan Hadirin yang terhormat;

Fenomena yang saya uraikan tadi merupakan fakta empiris yang harus kita selesaikan bersama. Untuk aspek kemitraan, dari laporan yang saya terima, pola-pola kemitraan antara para investor agribisnis dengan masyarakat tani di propinsi Jawa Timur berkembang dengan pes at. Alhamdulillah, hari ini juga kita akan menyaksikan penandatanganan "*nota kesepahaman*" beberapa kemitraan antara eksportir dan industri dengan kelompok-kelompok tani, serta antara kelompok-kelompok tani dengan fasilitator perbankan, yang akan menghantarkan kelompok-kelompok tani dapat akses terhadap perbankan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut secara berkesinambungan. Untuk itu, saya mengharapkan mendapatkan laporan perkembangannya setiap 3 bulan.

Langkah berikutnya yang perlu kita bangun secara simultan, khususnya untuk lebih menjamin kepastian berinvestasi



dan menggalang kepercayaan perbankan di sektor pertanian, seperti yang juga saya ungkapan di beberapa propinsi lainnya, yaitu “road map” agribisnis per komoditas unggulan wilayah maupun nasional. Keberadaan “road map” ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci tentang kondisi agribisnis komoditas unggulan tertentu di wilayah tertentu, mulai dari sub sektor hulu sampai ke hilir, serta informasi tentang dukungan infrastruktur yang tersedia, fasilitas transportasi, telekomunikasi, listrik dan informasi pendukung lainnya, seperti diantaranya informasi kebijakan, proses perijinan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya, yang yang dapat diakses secara mudah dan transparan oleh setiap stakeholder.

Dalam hal ini, disini hadir Direktur Utama Surveyor Indonesia. Sebagai instansi BUMN, PT Surveyor Indonesia tentunya juga membawa misi sebagai “agent of development” yang salah tugas dan keahliannya diantaranya membangun “road map” wilayah.

Diharapkan keahlian tersebut diarahkan untuk membantu propinsi khususnya propinsi Jawa Timur untuk membangun “road map” agribisnis yang “sexy”. Sexy disini dalam arti tidak hanya bagus penampilannya, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan perbankan secara akurat, cepat, dan mudah dioperasikan.



Hadirin yang Saya Hormati;

Langkah-langkah strategis yang saya ungkapkan tadi, tentunya harus diikuti oleh langkah-langkah lainnya yang sering kali bersifat spesifik wilayah. Namun demikian, yang perlu ditekankan disini adalah semuanya itu harus dibangun dengan modalitas tekad komitmen untuk maju bersama secara konsisten. Untuk itu mulai hari ini, marilah kita uji kekuatan modalitas tersebut, di propinsi Jawa Timur.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Forum Makmur Bersama dan Komite Penanggulangan Kemiskinan yang telah bekerjasama dengan Pemerintah propinsi Jawa Timur, memprakarsai Gerakan Membangun pertanian untuk Menuju Kemakmuran Bersama ini. Saya percaya, bahwa pertemuan hari ini yang diantaranya teragendakan penandatanganan kesepakatan kemitraan antar stakeholder termasuk didalamnya para fasilitator perbankan, dan juga kegiatan forum dialog “menggalang investasi agribisnis” di Jawa Timur, tidak hanya selesai hanya sebatas diskusi di hotel ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah komitmen dan konsistensi pelaksanaannya. Untuk itu, saya mendukung adanya usulan untuk dibentuknya Tim monitoring dan pengawasan terpadu tentang pelaksanaan dari komitmen-komitmen yang Insya Allah akan terbangun pada hari ini.

Kepada Saudara Gubernur beserta jajarannya khususnya Kantor Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah memfasilitasi sehingga terselenggaranya kegiatan ini, serta masyarakat Jawa Timur, saya ucapkan selamat dan saya sebagai Menteri Pertanian mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik antara Departemen Pertanian dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan Insya Allah ke depan kita akan terus bersinergi untuk bersama kita membangun dan memperkuat komunitas pertanian demi kemakmuran rakyat.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton apriyantono, MS



**PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN PADA
PERTEMUAN SINKRONISASI KEGIATAN PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN SERTA
PELAYANAN INFORMASI PASAR (PIP) TAHUN 2005
Banten, 18 Mei; 2005**

Yang terhormat,

- Gubernur Propinsi Banten, selaku tuan rumah beserta jajarannya.
- Saudara Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- Saudara Kepala Dinas lingkup Pertanian Propinsi
- Saudara-saudara peserta pertemuan sinkronisasi dari Dinas-Dinas Propinsi seluruh Indonesia serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamuallaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rakhmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tahun 2005. Mengawali sambutan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan refleksi sejenak secara objektif dan jujur menilai apa yang telah kita lakukan dan capai selama ini khususnya pada periode tahun 2001 - 2004.



Dari sana kita bisa melihat banyak yang baik yang sudah kita capai dan pasti banyak pula yang belum sempurna.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya mencatat telah banyak yang dilakukan Ditjen BPPHP bersama Saudara-saudara di daerah di bidang pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Di sisi pengolahan telah ada upaya pengembangan program industrialisasi pertanian di pedesaan; mulai dari perbaikan penanganan pasca panen, peningkatan mutu, revitalisasi dan modernisasi alat dan mesin pengolahan serta penguatan kelembagaan. Namun menyadari terbatasnya wewenang Departemen Pertanian dalam menangani pengolahan hasil pertanian, saat ini sedang dilakukan upaya untuk perluasan wewenang tersebut melalui revisi PP 17 Tahun 1986 sehingga industri primer produk pertanian dapat ditangani secara utuh. Prestasi di bidang pembinaan mutu produk olahan juga telah banyak mulai membuahkan hasil, salah satu diantaranya adalah diperolehnya sertifikat HACCP oleh PT. Mahkota Dewa, perusahaan UKM dibidang obat tradisional. Hal ini perlu dilanjutkan terus sehingga ke depan akan ada mahkota dewa-mahkota dewa lain yang mendapat sertifikat, dan tidak hanya HACCP tapi juga sertifikat ISO, produk organik, produk halal dan semacamnya yang dapat meningkatkan daya saing produk pertanian kita di pasar global. Kita juga saat ini sedang memperjuangkan adanya Jabatan Fungsional pengawas Mutu Hasil Pertanian.



Saya juga sangat menghargai keberhasilan di bidang pemasaran, yang lebih dikenal dengan kebijakan proteksi dan promosi. Salah satu kebijakan proteksi yang dihasilkan dalam melindungi petani kita dan mendapat respon yang cukup baik dari sebagian besar pelaku usaha adalah kebijakan pengendalian impor beras yang kita lakukan bersama dengan Departemen Perdagangan. Melalui upaya pengendalian impor ini saya melihat telah ada gairah perdagangan antar pulau yang pada akhirnya kita harapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Untuk produk hortikultura saya juga mencatat bahwa kita telah melakukan penyesuaian tarif untuk beberapa komoditas tersebut. Selain itu saat ini juga sedang dilakukan upaya penghapusan PPN bagi beberapa produk primer pertanian.

Upaya-upaya promosi yang juga telah banyak dilakukan perlu terus ditingkatkan lagi dalam rangka peningkatan ekspor maupun peningkatan penyerapan pasar dalam negeri. Berbagai bentuk kegiatan promosi perlu ditangani secara lebih selektif sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. Keberhasilan di bidang kerjasama perdagangan bilateral, regional maupun multilateral juga cukup signifikan. Di forum WTO misalnya, Indonesia berperan sebagai koordinator negara produsen pertanian yang tergolong dalam kelompok G-33 untuk memperjuangkan beberapa produk pertanian tertentu seperti beras, jagung, kedelai dan gula agar dapat masuk dalam katagori Special Products (SP) yang tujuannya tidak lain adalah untuk



melindungi petani di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara lainnya dari tekanan-tekanan pasar akibat kebijakan dari negara maju. Upaya lain yang merupakan implementasi dari kebijakan promosi antara lain advokasi terhadap produk minyak sawit di pasar Uni Eropa untuk menangkis isu negatif dampak perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan.

Beberapa kebijakan yang kita lakukan tersebut adalah dalam rangka melindungi petani kita untuk lebih dapat bersaing dalam pemasaran produk pertanian, tetapi tentunya dengan tetap memperhatikan etika dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di forum perdagangan internasional seperti WTO, dan AFTA.

Saudara-saudara sekalian,

Kita melihat bahwa sejalan dengan membudayanya trend gaya hidup sehat (*healthy lifestyle*) dan gaya hidup kembali ke alam (*back to nature lifestyle*), maka permintaan akan pangan organik akan semakin meningkat. Tentu saja ini merupakan business opportunity bagi pertanian Indonesia yang tidak saja meningkatkan pendapatan petani namun sekaligus juga membantu meningkatkan kualitas lingkungan. Karena itu, kita baik yang berada di pusat maupun di daerah perlu memfasilitasi pengembangannya, mulai dari aspek budidaya hingga sertifikasi dan pemasarannya.



Peran sektor pertanian saat ini bahkan dituntut untuk juga dapat berkontribusi secara nyata pada pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini bisa kita lakukan dengan membangun industri bio-diesel untuk pengganti solar dan ethanol untuk campuran premium. Sebagai gambaran, jika 1 % konsumsi solar tahun 2010 bisa dipenuhi dari bio-diesel, maka dibutuhkan 350 juta liter bio-diesel dan untuk memproduksi dibutuhkan 90 ribu hektar kebun sawitkelapa dengan 30 ribu tenaga kerja baru. Demikian juga jika pada tahun 2010 digunakan premium dengan campuran 10% ethanol, maka dibutuhkan sekitar 2 juta kilo liter ethanol dan memproduksi dibutuhkan 200 ribu hektar lahan pertanian singkongjagung yang dikerjakan oleh sekitar 1 juta petani. Jelas bahwa disamping meningkatkan nilai tambah, pengembangan bio-energi juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan sekaligus mengentaskan kemiskinan di pedesaan, serta mampu menghemat cadangan devisa negara.

Saya menyadari bahwa upaya yang telah dilakukan tersebut di atas tentunya tidak dapat memuaskan semua pihak dalam lapisan masyarakat khususnya para pelaku usaha. Namun Saya memastikan bahwa kinerja itu paling tidak telah mengurangi tekanan-tekanan terhadap pemasaran produk pertanian serta dapat meningkatkan daya saing produk pertanian yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu pada kesempatan ini Saya ingin mengingatkan kembali kita semua



untuk memperhatikan tiga isu dalam pembangunan pertanian khususnya yang berkaitan erat dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Pertama, meningkatnya volume impor beberapa komoditas pertanian khususnya buah dan sayuran di pasar lokal. Walaupun secara statistik volume impor tersebut hanya mencapai 5% dari total produksi kita, namun secara kasat mata keadaan ini sangat mengganggu. Yang kita khawatirkan adalah beralihnya selera konsumen buah kita kepada buah impor sehingga lama kelamaan volume impor tadi akan semakin tinggi. Tentunya hal ini sangat merugikan produsen buah kita di dalam negeri. Oleh sebab itu Saya mengajak Saudara-saudara semua untuk sedikit berlari kencang, memikirkan upaya-upaya yang realistis untuk membendung impor tersebut, sambil kita memasyarakatkan kecintaan terhadap produk pertanian nusantara kita. Kedua, ketidakseimbangan supply - demand hasil pertanian di pelosok nusantara ini. Sebagai negara agraris akan sangat ironis bahwa di beberapa daerah harga beberapa komoditas pertanian sangat tinggi, di pihak lain di sentra-sentra produksi harga mencapai titik terendah yang sangat merugikan petani. Kita masih ingat, dua minggu yang lalu bagaimana realitas rendahnya harga cabe merah di sentra produksi Brebes. Padahal kita tahu bahwa semua rakyat Indonesia mengkonsumsi komoditi ini. Saya melihat perlunya kerjasama pemasaran di dalam negeri dengan memaksimalkan sistem perdagangan antar pulau yang kondusif. Ketiga, sulitnya hasil



pertanian Indonesia bersaing di pasar internasional. Kembali lagi saya mengajak Saudara-saudara semua untuk memperhatikan hal ini dan lakukanlah pembinaan mutu dan melakukan upaya-upaya promosi yang efektif dan efisien secara terkoordinasi agar hasil pertanian kita lebih dikenal sehingga mempunyai daya saing di pasar internasional.

Saudara-saudara peserta pertemuan yang saya hormati,

Meskipun berbagai kebijakan telah kita hasilkan, berbagai upaya telah dilakukan, namun demikian perlu juga kita perhatikan bahwa hingga saat ini ekspor produk pertanian harus kita akui masih didominasi produk primer/jentah dan belum beralih ke hasil olahan. Kenyataan ini sungguh bukan semata-mata disebabkan usaha yang kurang maksimal, tapi lebih disebabkan oleh dinamika perkembangan masyarakat dan dunia usaha yang berubah begitu cepat baik pada tingkat lokal maupun global. Untuk itu Saya minta kepada Saudara-saudara sekalian agar bekerja lebih keras lagi dan penuh dedikasi dalam meningkatkan harkat dan martabat petani serta pelaku usaha dalam menghadapi pasar global yang sedang kita jalani saat ini. Saya yakin dengan dedikasi serta perencanaan yang lebih fokus akan mampu memperbaiki kekurangan yang selama ini kita alami. Ini adalah merupakan salah satu tugas mulia yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius untuk kita semua dalam mensejahterakan masyarakat khususnya petani di pedesaan.



Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Sangat kita sadari bahwa membangun pertanian bukanlah pekerjaan mudah, lebih-lebih bila mengingat kenyataan bahwa umumnya pelaku agribisnis di tingkat lapangan adalah petani, peternak dan pekebun dengan skala usaha yang sangat kecil yang secara ekonomis kurang efisien dan memandang usaha pertanian sebagai pilihan terakhir karena ketiadaan pilihan lain. Oleh sebab itu, serangkaian peraturan dan kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha kecil perlu terus menerus kita lakukan dan tentunya memerlukan dukungan peraturan yang lebih operasional di tingkat daerah.

Saat ini peran daerah dalam menentukan keberhasilan sektor pertanian sangat sentral. Pemerintah daerah bukan saja sangat dekat dengan pelaku di lapangan dan tahu persis permasalahannya tetapi sekaligus merupakan pengelola anggaran pembangunan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah daerah seiring dengan demokratisasi yang terjadi saat ini adalah penanggung jawab atas pemenuhan aspirasi masyarakat setempat dan sekaligus bukti kemampuannya memaknai otonomi daerah secara tepat dan benar.

Saya sangat menganjurkan pemerintah daerah untuk sepenuhnya membantu petani dalam memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil usahanya. Pada saatnya nanti pemerintah daerah akan mengembangkan semua mekanisme tersebut



kepada pasar dan pihak swasta, namun bila terjadi gejolak produksi dan harga, serta ada pihak-pihak yang dirugikan karena pasar yang kurang fair, maka sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk mengatasinya. Peran pasar dan swasta yang kita inginkan tidaklah seperti pasar dan swasta yang hanya mementingkan kebebasan (absolut) tetapi juga harus berkeadilan.

Saya juga mengharapkan pemerintah daerah agar lebih serius lagi untuk mengatasi impor ilegal yang sangat merusak pasar dalam negeri. Sangat disadari bahwa konsumen menginginkan harga yang murah tetapi jangan lupa untuk berfikir dalam jangka panjang, impor ilegal itu akan mendistorsi pasar yang tentunya akan merugikan petani dan pelaku usaha dan pada akhirnya akan merusak perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah daerah sangat dianjurkan membentuk dan memperkuat asosiasi petani produsen. Asosiasi petani yang kuat akan merupakan alat kontrol yang efektif bagi aparat nakal yang menyebabkan merebaknya impor ilegal, seperti yang terjadi pada produk daging dan gula pasir.

Saudara-saudara peserta pertemuan yang terhormat,

Saya mendukung dan menyambut baik upaya yang sedang dilakukan oleh Gubernur Banten tentang rencana Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Hasil Pertanian atau "Banten Agroindustrial Park" Tentunya dengan harapan



kawasan industri ini dapat dijadikan sebagai sentra dalam pengembangan industri pertanian serta dapat menjadi pasar dari hasil pertanian untuk memasok bahan baku ke kawasan tersebut. Disamping itu dengan memperhatikan letaknya yang strategis, dekat dengan pelabuhan samudera yang saat ini sedang dibangun, terbentuknya kawasan ini diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian tidak hanya bagi Propinsi Banten saja akan tetapi juga akan menguntungkan petani dan pelaku usaha dari daerah lainnya.

Keberhasilan dalam pengembangan daya saing produk pertanian tidak lepas juga dari kegiatan pelayanan informasi pasar yang secara khusus dibina oleh Ditjen BPPHP. Dari kegiatan ini Saya berharap agar para pelaku usaha pertanian dapat mengakses pasar secara efektif. Informasi yang dibangun juga agar dapat dikembangkan lagi sehingga dapat mengkomodasikan informasi tentang ketersediaan stok, lokasi produsen, peluang investasi, dll.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Dalam periode 5 tahun ke depan saya mengharapkan paling tidak 2 sukses di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Pertama, meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan fasilitasi pemerintah melalui penjaminan terhadap pembiayaan pola syariah. Dalam hal ini yang menjadi tugas utama para pembina di daerah adalah



membina para pelaku usaha agar mampu mengakses modal dari lembaga keuangan yang menangani pembiayaan syariah tersebut; Kedua, pengamanan harga produk pertanian khususnya untuk produk-produk yang sering mengalami fluktuasi harga seperti yang terjadi akhir-akhir ini pada cabe, kubis, vanili, minyak goreng, dsb. Dengan keterbatasan alokasi dana APBN yang dikelola Departemen Pertanian kita harus secara cermat memilih kegiatan-kegiatan yang dapat difasilitasi untuk seoptimal mungkin dapat mensejahterakan petani kita.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Saudara-saudara sekalian marilah kita bekerja lebih fokus dengan perencanaan yang baik serta penuh transparansi dan berpihak kepada kesejahteraan petani. Saya berharap kita dapat mengembangkan kemampuan dan bekerja lebih keras untuk dapat ikut berperan aktif mengatasi persoalan-persoalan.

Para peserta pertemuan yang saya hormati,

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Akhirnya saya berharap para peserta dapat mensinkronkan kegiatan TA. 2005, merumuskan rencana kegiatan TA. 2006 dengan baik dan senantiasa memperoleh petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Amien.



Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrah-manirrahim Rapat Sinkronisasi Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tahun 2005, Saya buka secara resmi.

Sekian dan terima kasih.

Assalamu 'Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian RI,
ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA PADA ACARA
PEMBUKAAN "AGRO & FOOD EXPO 2005"
DI GEDUNG SEMANGGI EXPO KAWASAN BISNIS
TERPADU SUDIRMAN JAKARTA
JAKARTA, 19 MEI 2005**

- Yang Mulia Para Duta Besar atau Perwakilan Negara Sahabat;
- Yang Terhormat Para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
- Yang Terhormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia;
- Peserta Pameran yang saya hormati;
- Saudara Direktur Utama PT. Wahyu Promocitra dan Hadirin yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Pembukaan "Agro & Food Expo 2005" di Gedung Semanggi Expo di Kawasan Bisnis Terpadu Sudirman, Jakarta, ini dalam keadaan sehat wal 'afiat.



Saudara hadirin yang terhormat;

Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam pameran ini “Membangun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertanian Sebagai Upaya Memperecepat Pembangunan Ekonomi Nasional” saya anggap cukup tepat dan relevan dalam kondisi dan tantangan pembangunan pertanian dewasa ini.

Sebagai negara agraris, seharusnya sektor pertanian bisa menjadi lokomotif bagi pencapaian kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi kenyataannya masih jauh dari harapan. Petani yang sebagian besar masih tradisional, kini harus bersaing dengan produk pertanian dari luar negeri. Hal ini diperparah dengan ulah penyelundup yang semakin merajalela sehingga petani semakin terpuruk. Pada musim panen harga hasil pertanian biasanya anjlok, sementara biaya produksi terus meningkat. Hal ini membuat kita semakin prihatin. Oleh karena itu, kita terus bertekad menjadikan pembangunan pertanian menjadi penghela pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk membangun usaha kecil dan menengah (UKM) yang mendukung pertanian. Target pemerintah untuk menumbuhkan 20 juta UKM baru hingga tahun 2020 harus disambut dan ditanggapi positif oleh seluruh pihak terkait. Apabila satu UKM mempekerjakan 5 (lima) orang,



maka akan terse rap 100 juta tenaga kerja. Apabila 30% UKM bergerak di sektor pertanian, maka kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar. Hal ini saya rasa sangat sulit dilakukan oleh perusahaan besar dalam kurun waktu yang sama.

Dalam tahun 2003 perekonomian Indonesia tumbuh 4,1%. Hal yang mengagumkan sekaligus membanggakan adalah 2,4% pertumbuhan tersebut merupakan kontribusi dari aktivitas sektor UKM.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membangun UKM. Dalam tahun 2002 - 2003 sekitar 86% UKM bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, sementara sisanya bergerak di sektor lainnya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bangun UKM kita, tanpa mengesampingkan pengembangan usaha besar.

Saudara-saudara yang terhormat;

Visi Pembangunan Pertanian untuk periode 2004-2009 adalah terwujudnya usaha pertanian yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan pelaku usaha agribisnis. Untuk mewujudkan visi ini, perlu didasari dengan RUH Pembangunan Pertanian, yaitu BERSIH dan PEDULI. BERSIH mencerminkan tata nilai dan cara pandang yang mendasari



seluruh kiprah pelaku pembangunan yang mencintai kebersihan, baik dalam pengertian abstrak maupun konkrit. Sedangkan PEDULI mencerminkan tata nilai dan cara pandang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan petani dan pelaku agribisnis serta lingkungan masyarakat dengan berbagai isu yang berkaitan baik pada tatanan nasional maupun global.

Pendekatan sistem agribisnis saya anggap masih sangat relevan dalam membangun dunia pertanian Indonesia. Sistem agribisnis mencakup seluruh aspek mulai dari sub sistem hulu hingga sub sistem hilir. Sub sistem pemasaran yang merupakan sub sistem hilir mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis, karena siklus produksi dari setiap sub sistem agribisnis akan sangat ditentukan oleh aspek ini. Kegagalan memasarkan produk akan berdampak pada keberlanjutan proses produksi. Oleh karena itu, aspek pemasaran perlu mendapat perhatian yang serius. Salah satu strategi mengembangkan pemasaran adalah melalui promosi, dan salah satu bentuknya adalah pameran.

Untuk itu pameran semacam ini patut didukung dan terus didorong agar dapat dilaksanakan secara profesional, karena dengan event ini, produk Indonesia, khususnya produk pertanian, akan dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.



Saudara hadirin yang saya hormati;

Era perdagangan bebas sudah semakin dekat, bahkan untuk tingkat ASEAN, AFTA, kita sudah memulainya sejak awal tahun 2002 ini. Untuk dapat berperan dan bersaing dalam era tersebut, kita harus secara terus menerus meningkatkan daya saing, terutama dalam hal mutu dan harga, disamping harus secara aktif mempromosikan produk kita. Persaingan pemasaran produk antar negara akan semakin ketal. Oleh karena itu kita harus berani melakukan promosi produk pertanian ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang potensial tetapi belum banyak mengenal produk pertanian Indonesia, tanpa mengurangi perhatian terhadap potensi pasar dalam negeri. Dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta, Indonesia sudah pasti menjadi sasaran pasar yang diincar oleh banyak negara. Potensi pasar domestik yang begitu besar, harus dimanfaatkan dengan baik.

Saudara-saudara yang terhormat;

Dalam situasi yang belum pulih benar dari terpaan krisis ekonomi sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, saya sangat berharap dan yakin sektor pertanian akan semakin memberikan kontribusi maksimal dan menjadi penghela pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan harapan tersebut, dituntut adanya prasyarat yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh-kembangnya dan masuknya investasi ke sektor



pertanian, yaitu iklim usaha yang kondusif terutama kepastian hukum dan jaminan keamanan usaha. Penciptaan kondisi seperti ini merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya mengupayakan kondisi yang aman dan nyaman, sehingga dunia usaha dapat menjalankan usahanya secara optimal dan nyaman.

Saudara hadirin yang saya hormati;

Saya mendapat laporan bahwa dalam rangkaian “Agro & Food Expo 2005” ini akan diselenggarakan forum Temu Bisnis “Buyers meet Sellers” pada tanggal 20 dan 21 Mei 2005. Forum ini sangat bermanfaat dan penting sebagai tindak lanjut dari pameran atau promosi ini. Karena dalam forum temu bisnis tersebut masing-masing pihak, “penjual” dan “pembeli” dapat secara langsung saling bertukar informasi dalam upaya membangun dan mengembangkan jaringan serta kerjasama bisnis. Maka dari itu, saya sangat berharap agar forum temu bisnis itu dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan meluncurkan LAURICA produk minyak kelapa mumi dan PURESSO puree buah yang dihasilkan oleh model percontohan pengolahan yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian dengan mitra kerja sama koperasi dan petani. Saya berharap peluncuran produk ini dapat memacu



pengembangan teknologi pengolahan di tengah-tengah petani.

Hadirin yang terhormat;

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dengan harapan agar kegiatan promosi produk-produk pertanian kita dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam pengembangan produk pertanian dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku agribisnis terutama para produsen/petani.

Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pameran ini, khususnya kepada PT. Wahyu Promocitra yang telah sukses menyelenggarakan "Agro & Food Expo 2005" lima tahun berturut-turut. Demikian juga kepada para peserta pameran yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan acara ini. Saya berharap promosi seperti "Agro & Food Expo 2005" ini dapat dikembangkan sebagai pameran "berkelas internasional" dengan agenda tahunan yang tetap.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti pameran mudah-mudahan upaya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan agribisnis dan upaya pemulihan ekonomi Indonesia.



Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanni"ahim saya
nyatakan "Agro & Food Expo 2005" dibuka.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Mei 2005

Menteri Pertanian,

ttd

Dr.Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA
MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI OBAT HEWAN
INDONESIA (ASOHI) YANG KE-V
JAKARTA, 20 MEI 2005**

Yang terhormat:

- Sdr. Pjs. Ketua Umum ASOHI
- Sdr. Para Pengurus dan Anggota ASOHI Serta Hadirin
Sekalian yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke-Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul daJam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri acara pembukaan MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI OBAT HEWAN INDONESIA (ASOHI) YANG KE-V dengan tema USAHA OBAT HEWAN YANG PROFESIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB pada pagi hari ini.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada, Pengurus ASOHI atas Undangan yang telah diberikan kepada saya dan memberikan pengarahan pada MUNAS kali ini. Pertemuan ini saya pandang sangat penting, karena dalam pertemuan ini akan dibahas persoalan-persoalan yang dihadapi



oleh organisasi selama ini dan secara bersama-sama bermusyawarah untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Selain itu tentunya diharapkan dalam Munas ini menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis bagi perjalanan Asosiasi ke depan yang lebih profesional sehingga mampu memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan Pembangunan Peternakan di Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati

Sebagaimana diketahui bahwa obat hewan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan hewan, yang pada gilirannya akan tersedia ternak yang sehat dan memberikan produksi yang maksimal sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam peningkatan ketersediaan pangan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan bangsa. Mengingat hal tersebut, dalam rangka keamanan pangan maka semua obat hewan yang akan diedarkan didalam wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan Nomor Pendaftaran dan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran semua obat hewan yang akan diedarkan harus memenuhi persyaratan pengujian mutu obat hewan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996.

Hadirin sekalian yang saya hormati

Kumpulan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2005



Kebijakan di bidang obat hewan secara umum ditetapkan terutama dalam rangka pengawasan dan penertiban peredaran obat hewan. Sinergisme antara Pemerintah cq Departemen Pertanian dengan ASOHI selalu ditumbuh kembangkan melalui mekanisme yang ada selama ini yaitu dengan melibatkan ASOHI dalam setiap penyusunan peraturan perundangan khususnya dibidang obat hewan agar ketentuan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dalam menilai suatu perkembangan teknologi dibidang obat hewan, kebijakan yang ditempuh akan selalu berhati-hati terhadap penemuan inovasi baru seperti halnya sediaan rekayasa genetika sehingga kita tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan izin peredaran obat hewan karena selain harus memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah juga diperlukan data-data empirik dalam menentukan apakah suatu produk obat hewan tersebut memang telah memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanan baik bagi hewan target, manusia dan lingkungan disekitarnya.

Pemerintah akan bertindak tegas terhadap adanya penyimpangan baik administratif maupun teknis serta penyimpangan yang menjurus kepada tindak pidana terhadap ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan ditegakkan antara lain berupa pencabutan izin usaha,



pemusnahan obat hewan ilegal serta membawa pelaku usaha ilegal ke depan pengadilan.

Saudara-saudara sekalian,

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekspor obat hewan yang pada Tahun 2004 mencapai 191 juta US\$ dengan kenaikan sebesar 9 % dari tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor sampai tahun 2004 sebanyak 59 negara yang berasal dari kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Diharapkan kedepan realisasi ekspor obat hewan selalu meningkat dalam rangka meningkatkan perolehan devisa negara dari sektor pertanian dalam hal ini subsektor peternakan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati

Dalam pertemuan Munas Anggota ASOHI kali ini diharapkan kiranya saudara-saudara para anggota ASOHI khususnya dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena MUNAS adalah lembaga tertinggi dalam suatu organisasi untuk pemilihan pengurus baru periode lima tahun kedepan yang Amanah dan professional untuk tercapainya visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara khusus kami, Pemerintah cq. Departemen Pertanian menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja sama yang sangat erat selama ini dengan ASOHI



sebagai mitra pemerintah di bidang usaha obat hewan yang selalu memberikan sumbangan positif.

Kepada pengurus yang baru nanti agar tetap menjaga adanya peningkatan pembinaan para anggotanya yang lebih optimal. Kami juga mengucapkan selamat mengikuti MUNAS pada hari ini semoga Allah SWT selalu menyertai dan membimbing kita semua. Dengan ucapan “Bismillahirrahmanirrahim” acara MUNAS ASOHI ke-V pada hari ini saya buka secara resmi. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 20 Mei 2005

Menteri Pertanian R.I.

ttd

DR. Ir. Anton Apriyantono,MS



**KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN PADA
REMBUG ILMIAH PEMBANGUNAN PERTANIAN
PROPINSI JAMBI HIMPUNAN
ALUMNI IPB DAERAH JAMBI
Jambi, 28 Mei 2005**

Yang terhormat:

- Saudara Gubernur Propinsi Jambi
- Saudara pengurus DPD Himpunan Alumm IPS Jambi
- Saudara peserta Rembug Ilmiah dan hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Sebagai insan yang beriman, mengawali pertemuan ini perkenankanlah saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni IPS Daerah Jambi ini. Sebagai suatu komunitas intelektual sudah sewajarnya bahkan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memberikan kontribusi pemikiran yang terbaik bagi daerah ini. Lebih-lebih ditengah-tengah situasi bangsa yang masih belum pulih benar dari krisis multidimensi. Kontribusi pemikiran melalui Rembug Ilmiah ini akan memberikan berbagai alternatif solusi yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya dalam melaksanakan pembangunan pertanian.



Karenanya, saya menyambut baik diselenggarakannya Rembug Ilmiah ini, sekaligus memberikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif yang diambil oleh pengurus DPD Himpunan Alumni IPS untuk menyelenggarakannya.

Saudara-saudara peserta pertemuan yang terhormat,

Sebagai kegiatan yang menggunakan pendekatan ilmiah maka rembug ini harus mampu menelusuri kembali kerangka teoritis pembangunan pertanian dan pengalaman empiris yang telah dilakukan oleh banyak daerah dan banyak negara lain di dunia. Model-model pembangunan yang telah diterapkan akan memberikan pengayaan akan model pembangunan pertanian Jambi yang hendak dirumuskan. Walaupun berbagai teori yang tersedia tidak selalu applicable untuk kasus Indonesia apalagi Jambi, namun landasan teoritis itu akan sangat membantu meletakkan duduk permasalahan pembangunan pertanian Jambi yang sebenarnya dan kemana arah yang hendak dituju.

Untuk memudahkan rembug ini mencapai sasarannya, saya cenderung mengajak peserta rembug untuk berangkat dari kondisi riil sektor pertanian Propinsi Jambi dan tantangan yang dihadapinya. Kondisi riil ini akan menjadi pijakan dasar untuk merumuskan kebijakan dan program apa yang harus ditempuh. Kondisi riil ini hanya bisa didapat apabila seluruh stake holders yang ada terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan



pembangunan pertanian. Tidak kalah pentingnya adalah mempelajari karakteristik alamiah sumberdaya alam yang dimiliki Propinsi Jambi yang merupakan kekhasan yang merupakan anugrah Allah SWT.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Sebagai daerah yang sangat kaya akan sumberdaya alam, Propinsi Jambi saya yakini tidak akan salah dalam memilih prioritas pembangunannya. Walaupun pembangunan pertanian bukanlah usaha yang quick yielding seperti sektor perdagangan dan jasa tapi yakinilah bahwa pembangunan pertanian yang tepat akan memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di Propinsi Jambi. Prioritas yang tepat pada pembangunan pertanian akan berarti memberikan kesejahteraan pada rakyat banyak. Bukankah 60% lebih rakyat Jambi menggantungkan hidupnya padasektor pertanian. Rendahnya kontribusi sektor pertanian pada pembangunan tidak berarti rendahnya peran sektor pertanian. Penilaian hanya sekedar pada kontribusi dalam PDRB sama sekali tidak objektif dan fair karena tidak menilai perannya pada penyediaan pangan rakyat, lapangan kerja dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan.

Adalah wajar sebagai sektor primer, sektor pertanian bukanlah tempatnya nilai tambah diperoleh secara luar biasa, karena kalau nilai tambah dan margin terlalu tinggi pada sektor



primer maka dapat dipastikan harga jual pada level konsumen untuk produk segar akan tidak terjangkau, akibatnya rakyat banyak yang akan menanggung beban. Karena itu, industri yang mengolah hasil pertanian menjadi prioritas selanjutnya. Industri pengolahan hasil pertanian akan membantu menarik sektor hulu dan mendorong sektor hilirnya.

Saudara-saudara peserta pertemuan yang terhormat,

Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan cetak biru “Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan”. Pemerintah menyadari bahwa sektor pertanian harus digerakkan menjadi sektor andalan. Dasar pemikiran itu, tidak saja disebabkan oleh besarnya rakyat yang berada dan bergantung kehidupannya pada sektor pertanian tetapi memiliki argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Pertama : negara-negara maju di dunia ini adalah negara-negara yang sangat maju sektor pertaniannya dan hampir semuanya mulai membangun sektor pertaniannya terlebih dahulu baru ke sektor lainnya. Tidak kalah penting untuk diketahui saat ini pasar produk pertanian adalah pasar negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Kedua; sektor pertanian adalah sektor yang tahan krisis dan mampu pulih dengan segera, hal ini telah terbukti berulang kali dan terakhir pada saat krisis ekonomi yang lalu. Ketiga: sektor pertanian adalah sektor yang memiliki spektrum keterkaitan yang sangat luas terhadap sektor lainnya.



Pembangunan sektor pertanian dalam kerangka pembangunan nasional yang dirancang melalui “revitalisasi pertanian dan pedesaan” yang dijabarkan dengan 7 upaya yaitu: (1) pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan; (2) pelaksanaan reforma agraria (3) peningkatan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan permodalan; (4) peningkatan produktivitas dan kualitas petani dan pertanian; (5) pengembangan diversifikasi aktifitas ekonomi pedesaan; (6) pengembangan industrialisasi pedesaan; dan (7) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani.

Cetak biru revitalisasi pertanian tentunya akan sangat baik dan semakin memiliki bobot yang tinggi apabila hasil rem bug ini dapat dijadikan masukan bagi penyempumaannya. Untuk itu, saya menunggu hasil rem bug ini dengan sangat antusias. Bagaimanapun karakteristik dan kearifan lokal harus tercermin dalam pelaksanaan revitalisasi pertanian tersebut.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam mengawali kegiatan Rembug Ilmiah ini. Apa yang saya sampaikan hendaknya dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk seluruh peserta. Akhirnya saya menyampaikan selamat melaksanakan rembug dan semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan meridhoi pertemuan ini.



Sebagai sesama alumni IPB saya juga menyampaikan salam dari rekan-rekan yang lain, sekaligus mengucapkan selamat bekerja dan berprestasi kepada HA-IPB Jambi serta mengajak kepada kepada seluruh negeri.

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 27 Mei 2005

Menteri Pertanian

ttd

Dr.Ir.Anton Apriyantono, MS.



**KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN RI
PADA SEMILOKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
KAKAO SE SUMATERA DI BUKIT TINGGI,
TANGGAL, 3 -4 JUNI 2005**

- Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan
- Jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat;
- Sdr. Walikota Bukit Tinggi dan Jajaran
- Pemerintah Kota Bukit Tinggi
- Sdr. Para Kepala Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Pengurus Asosiasi Kakao Indonesia, Pusat dan Daerah Kota Bukit Tinggi
- Sdr. Para tokoh petani kakao, para undangan serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena berkat ridho dan Karunia-Nya, pada pagi yang berbahagia ini kita semua dapat hadir dan bersilaturahmi dalam rangka mengikuti Senailoka Pengembangan Perkebunan Kakao Rakyat se Sumatera. Semoga dalam pertemuan dua hari ini, kita semua yang hadir disini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan pertanian maupun pembangunan perkebunan baik di Sumatera dan tentunya juga di negara kita tercinta Indonesia.



Saya merasa bergembira dan terkesan menerima undangan untuk menghadiri senailoka ini. Biasanya inisiatif penyelenggaraan senailoka yang membicarakan pertanian atau perkebunan rakyat datang dari pihak pemerintah, namun kali ini datang dari suatu Lembaga swasta yaitu Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) yang merupakan tempat berhimpunnya para Pengusaha Ekspor Kakao maupun para Pengusaha Industri Coklat. Saya sangat menghargai ASKINDO yang hari ini mengambil prakarsa menyelenggarakan semiloka untuk membicarakan tentang pengembangan kakao rakyat yang ruang kegiatannya berada di onfarm. Artinya, bahwa para pengusaha perdagangan dan industri kakao di Indonesia, tidak hanya sibuk dengan persoalannya sendiri, namun masih juga peduli untuk memikirkan mengenai pengembangan produksi kakao yang berada dalam bidang tugas pemerintah maupun para petani produsen. Lebih dari itu, saya juga terkesan, karena dalam Semiloka ini kita akan membicarakan bersama mengenai pengembangan kakao khususnya di Sumatera. Semua pihak tahu, bahwa selama ini bila kita berbicara tentang kakao maka pikiran kita pasti tertuju kepada daerah Sulawesi. Saya dapat menangkap prakarsa tersebut bahwa pengembangan kakao di Sumatera akan dipakai sebagai suatu saran alternatif, dalam mempertahankan keberadaan kakao di Indonesia. Untuk itu saya berharap, semoga perhatian dan keterlibatan para pengurus ASKINDO ini tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan semiloka ini saja, namun akan terus berlanjut pada pelaksanaan



kegiatan nyata yang dapat membantu para Produsen kakao yang pada umumnya adalah para petani kecil.

Adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pihak yang terlibat dalam perkakaoan Indonesia, untuk ikut memikirkan keberlanjutan dari usahatani kakao saat ini. Kita ketahui bersama bahwa kakao Indonesia yang sebagian besar dihasilkan oleh Propinsi Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara, saat ini sedang terancam keberadaannya oleh hama Penggerek Buah Kakao (PBK). Dampak dari serangan itu begitu besar sehingga mampu menumunkan produksi kakao antara 30% - 80%, dan menumunkan mutu biji kakao. Tentunya sudah dapat kita perkirakan bahwa dampak lebih lanjutnya adalah menurunnyanya pendapatan petani dan terganggunya kinerja ekspor kakao Indonesia maupun pasokan bahan baku industri coklat dalam negeri.

Oleh sebab itu saya menilai bahwa momentum penyelenggaraan semiloka ini sangat tepat., dimana saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan produktivitas komoditi pertanian, dan bak ggyung bersambut ASKINDO menawarkan suatu alternatif pengembangan kakao di daerah yang relatif baru yaitu Sumatera, sebagai daerah dengan kondisi agroklimat maupun lahan yang cukup mendukung. Atas segala prakarsa tersebut, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara yang tergabung dalam ASKINDO.



Hadirin sekalian yang saya hormati,

Sebelum saya melanjutkan pembicaraan mengenai kakao Indonesia, iijinkan saya terlebih dahulu memaparkan tentang kebijakan pembangunan pertanian kedepan. Sebab, berbicara tentang pengembangan komoditas pertanian tertentu tanpa memahami dahulu mengenai kebijakan pembangunan pertanian secara keseluruhan, dikhawatirkan akan menimbulkan pemahaman yang bias.

Telah kita ketahui bersama bahwa Pembangunan Pertanian merupakan bagian dari pembangunan Ekonomi Nasional. Terdapat tiga prioritas perhatian dalam Pembangunan Ekonomi Nasional kita yaitu (1).Pertumbuhan ekonomi, (2). Perluasan kesempatan kerja dan (3). Pengentasan kemiskinan. Dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Nasional tersebut sektor pertanian mendapat tugas/peran sebagai berikut: (1).Memperkokoh ketahanan pangan, (2) Menyediakan bahan baku industri, (3) Membuka kesempatan kerja dan pendapatan, (4).Mengentaskan kemiskinan, (5) Meningkatkan penerimaan devisa bagi negara dan (6) Memacu pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada peran tersebut dan memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional serta menghadapi berbagai tantangan, maka kita telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian periode tahun 2005-2009, yaitu: Terwujudnya pertanian tangguh untuk

pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Guna mewujudkan visi tersebut, Departemen Pertanian telah menetapkan tiga kelompok sasaran utama pembangunan pertanian yaitu; (1) Meningkatkan ketahanan pangan nasional (2). Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (3). Meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam upaya mewujudkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tersebut kita akan mencapainya melalui (1). peningkatan mutu produk primer pertanian, (2). peningkatan keragaman pengolahan produk pertanian, (3). peningkatan ekspor dan (4). peningkatan surplus perdagangan komoditas pertanian.

Saudara saudara peserta semiloka yang saya hormati,

Sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi nasional, dan peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional, bahwa komoditi kakao seperti juga komoditi perkebunan lainnya adalah merupakan bagian dari sektor pertanian yang mempunyai potensi dapat mewujudkan sasaran pembangunan pertanian. Kakao Indonesia yang total arealnya pada tahun 2004 mencapai 917 dbu hektar, sebagian besar (801.000 hektar) atau 87 % diusahakan oleh rakyat kecil. Komoditi ini merupakan komoditi yang tepat untuk berperan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Peran kakao

selain sebagai sumber penerimaan devisa negara, juga merupakan sumber pendapatan utama dan sumber lapangan kerja bagi 1,7 juta keluarga petani yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Disisi lain peluang kakao Indonesia masih terbuka lebar di pasar dunia atau dengan perkataan lain bahwa potensi untuk menggunakan industri kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan masih terbuka lebar. Lebih dari itu, kakao Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi antara lain dari aroma yang kuat dan kadar kekerasan cocoa butter-nya yang tidak dimiliki oleh kakao negara lain, sehingga menjadi salah satu nilai plus yang perlu dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai tawar yang lebih tinggi. Selain itu, Indonesia juga mempunyai kemampuan mengembangkan produksi kakao lebih besar lagi dengan pertimbangan bahwa disamping memiliki agroklimat yang sesuai, Indonesia masih memiliki lahan yang luas, tenaga kerja yang berlimpah, sumberdaya tanaman kakao yang cukup beragam, bahkan untuk pengembangan kakao organik yang prospek demand-nya cukup tinggi, kita mampu memenuhinya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memanfaatkan peluang tersebut, agribisnis kakao Indonesia masih menghadapi berbagai masalah internal yang klasik, yang belum mampu kita eliminasi semuanya antara lain masalah



produktivitas kebun yang rendah, masalah serangan hama PBK, masalah biji kakao unfermented, masalah pengenaan PPN pada perdagangan biji kakao di dalam negeri, masalah *automatic detention dan discounted price* pada perdagangan luar negeri. Disamping itu bahwa perkakaoan Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan dari luar antara lain makin berkembangnya komoditas substitusi, adanya penerapan hambatan tarif berupa diskriminasi bea masuk di negara negara konsumen (Cina, Malaysia) dan hambatan non tarif seperti isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta tuntutan mutu hasil yang terkait dengan keamanan pangan dan kesehatan (*sanitary and phytosanitary*).

Saudara saudara peserta semiloka yang saya hormati,

Secara tradisi, komoditas kakao merupakan komoditas perdagangan internasional yang banyak dihasilkan oleh negara-negara disepanjang katulistiwa yang beriklim tropis seperti Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya. Kakao di Indonesia yang pengembangannya relative baru dibanding dengan negara tetangga Malaysia, dalam hal luasan dan produksi kita sudah mampu menduduki peringkat ketiga dunia setelah Negara Ivory Coast dan Ghana. Namun sangat disayangkan selama kurun waktu tersebut meskipun kita telah mampu mengembangkan luasan kakao secara pesat, dan mampu menjadikan negara kita sebagai negara eksportir biji kakao nomor tiga dunia, namun ternyata kita belum mampu menjadi



Tuan dirumah sendiri, karena kita belum mampu menjadikan Indonesia sebagai negara produsen coklat.

Nilai tambah yang tinggi yang diperoleh dari pengolahan biji kakao menjadi suatu produk coklat, selama ini justru dimanfaatkan dan dinikmati oleh negara lain. Bahkan yang cukup memprihatinkan adanya kenyataan bahwa industri coklat yang telah dibangun didalam negeri Selama ini, satu persatu menghentikan produksinya dengan alasan tidak bisa memperoleh bahan baku dari dalam negeri maupun harga yang dibayarkan jauh lebih tinggi dibanding dengan harga biji kakao yang diekspor. Alasan yang terakhir ini menurut yang saya ketahui karena untuk perdagangan dalam negeri biji kakao justru dikenakan PPN sedangkan untuk perdagangan ekspor dibebaskan dari PPN. Dari 16 industri coklat yang dibangun, menurut laporan saat ini tinggal sekitar 5 unit yang masih beroperasi, itupun tidak dalam kapasitas penuh (full capacity).

Hal lain yang juga memprihatinkan kita semua adalah adanya automatic detention terhadap biji kakao Indonesia yang diekspor ke Amerika. Dampak yang kita terima adalah adanya pemotongan harga hingga mencapai US \$ 200 per metric ton untuk biaya penanganan lebih lanjut mutu biji kakao yang jelek di Negara Importir. Upaya penghapusan automatic detention sudah berjalan cukup lama yaitu sekitar 12 tahun namun sampai hari ini belum menampakkan hasilnya. Menurut pandangan saya



persoalan ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipecahkan bila kita semua yang terlibat dalam perka~~k~~aoan Indonesia, termasuk didalamnya para eksportir, sepakat unt~~u~~ntuk memperbaiki mutu biji kakao yang diekspor. Dengan cara men~~e~~gekspor biji kakao yang bersih dari bahan ikutan lainnya dan mel~~e~~aksanakan pengawasan mutu dipelabuhan secara ketat, maka pihak Amerika sudah berjanji akan menghapus kebijakan aut~~o~~matic detention tersebut.

Pengenaan PPN 10 % atas prod~~u~~duk primer pertanian, yang penyerahannya bukan oleh petani dan kelompok tani nampaknya telah mendistorsi tataniaga biji kakao di dalam negeri. Dampak yang dirasakan adalah makin deras~~n~~ya arus ekspor biji kakao ke luar negeri, serta tersendatnya sup~~llai kakao ke industri dalam negeri.. Berkenaan dengan hal ini saya telah menyampaikan saran kepada Menteri Keuangan agar dapat mempertimbangkan kembali pengetrapan kebijakan ter~~e~~sebut. Pada saat ini sudah ada berita baik bahwa PPN ini a~~k~~an dihilangkan, tinggal menunggu peraturan formalnya saja.~~

Disisi lain ada suatu wacana dari pemerintah melalui Departemen Keuangan yang akan mengetrapkan Pungutan Ekspor (PE) terhadap setiap prod~~u~~duk biji kakao yang diekspor. Terhadap masalah ini saya pun sudah menyampaikan pandangan kepada Menteri Keuangan, agar wacana pengetrapan PE terhadap prod~~u~~duk biji kakao yang diekspor hams benar-benar dipertimbangkan dari semua segi. Bahwa PE yang akan



diterapkan tersebut benar-benar diyakini tidak berakibat menambah beban cost ditingkat petani, disamping itu besaran tarif PE perlu diperhitungkan dengan cermat sehingga tidak sangat mengganggu terhadap kinerja ekspor biji kakao selama ini, dan begitu pula sesuai dengan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahwa dari hasil pungutan ekspor tersebut sebagian dapat dimanfaatkan untuk perkembangan dan perbaikan komoditi bersangkutan. Akan tetapi, apabila PPN sudah dihilangkan maka sebetulnya PE sudah tidak diperlukan lagi, bahkan dapat merugikan petani jika PE diterapkan.

Satu hal lagi yang cukup penting untuk saya paparkan disini adalah perlakuan yang tidak adil negara-negara pengimpor produk kakao olahan terhadap pengenaan tarif bea masuk. Produk olahan kakao dari negara tertentu dikenakan tarif masuk yang lebih rendah, sedangkan produk kakao olahan yang sama dari Indonesia dikenakan tarif yang lebih tinggi. Perlakuan yang demikian ini yang membuat produk olahan kita tak mampu bersaing di pasar luar negeri.

Hadirin yang saya hormati

Dengan gambaran permasalahan dan tantangan perkakaoan yang saya kemukakan tadi, saya ingin mengajak para stakeholders yang berada diruangan ini untuk bersama-sama mendapatkan pemecahan agar perkakaoan kita dapat tetap berjaya di pasar Internasional. Wacana untuk memacu



pengembangan kakao di Sumatera yang akan dibicarakan dalam semiloka ini juga merupakan salah satu masukan dalam pemecahan yang dimaksud. Namun ada satu hal yang penting yang perlu dibangun dalam perkakaoan Indonesia yaitu tumbuhnya tekad bersama dalam memperbaiki mutu kakao yang kita miliki. Karena perbaikan mutu kakao ini tidak saja berpengaruh pada perbaikan harga yang diterima petani produsen, namun lebih jauh dari itu adalah menjaga dan memperbaiki citra perkakaoan Indonesia di pasar dunia. Saya sependapat dengan pandangan dari berbagai pihak dalam upaya memperbaiki mutu kakao Indonesia agar menjadi produk olahan yang berdaya saing tinggi yaitu dengan penerapan wajib SNI yang didalamnya mengandung kewajiban eksportir untuk mengirim atau memasarkan biji kakao ke luamegeri hanya biji yang bersih dan bermutu. Biji yang bersih dan bermutu dapat diperoleh dari penanganan pasca panen melalui fermentasi biji, disamping pengawasan mutu secara ketat di pintu pelabuhan ekspor.

Lebih lanjut, kita perlu terus memperjuangkan perlakuan yang sama dengan negara pengeksport lainnya dalam hal pungutan tarif bea masuk di negara pengimpor dan kita perlu menghimbau kepada Menteri Keuangan agar meninjau kembali tarif bea masuk yang sangat rendah atas produk kakao olahan yang masuk ke Indonesia. Kebijakan dimaksud diperhitungkan akan mampu membangkitkan industri perkakaoan nasional kita.



Hadirin, peserta semiloka yang saya hormati :

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya berharap Semiloka ini dapat berjalan dengan sukses dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan petani, pelaku usaha kakao Indonesia, dan tentunya bagi Negara Indonesia yang kita cintai bersama. Dengan mengucapkan Bismillaahiramannirahiim, Semiloka Pengembangan Perkebunan Kakao Rakyat se Sumatera, dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Billahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukit Tinggi, 3 Juni 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA PKS EXPO 2005
Bengkulu, 5 Juni 2005**

Yang terhormat:

- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bengkulu,
- Anggota Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia,
- Serta undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi kekuatan, kesehatan, rahmat dan hidayahNya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal afiat untuk mengikuti Kegiatan PKS Expo 2005 dan Deklarasi Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNI.) Cabang Bengkulu.

Pembangunan sektor pertanian dewasa ini, telah mencatat berbagai kemajuan, sebagai gambaran selama tahun 2004 produksi lima komoditas utama tanaman pangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan; yaitu produksi padi naik 4,23%, jagung naik 4,30%, kedelai naik 8,78%, ubi kayu naik 5,3%, kacang tanah naik 6,18% dibanding tahun sebelumnya.



Khusus produksi padi tahun 2004 menurut Ramalan III, mencapai 54,3 juta ton dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 53 juta ton. Keberhasilan ini terutama disebabkan iklim yang baik yang didukung oleh kebijakan pemerintah antara lain melalui program peningkatan pengembangan tanaman pangan dan pemberlakuan kebijakan impor beras, yang dilarang selama sebulan sebelum panen, selama panen hingga dua bulan sesudah panen raya. Kemudian kebijakan ini diperpanjang sampai Juni 2005.

Peningkatan juga terjadi pada produksi hortikultura yg terdiri atas buah-buahan, biofarmaka, tanaman hias dan sayuran yang masing-masing tercatat meningkat 6%; 5,2%; 3,9% dan 1,64%. Untuk produksi perkebunan juga mengalami kenaikan. Tanaman perkebunan tahunan naik 4,2% dan tanaman perkebunan semusim naik 20,6%. Demikian pula halnya populasi ternak menunjukkan peningkatan antara 0,75% - 6,80%. Produksi daging naik 3,21%; susu naik 7,75% dan telur naik 7,99%.

Dari aspek pengembangan teknologi kita juga telah mengalami kemajuan yang cukup berarti, dengan dihasilkannya inovasi teknologi baru antara lain: 1) peta sumberdaya lahan dan teknologi untuk mendukung diversifikasi pemanfaatan sumberdaya pertanian, 2) teknologi antisipasi anomali iklim 3) penciptaan varietas/klon bibit unggul dan hibrida tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, 4) rekayasa teknik



budidaya komoditas rendah input, teknik produksi komoditas organik dan ramah lingkungan, 5) teknik pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil komoditas pertanian, 6) rekayasa berbagai organik yang mencakup pra dan pasca panen.

Para Petani, Nelayan dan hadirin yang berbahagia

Dalam upaya mendukung salah satu *triple track strategy* Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu yaitu revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan rakyat dari kemiskinan; maka Departemen Pertanian meluncurkan tiga program utama yaitu: (1) Peningkatan ketahanan pangan, (2) Pengembangan agribisnis; dan (3) Peningkatan kesejahteraan petani.

Program peningkatan ketahanan pangan merupakan fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Ketahanan pangan rumah tangga berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk akses terhadap pasar pangan. Sejalan dengan itu peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan faktor kunci yang menjadi fokus program ini.

Program pengembangan agribisnis diarahkan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien dalam menghasilkan berbagai produk-produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang baik di pasar



domestik maupun pasar internasional.

Untuk program peningkatan kesejahteraan petani bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan petani dan peningkatan akses petani terhadap sumberdaya usaha pertanian. Melalui program ini diharapkan kemampuan petani untuk mengelola usaha dan meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya lahan, air, alat mesin pertanian, permodalan, teknologi dan informasi pasar.

Ketiga program di atas diharapkan dapat mewujudkan tumbuh kembangnya usaha pertanian di perdesaan, industri hulu, hilir dan penunjangnya dan memberi kontribusi devisa melalui pengembangan sumberdaya secara optimal sesuai dengan arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian yang kita harapkan.

Para Petani Nelayan serta Undangan yang berbahagia

Dalam kaitannya dengan berbagai uraian yang saya sebutkan tadi, tentunya perhimpunan petani nelayan sejahtera Indonesia (PPNSI) bersama anggotanya mempunyai peran yang strategis, terutama dalam memanfaatkan peluang-peluang yang masih terbuka untuk mengembangkan usaha tani dan nelayannya kearah yang lebih profesional: sehingga nilai tambah dan daya saing menjadi lebih kompetitif dan pada gilirannya dapat membawa petani serta nelayan anggota PPNSI seluruh Indonesia



khususnya cabang Bengkulu akan lebih sejahtera.

Sehubungan dengan itu Departemen Pertanian akan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya memfasilitasi petani yang sampai dengan Mei 2005 tercatat berjumlah 25.192.292 kepala keluarga tani (KK tani) dan didalamnya termasuk 270.540 kepala keluarga tani Provinsi Bengkulu. Fasilitas ini berupa penguatan akses terhadap permodalan melalui model yang telah dikenal masyarakat tani yaitu bagi hasil (Bank Syariah). Khusus penguatan akses petani kepada sumber-sumber teknologi akan diaktifkan kembali penyuluh pertanian' dalam mensukseskan program pembangunan pertanian sebagai tindak lanjut instruksi Presiden terhadap Menteri Pertanian saat melakukan wawancara jarak jauh dengan petani di Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2005 yang lalu.

Para Petani dan Nelayan serta hadirin yang berbahagia

Kehadiran wakil-wakil petani dan nelayan selaku anggota PPNSI cabang Bengkulu pada Acara PKS Expo 2005 yang pada kesempatan hari ini akan mendeklarasikan keberadaannya serta membentuk jaringan pengusaha muslim di Provinsi Bengkulu dapat merupakan momen yang sangat baik untuk secara bersama memperkaya program-program Revitalisasi Pertanian. Selanjutnya saya berharap agar anggota PPNSI dapat mengemban manfaat sebesar-besarnya untuk, mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia kedepan.



Akhirnya dengan mengucapkan: Bismillahirrohmanirrohim dengan ini saya nyatakan PKS EXPO 2005, secara resmi dibuka.

Wabillahitautaufig wal hidayah

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bengkulu, 5 Juni 2005

Menteri Pertanian RI

Ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA ACARA
REMBUG PARIPURNA KTNA NASIONAL
SURABAYA, 6 JUNI 2005**

Yang terhormat:

- Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, atau yang mewakili
- Sdr. Gubernur Jawa Timur,
- Sdr. Ketua Umum KTNA Nasional
- Peserta Rembug Paripurna KTNA Nasional,
- Undangan dan hadirin yang berbahagia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah swr atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir pada acara Rembug Paripurna KTNA ini. Agenda Rembug ini merupakan hal yang penting, karena Rembug Paripurna KTNA Nasional adalah wahana bagi para petani-nelayan Indonesia untuk melakukan konsolidasi organisasi dan pengembangan diri sekaligus membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pertanian saat ini.

Saya juga menilai tema Rembug Paripurna ini sangat tepat yaitu "Peningkatan Nilai Tukar Produksi Para Petani-Nelayan Melalui KTNA Untuk Meningkatkan Pendapatan dan



Kesejahteraan” karena tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan pertanian yang sedang kita laksanakan yaitu “Terwujudnya Pertanian Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan pangan, Peningkatan Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Pertanian Serta Peningkatan Kesejahteraan Petani”.

Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam program kerjanya telah mencanangkan apa yang beliau sebut triple strategy, yaitu pro growth, pro employment, dan pro poor, pro growth dilakukan dengan cara mendorong laju investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5%. pro employment untuk mendorong terciptanya lapangan kerja bagi jutaan pengangguran di Indonesia. Dan pro poor dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan melaksanakan Revitalisasi Pertanian di pedesaan. Dengan semangat revitalisasi pertanian, tahun 2005-2009 pertanian diharapkan menjadi pendorong dan penggerak perekonomian nasional, karena kita yakini bahwa sektor pertanianlah yang mampu memberikan lapangan kerja dan berusaha terutama bagi penduduk di pedesaan untuk mengurangi pengangguran; dapat meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu melalui revitalisasi pertanian, kita harapkan dapat meningkatkan perolehan devisa melalui peningkatan daya saing produk pertanian; secara berkelanjutan meningkatkan ketahanan pangan dimana setiap rumah tangga mampu mengakses ketersediaan pangan, serta mendorong



pembangunan ekonomi daerah dalam rangka otonomi daerah dan melestarikan lingkungan hidup.

Saudara-saudara peserta Rembug Paripurna yang saya hormati,

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut memang tidaklah mudah, karena sebagian permasalahan pertanian “problem solver”nya berada pada kewenangan instansi lain. Mulai dari permasalahan dukungan kebijakan makro, kebutuhan sarana produksi hingga masalah pemasaran tidak sepenuhnya dapat diselesaikan sendiri oleh Menteri Pertanian. Oleh sebab itu, upaya meyakinkan penentu kebijakan sektor pendukung termasuk DPR -RI secara terus-menerus saya perjuangkan.

Perlu kita sadari bahwa persoalan-persoalan pertanian merupakan masalah klasik yang sejak dari pemerintahan yang lalu belum mampu diselesaikan. Hal ini masih terus memerlukan perjuangan yang lebih keras dari upaya sebelumnya, peranan organisasi pertanian khususnya KTNA saya harapkan meningkatkan semangat perjuangannya untuk bahu-membahu bersama kami. Saya menilai KTNA mempunyai peranan strategis dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Mengingat bahwa kemampuan pemerintah tersebut maka beberapa masalah pertanian hendaknya diperjuangkan oleh



masyarakat petani sendiri, peran pemerintah dalam paradigma baru adalah regulator; fasilitator dan dinamisator pembangunan. Oleh karenanya, peran KTNA ke depan diharapkan dapat menjadi lembaga yang mandiri, yang dapat hidup tidak hanya tergantung pada program-program pemerintah, tetapi hendaknya dapat membuat program-program bersama dan partner pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian untuk mendukung upaya keberhasilan mewujudkan revitalisasi pertanian seperti tersebut di atas.

Para Hadirin yang saya hormati,

Tanggal 16 Mei 2005 yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan Menteri Pertanian untuk mengaktifkan kembali peran penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani. Pemerintah melihat bahwa peranan penyuluh sangat strategis. Lumpuhnya penyuluhan pertanian di lapangan sangat dirasakan masyarakat petani. Bahkan karena keterbatasannya temyata otonomi daerah belum mampu menjalankan sistem penyuluhan yang sudah ada. Dalam rangka itu, sudah saatnya intervensi pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat petani melaksanakan revitalisasi penyuluhan pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Departemen Pertanian, baik yang bersifat penataan legislasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun program-program yang dirancang. mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa.

Dalam rangka itu pada kesempatan ini saya meminta dukungan KTNA melalui tindakan nyata untuk berperan serta dan proaktif dalam kegiatan penyuluh swakarsa di lapangan. Melalui penyuluhan pertanian, petani diberdayakan menjadi subyek atau pelaku dalam pengembangan pertanian; yang pada gilirannya dapat ditingkatkan menjadi manusia yang mandiri dan sejahtera.

Hadirin yang saya hormati,

Selain masalah pertanian, masih banyak masalah mendesak yang kita hadapi dalam melaksanakan pembangunan pertanian antara lain:

1. Rata-rata pemilihan lahan pertanian yang sempit, memerlukan konsolidasi manajemen lahan petani agar mencapai skala yang dikelola oleh kelompok gabungan kelompok tani atas dasar bagi hasil.
2. Mencegah alih fungsi lahan produktif kepenggunaan di luar pertanian (setiap tahun terjadi alih fungsi rata-rata 80.000 Ha lahan produktif pertanian).
3. Adanya distribusi pupuk yang tidak tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga di berbagai daerah.
4. Kesulitan petani untuk memperoleh akses pada sumber-sumber permodalan karena persyaratan perbankan yang relatif sulit.
5. Rusaknya sebagian jaringan irigasi sehingga kurang mendukung pola tanam yang diterapkan petani.



6. Masalah pemasaran, yang mengakibatkan harga jatuh pada saat musim panen.
7. Serta masalah-masalah lokal lainnya.

Semua masalah tersebut memang tidak dapat kita selesaikan sekaligus dalam jangka pendek. Oleh sebab itu, pemerintah secara sistematis sudah memiliki konsep strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut pada hari rabu yang lalu, dimana semua konsep tersebut telah kita bicarakan dengan DPR-RI, dan Dewan yang terhormat telah sepakat dan memberikan komitmen dukungan untuk memperjuangkan, antara lain masalah subsidi pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, dana penjaminan kredit, masalah hama penyakit, masalah penyuluhan serta kebijakan-kebijakan yang lain. Sekali lagi, saya mengharapkan dukungan KTNA untuk bersinergi mengimplementasikan program-Rrogram ini nantinya.

Akhirnya, agar terjadi percepatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan revitalisasi pertanian maka saya mengharapkan Saudara-saudara para tokoh KTNA seluruh Indonesia kiranya dapat menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi diri, menggerakkan rasa memiliki, menata organisasi, merumuskan program serta organisasi kepengurusan dengan penuh kebersamaan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga petani-nelayan di seluruh tanah air.



Akhirul kata, saya ucapkan selamat mengikuti Rembug Paripurna ini, semoga Allah SWT meridhoi semua upaya kita.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 6 Juni 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI. PADA ACARA
PENCANANGAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN
DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
MELALUI BAGI HASIL (SISTEM SYARIAH)
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
KALIMANTAN SELATAN PADA HARI RABU,
TANGGAL, 15 JUNI 2005**

Yang saya hormati:

- Gubernur Kalimantan Selatan,
- Bupati Hulu Sungai Selatan
- Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
- Anggota Muspida Kab. Hulu Sungai Selatan
- Direksi BRI, BPD dan Bank Penyalur lainnya.
- Para pejabat dan instansi terkait.
- Para Pengusaha, Petani, Peternakan, serta Undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka "Pencanangan Program Pengembangan Usaha Pertanian dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Bagi Hasil (Sistem Syariah) Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Saya menilai program yang dicanangkan ini adalah program penting yang dapat mendorong pembangunan ekonomi pedesaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani pada umumnya dan para peternak khususnya.

Saudara-saudara sekalian,

Program pembangunan Indonesia yang menitikberatkan pada pembangunan pertanian sampai saat ini secara keseluruhan telah menunjukkan hasil-hasil yang nyata dilihat antara lain dari pertumbuhan PDB, penyediaan kesempatan kerja, perkembangan produksi, peningkatan ekspor dan pemantapan ketahanan pangan. Hal ini tentunya menjadi tantangan Departemen Pertanian bagaimana secara mikro program pembangunan pertanian dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dilain pihak secara makro dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, membantu dalam penyediaan kesempatan kerja, dan membantu dalam perolehan devisa negara.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian tersebut, Departemen Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) program utama yaitu : (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Peningkatan Ketahanan Pangan khususnya dalam



pengembangan peternakan maka telah ditempuh 4 (em pat) strategi pengembangan yakni: (1) Pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan komoditas unggulan yang berbasis lahan (*livestock land used system*), kesesuaian agroekosistem, agroklimat dan sosio-budaya masyarakat, (2) optimalisasi pemanfaatan, pengamanan dan perlindungan sumberdaya local yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pendapatan petani dan ramah lingkungan, (3) pengembangan kelembagaan peternak baik itu dalam bentuk kelompok peternak, Gabungan kelompok tani maupun Koperasi dan (4) pengembangan usaha agribisnis di suatu kawasan melalui pola kemitraan inti plasma yang kesemuanya untuk mendukung keberhasilan upaya pengembangan peternakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak.

Saudara-saudara sekalian,

Namun demikian, pembangunan pertanian khususnya sub-sektor peternakan masih dihadapkan kepada sejumlah kendala dan masalah yang harus segera dipecahkan antara lain: (1) Masalah berjangkitnya penyakit hewan menular A.I: Flu burung, (2) masih rendahnya produksi dan produktivitas ternak, (3) keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan, (4) kualitas, mentalitas, dan keterampilan sumberdaya petani rendah, (5) kelembagaan dan posisi tawar petani yang rendah, (6) usaha peternakan rakyat belum berskala ekonomis, (7) lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan



birokrasi, dan (8) kebijakan makro ekonomi yang belum berpihak kepada petani.

Disamping permasalahan diatas, pembangunan peternakan juga dihadapkan kepada pada tantangan yang paling mendesak untuk segera ditangani, yaitu: (1) Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kenaikan produksi hasil peternakan, (2) rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk peternakan yang mengakibatkan rendahnya gizi masyarakat akan protein hewani, (3) optimalisasi pemanfaatan sumber daya ternak local yang berkelanjutan, (4) peningkatan importasi produk peternakan dan status kehalalannya, (5) besarnya impor bahan baku pakan ternak, (6) pengaturan tata ruang untuk kawasan peternakan baik secara nasional maupun wilayah, (7) penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, (8) globalisasi perdagangan dan investasi.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Untuk mencapai sasaran besar diatas, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah : (1) mengembangkan kawasan usaha dan skala usaha peternakan yang ekonomis, (2) meningkatkan SOM peternakan yang berkualitas, (3) menyediakan sarana pendukung dan kebutuhan infrastruktur, (4) mewujudkan sistem inovasi pertanian yang tepat, (5) mewujudkan sistem pembiayaan usaha yang menguntungkan petani ternak, (6) mewujudkan kelembagaan petani yang kokoh, (7)

menyediakan sistem insentif dan perlindungan bagi petani ternak, (8) mewujudkan kawasan pengembangan ternak unggulan, (9) menerapkan praktek peternakan yang baik (Good Farming Practice), (10) mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.

Saya menilai program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sang at tepat dan strategi sebagai antisipasi terhadap permasalahan dan tantangan yang ada dengan mencanangkan 4 (empat) program aksi yakni: (1) Peresmian operasional Bank BPD Syariah dalam rangka menunjang kebutuhan permodalan para petani, (2) Pengembangan ternak ayam Bukan Ras (Bu-Ras) Super melalui pola bagi hasil Syariah, (3) program optimalisasi lahan petani yang luas kepemilikannya <0.5 ha/KK, (4) pembangunan Kawasan Usaha Peternakan yang akan dilengkapi fasilitas yang dapat menunjang pengembangan usaha ternak sapi dan kambing.

Dengan program aksi ini tentunya merupakan peluang bagi masyarakat petani untuk mengembangkan usahanya, memperoleh kesempatan kerja, peningkatan produksi dan produktivitas ternak yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam rangka mempercepat pembangunan pertanian



pada umumnya dan pengembangan peternakan pada khususnya, kesediaan pembiayaan (modal) merupakan salah satu akselerator bagi keberhasilan pengembangan usaha peternakan. Namun demikian, dengan semakin terbatasnya dana yang bersumber dari pemerintah sebagai akibat krisis ekonomi pada waktu yang lalu maka perlu dicarikan alternatif sumber pembiayaan yang lain baik yang berasal dari lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan.

Salah satu sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan yang terjangkau dengan suku bunga murah adalah skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP). KKP telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan akan berakhir pada tahun 2007, secara kumulatif penyaluran KKP sub-sektor Peternakan dengan bunga 10%/tahun sangat menggembirakan dengan realisasi mencapai Rp. 272,4 milyar atau 96,5 % dari plafon sebesar Rp. 282,3 milyar. Khusus Propinsi Kalimantan Selatan, realisasinya sebesar Rp. 1,9 milyar atau 78,3% dari plafon Rp. 2,5 milyar.

Dapat saya kemukakan disini bahwa kinerja KKP ini cukup menggembirakan terutama dari aspek Non-Performing Loan (NPL) atau tunggakan kreditnya yang relatif kecil yaitu 0,08% utk KKP tebu, 5,84% untuk KKP Peternakan dan 6,68% untuk KKP Tanaman Pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa petani mulai menyadari bahwa kredit adalah kepercayaan dan utang



harus dikembalikan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu kendala utama para petani untuk mendapatkan kredit perbankan adalah ketidak mampuan petani menyediakan agunan/jaminan kredit.

Untuk itu terhitung sejak TA. 2005 ini Departemen Pertanian akan mengupayakan Dana Penjaminan Kredit melalui APBN untuk mendukung penyaluran kredit usaha tani. Dana penjaminan kredit ini pada TA. 2006 rencananya akan dialokasikan sebesar Rp 400 milyar.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dapat saya sampaikan disini bahwa saya sangat menghargai upaya pemerintah daerah Kab. Hulu Sungai Selatan yang telah mendirikan BPD Syariah yang akan ikut mendukung "Program yang telah dicanangkan oleh Pemda Kab. Hulu Sungai Selatan". Saya mengharapkan peran BPD Syariah dan Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus dikembangkan sehingga dapat mencakup kegiatan usaha yang lebih luas yang pada akhirnya dapat membantu para petani khususnya dibidang permodalan.



Di era otonomi daerah dimana penekanan dan tanggung jawab pembangunan berada di daerah, maka peranan dan wewenang dari Saudara Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas yang membidangi peternakan sangat besar di dalam menentukan wama dan arah bagi keberhasilan pencapaian pembangunan tersebut.

Saya berharap banyak kepada Saudara Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas serta para anggota DPRD dan pihak swasta daerah, agar dapat menggerakkan dan mendorong aparat instansi terkait bersama stake holder hulu dan hilir melakukan Program Aksi untuk menunjang keberhasilan pembangunan peternakan dalam konteks otonomi yang sudah berada ditangan Saudara. Sementara itu, Pemerintah Pusat berusaha menciptakan kebijakan makro usaha peternakan yang kondusif dan berpihak kepada petani seperti kebijakan penyediaan modal/kredit, pengamanan harga dan bea masuk komoditi peternakan.

Hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya Bupati Hulu Sungai Selatan beserta jajarannya yang telah melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam rangka peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat petani.



Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati usaha kita semua. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian RI,
ttd
Dr. Ir. Anton Apriyantono MS.



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA PADA ACARA PERESMIAN DAN
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS CABE MERAH
BERBASIS PENELITIAN DI KABUPATEN SRAGEN
Sabtu, 18 Juni 2005**

Yang saya hormati;

- Bupati Kabupaten Sragen
- Rektor Institut Pertanian Bogor
- Pejabat Eselon I dan II, Lingkup Departemen Pertanian
Pejabat Pemda Provinsi Jawa Tengah
- Para undangan dan hadirin yang berbahagia

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wahaarakhatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat Ramat dan Karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti acara "Peresmian Dan Pengembangan Agribisnis Cabe Merah Berbasis Penelitian di Kabupaten Sragen" ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, komoditas cabe merah merupakan sayuran yang diperlukan oleh ibu-ibu rumah tangga setiap hari, dan umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar. Penintaan akan cabe merah ini relatif stabil sepanjang tahun dengan konsumsi perkapita 0,37 kg/bln atau 4,44 kg/thn. Dengan tingkat konsumsi tersebut, cukup memenuhi kebutuhan pasar



segar diperlukan areal tanam seluas 60.000-70.000 ha/thn atau sekitar 6.000-7.000 ha/bln. Untuk pulau Jawa saja diperlukan areal tanam sekitar 5.000 ha dengan produksi sekitar 45.000 - 50.000 ton/bln. Cabe merah ini umumnya dihasilkan oleh sentra produksi di pulau Jawa yang mensuplai sekitar 65-75% produksi cabe merah nasional.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Meskipun kebutuhan cabe merah secara nasional dapat kita penuhi dari produksi dalam negeri, akibat pola tanam/pola produksi yang musiman ketersediaannya tidak merata sepanjang tahun. Pada musim tanam utama (in-season) petani umumnya menanam cabe merah pada areal yang cukup luas dan seringkali melebihi permintaan sehingga produksi melimpah dan menyebabkan penurunan harga. Namun pada saat diluar musim (off-season) areal tanam lebih terbatas yang mengakibatkan produksi berkurang dibandingkan permintaan dan harga menjadi tinggi sehingga memberatkan konsumen. Kondisi yang tidak menguntungkan petani ini perlu diatasi sehingga agribisnis cabe merah dapat berlangsung normal dan berkesinambungan.

Untuk mengantisipasi ketersediaan cabe merah yang merata sepanjang tahun dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi cabe merah berdasarkan keseimbangan "supply-demand". Selama 3 tahun terakhir ini telah dilakukan pemantauan dan



pengaturan pola produksi secara bulanan, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian yang ada di daerah sentra produksi. Setiap 3 bulan sekali dilakukan sinkronisasi rencana luas tanam dan produksi untuk melihat perkembangan areal tanam bulanan dan produksi. Sinkronisasi areal tanam dan produksi ini masih terbatas dilakukan untuk sentra-sentra produksi di pulau Jawa dan selanjutnya akan dikembangkan untuk sentra-sentra produksi seluruh Indonesia.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pengembangan agribisnis cabe merah menuntut dipenuhinya berbagai persyaratan teknis agar produksi atau pasokan dapat merata sepanjang tahun dengan mutu yang optimal. Pengembangannya harus dicirikan dengan penerapan pola tanam dan produksi yang tepat, penggunaan benih bermutu, pemupukan yang sesuai anjuran, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan hama terpadu (PHT) serta pengelolaan tanaman lainnya yang mengikuti teknologi baku sesuai dengan Good Agriculture Practices (GAP) dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

Saya sangat mendukung adanya kerjasama antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan PT. HEINZ ABC di kabupaten Sragen ini, yang saya harapkan dapat terus dikembangkan dan hasilnya disebarluaskan kepada para petani. Dengan cara ini petani dapat meningkatkan produksi dan mutu cabe merah yang



mereka hasilkan sesuai dengan standar yang diinginkan pasar. Kepada IPB saya harapkan dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini untuk dapat diterapkan petani, baik petani koperator maupun petani lainnya. Departemen Pertanian sepenuhnya mendukung kerjasama ini, dan akan menyebarluaskannya kepada pelaku agribisnis cabe merah di luar kabupaten Sragen. Untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran, berbagai teknologi maju yang mendorong peningkatan produksi dan mutu hendaknya dapat terus dikembangkan. Saya berharap agar IPB sebagai salah satu sumber inovasi teknologi dapat mendukung penyediaan teknologi ini sehingga cabe merah yang diproduksi oleh petani kita dapat bersaing di pasaran.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Disamping terus meningkatkan produksi cabe merah dalam bentuk segar kita perlu pula merintis pengembangan industri pengolahannya. Kepada PT. HEINZ ABC saya mengharapkan dukungan untuk dapat memfasilitasi pengembangan industri pengolahan cabe merah di Indonesia, sebagaimana telah dikembangkan oleh beberapa negara lain seperti Pakistan, India, Thailand dan Sri Lanka. Dengan tumbuhnya industri pengolahan cabe merah ini saya berharap produk cabe merah tidak hanya dimanfaatkan oleh konsumen dalam bentuk segar, tetapi juga oleh industri pengolahan hasil sehingga jumlah produksi cabe merah yang dapat diserap akan lebih banyak lagi.



Kepada Institut Pertanian Bogor dan PT. HEINZABC saya mengharapkan adanya masukan-masukan yang dapat meningkatkan produksi dan mutu cabe merah temtama untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan cabe merah. Saya berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi kerjasama yang saling menguntungkan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah menyediakan lokasi dan mendukung terlaksananya kerjasama ini.

Saudara hadirin yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini semoga menjadi amal bakti kita untuk memperoleh ridlo Allah SWT.

Sekian,

**Wabillahittaufiq walhidayah, wassalamu 'alaikum
warahmatullahi wabarakhatuh.**

Jakarta, 18 Juni2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono,MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA PADA
UPACARA HARI KRIDA PERTANIAN KE 33 TH 2005
JAKARTA, 21 JUNI 2005**

Yang terhormat:

- o Saudara-saudara wakil petani seluruh Indonesia yang saya banggakan
- o Segenap anggota masyarakat pertanian yang saya hormati
- o Hadirin undangan yang berbahagia

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini seluruh masyarakat pertanian dapat memperingati Hari Krida Pertanian ke 33 dalam keadaan sehat wal'afiat, penuh semangat dan optimisme yang tinggi menyongsong masa depan yang lebih baik.

Sejak tahun 1973 setiap tahun kita memperingati Hari Krida Pertanian yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Bagi masyarakat pertanian, Hari Krida Pertanian mengandung makna dan hari penting. Dengan memperingati Hari Krida Pertanian kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai usaha pertanian. Kita pantas berbesar



hati atas prestasi yang kita capai sebagai jerih payah yang dilaksanakan seluruh masyarakat pertanian khususnya para petani bagi negara dan bangsa ini.

Saudara-saudara yang saya hormati

Ditengah-tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih benar, kita patut bergembira walau belum merasa puas bahwa sektor pertanian mampu menunjukan prestasinya selama ini.

Pembangunan pertanian yang selama ini telah kita laksanakan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta seluruh masyarakat. Melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, diharapkan terciptanya ketahanan pangan yang kuat, sebagai modal dasar mewujudkan ketahanan nasional dan ketahanan bangsa yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ketahanan pangan sampai dengan saat ini masih tetap menjadi isu strategis.

Bapak dan Ibu-Ibu serta Hadirin Yang Terhormat,

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa membutuhkan penyediaan pangan yang sangat besar, Departemen Pertanian dengan masyarakat pertanian mempunyai komitmen yang sangat kuat terhadap penyediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan sekaligus menempatkan



pertanian sebagai salah satu sumber devisa negara dan penyedia lapangan kerja terutama di daerah pedesaan. Walaupun sangat disadari bahwa amanah tersebut dirasakan semakin berat bagi masyarakat pertanian karena berbagai tantangan internal maupun eksternal yang semakin kuat, namun kita tidak boleh menyerah dan pesimis. Justru tingginya kesadaran kita dan berbagai kalangan akan besarnya tantangan yang dihadapi sector pertanian ke depan, merupakan modal dasar yang harus kita jadikan perekat untuk bersatu dan menggalang kebersamaan dengan semua pihak untuk bersama mencari berbagai terobosan melalui inovasi teknologi, rekayasa kelembagaan, sosial, dan kebijakan. Langkah awal untuk terbangunnya sinergitas yang kuat tersebut, telah dilakukan diantaranya dicanangkannya revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005 yang lalu.

Kejadian tersebut di atas, merupakan momentum strategis yang harus kita tangkap dan dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan, strategi serta program operasional pembangunan pertanian saat ini dan ke depan. Dalam hal ini, indikator keberhasilan pembangunan pertanian ke depan diantaranya adalah :

1. Pertanian menjadi kekuatan perekonomian nasional
2. Terciptanya lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan
3. Meningkatnya kesejahteraan semua pelaku yang terlibat di



sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah

4. Menurunnya jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dan sentra-sentra produksi. Indikator keberhasilan tersebut akan dicapai diantaranya melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usahatani dan pedesaan, penetapan tata ruang pertanian, perbaikan system distribusi sarana dan hasil produksi, peningkatan produktivitas melalui peningkatan produksi, mutu produk dan nilai tambah, serta penurunan tingkat kehilangan pasca panen; dan penguatan kapasitas infrastruktur pendukung seperti diantaranya kelembagaan penyuluhan, penelitian dan perkarantinaan. Sedangkan di lingkungan internal Departemen Pertanian, akan terus ditumbuhkan sikap professional dan “entrepreneur beaurocrates” pada seluruh jajaran Departemen Pertanian. Efisiensi kerja akan terus ditingkatkan melalui penerapan administrasi moderen. Sementara pada aspek pengawasan, untuk menumbuhkan budaya bersih guna meminimalkan terjadinya praktek-praktek suap, korupsi, kolusi dan nepotisme baik di lingkungan Inspektorat Jenderal sendiri maupun di lingkungan Departemen Pertanian secara keseluruhan, maka efektifitas tindak pengawasan akan dimaksimalkan. Apabila masih ditemukan praktek-praktek tersebut di atas di lingkungan Departemen Pertanian, silahkan lapor langsung kepada saya. SMS maupun e-mail saya terbuka



24 jam. Namun yang perlu saya ingatkan “hindarilah” fitnah. Karena sesungguhnya fitnah itu akan menebarkan mala petaka pada si “pemfitnah” itu sendiri.

Langkah-langkah strategis tersebut, akan berhasil secara optimal apabila mendapatkan dukungan maksimal baik dari seluruh jajaran Departemen Pertanian dan UPT-UPT di daerah maupun dari sektor terkait lainnya, swasta, dan masyarakat pertanian secara keseluruhan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan koordinasi, sosialisasi, promosi dan provokasi dalam rangka untuk menggalang dukungan tersebut akan semakin diintensifkan.

Saudara - Saudara yang saya hormati,

Dengan menggalang kebersamaan diantara berbagai komponen bangsa, maka kemampuan dan kekuatan yang kita miliki akan semakin besar dan terarah dalam melaksanakan program dan strategi Revitalisasi Pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan daya saing produk pertanian serta menjaga kelestarian sumber daya pertanian.

Untuk itu marilah kita jadikan Peringatan Hari Krida Pertanian tahun ini juga sebagai momentum penggalangan kebersamaan tersebut. Walaupun dalam penyelenggaraannya relatif jauh lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun saya yakin nuansa kesederhanaan ini tidak



akan mengurangi makna peringatan Hari Krida Pertanian tersebut sebagai hari bersyukur dan mawas diri, untuk bersatu kita menuju ke kehidupan yang lebih baik.

Peringatan ini akan tetap menjadi wahana bagi segenap masyarakat pertanian untuk merayakan dan mensyukuri berbagai keberhasilan yang telah diraih, serta saya mengajak seluruh lapisan masyarakat pertanian untuk menyatukan tekad serta bekerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

Hadirin dan Bapak Bapak -Ibu Ibu Sekalian,

Hari Krida Pertanian juga merupakan hari penghargaan bagi insan pertanian yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasinya dalam pembangunan pertanian. Penghargaan diberikan terhadap hasil cipta, karsa dan karya untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu pada hari ini pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada 134 PNS di lingkungan Departemen Pertanian. Tanda kehormatan ini di anugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada nusa dan bangsa khususnya dalam pembangunan pertanian. Para penerima tanda kehormatan ini dapat dijadikan sebagai teladan bagi karyawan lainnya dan masyarakat.



Saya berharap pemberian tanda kehormatan ini akan meningkatkan motivasi dan memacu prestasi saudara-saudara di masa mendatang. Untuk itu saya mengucapkan “selamat” kepada pegawai yang hari ini menerima penghargaan.

Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekeja keras bersama-sama untuk membangun pertanian kita.

Saudara-saudara yang terhormat,

Mengakhiri sambutan saya pada kesempatan ini saya mengajak hadirin sekalian untuk berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita.

Kita menyadari bahwa tugas-tugas yang kita hadapi akan semakin be rat dan kompleks, namun dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, mudah-mudahan kita akan dapat mewujudkan cita-cita yang ingin kita raih yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan daya saing produk pertanian serta menjaga kelestarian sumber daya pertanian.

Akhirnya kepada segenap masyarakat pertanian di seluruh Indonesia saya sampaikan ucapan “Selamat Hari Krida



Pertanian ke 33 Dirgahayu Krida Pertanian” .

Sekian dan terima kasih

**Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Menteri Pertanian
ttd
DR. Ir. Anton Apriyantono MS.



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PENCANANGAN TANAM JAGUNG**

(Desa Kramat, Kecamatan Air Buaya,
Kabupaten Buru, Maluku)

Tanggal 25 Juni 2005

Yang Terhormat,

- Saudara Gubernur Propinsi Maluku
- Saudara Ketua DPRD Propinsi Maluku
- Saudara para pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Maluku dan kabupaten Buru serta instansi terkait lainnya;
- Saudara yang mewakili assosiasi, organisasi profesi serta hadirin yang berbahagia

Assalaamu'alikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya karena saat ini, saya dapat bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian khususnya para petani, segenap aparat terkait beserta para pengusaha dan anggota Asosiasi dan koperasi dalam acara pencanangan Tanam Jagung di Desa Kramat, Dusun Air Buaya, Kabupaten Buru yang merupakan prakarsa dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan agribisnis jagung di Maluku ini.



Jagung merupakan salah satu bahan baku industri pakan ternak yang paling banyak dibutuhkan. Perkembangan produksi jagung di Indonesia lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari keberhasilan Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman pangan (PROKSI MANTAP) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi di era otonomi daerah yang mampu mengakomodir perencanaan dari bawah serta melibatkan stake holder.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui perbaikan teknologi di tingkat petani, penggantian varietas jagung lokal ke jagung komposit atau dari jagung komposit ke jagung hibrida. Kalau pada tahun 2000 penggunaan benih hibrida baru berkisar 10 % dari areal tanam, maka pada tahun 2004 penggunaan hibrida sudah mencapai kurang lebih 31%. Melihat trend perkembangan ini, saya yakin penggunaan jagung hibrida akan semakin luas mengingat produktivitasnya yang cukup tinggi akan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan para petani jagung.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada tahun 2004 berdasarkan angka tetap (ATAP) BPS, produksi jagung telah mencapai 11,2 juta ton, bila dibandingkan dengan produksi tahun 2003 (ATAP 2003) sebesar 10,8 juta ton mengalami peningkatan sebesar 3,7 %. Pada tahun 2005 ini



saya yakin akan terjadi lagi kenaikan produksi jagung mengingat semakkin banyak para stake holder yang berminat untuk mengembangkan agribisnis jagung di Indonesia. Angka Ramalan I BPS tahun 2005 produksi jagung diperkirakan mencapai 11, 495 juta ton. Melihat perkembangan agribisnis jagung yang terus berkembang, saya optimis sasaran kita tahun 2005 sebesar 12 juta ton akan tercapai.

Swasembada jagung harus kita upayakan dalam waktu dekat ini, mengingat kebutuhan jagung dunia yang semakin meningkat, belum mampu diimbangi oleh peningkatan produksinya. Data terakhir menunjukkan kebutuhan jagung dunia sebesar 647.356 juta ton, sedangkan produksi hanya 612.510 juta ton. Kondisi tersebut menyebabkan stok jagung dunia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 1999 stok jagung dunia mencapai 171.685 juta ton dan pada tahun 2004 hanya tersisa 67.622 juta ton. Jika kondisi tersebut terus berlangsung harga jagung akan semakin tinggi.

Kondisi ekonomi jagung seperti ini, di satu sisi, petani jagung akan diuntungkan, tetapi di sisi lain harga pakan ternak, dimana jagung sebagai bahan baku, akan ikut naik yang pada akhirnya pengusaha ternak akan mengalami kesulitan. Untuk mengatasi hal itulah, kita bersama-sama mengupayakan dalam waktu 2 tahun ke depan berswaswembada jagung. Hal ini sangat memungkinkan mengingat potensi lahan untuk pengembangan



jagung cukup tersedia. Berdasarkan data terakhir potensi lahan kering yang dapat digunakan untuk pengembangan jagung di Indonesia, tercatat seluas 3.28 juta ha, suatu luasan lahan yang cukup besar.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 11 Juni 2005, Bapak Presiden telah mencanangkan program revitalisasi pertanian, kelautan dan kehutanan. Dalam bidang pertanian, komoditas yang diunggulkan adalah padi, jagung dan tebu gula. Oleh karena itu bila Saudara-saudara mengusahakan komoditi jagung sudah sangat sejalan dengan yang dicanangkan pemerintah tersebut.

Pada tanggal 21 Juni beberapa hari yang lalu bertepatan dengan hari Krida Pertanian yang ke 33, saya menerima pengurus Dewan Jagung Nasional (DJN) beserta pengusaha pakan ternak dan produsen benih. Mereka melaporkan beberapa butir kesepakatan bagi perkembangan agribisnis jagung, yaitu :

- a. Perlu adanya standar harga minimum regional jagung dengan penetapan regional 1) Jabar - Banten, 2) Jateng - Jatim, 3) Sumut - NAD, 4) Sumbar - Sumsel - Jambi - Lampung, 5) Kalimantan, 6) Sulawesi, 7) Bali - Nusa Tenggara - Maluku-Papua.
- b. Mengusulkan adanya Lembaga Stabilitas Harga yang dapat



membeli jagung pada panen raya dan mendistribusikan pada saat tidak panen raya.

- c. Menetapkan tarif bea masuk yang mengambang dimana ditetapkan tarif tinggi pada saat panen raya dan rendah pada saat tidak panen raya.
- d. Mengusulkan adanya undang-undang perlindungan produksi jagung dalam negeri.
- e. Dalam rangka meningkatkan produksi jagung dalam negeri akan dilakukan pengembangan jagung hibrida dan peningkatan areal tanam untuk tahap awal akan dilakukan di 6 propinsi dan 30 kabupaten dengan target tambahan produksi 3 juta ton.
- f. Untuk menyiapkan secara matang maka akan disusun bisnis plan dari masing-masing kabupaten yang akan melaksanakan sebagai dasar untuk memberikan Dana Alokasi Khusus atau DAK yang akan diusulkan kepada pemerintah.

Berdasarkan butir-butir tersebut serta hasil diskusi saya dengan Dewan Jagung Nasional dihasilkan beberapa kesepakatan:

- a. Swasembada jagung akan dicapai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan dengan sasaran tambah produksi 3 juta ton.
- b. Akan ditetapkan harga dasar minimal pembelian jagung ditingkat kecamatan secara regional.
- c. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian akan memfasiitasi kredit untuk pengembangan jagung.



- d. Perlu perbaikan pasca panen guna perbaikan kualitas, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan swasta akan berupaya menyediakan sarana pasca panen seperti : dryer, com sheller, dan gudang penyimpanan.

Kesepakatan tersebut akan kita jadikan momen dalam rangka mengimplementasikan revitalisasi bidang pertanian untuk mencapai swasembada jagung.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Komoditi jagung di Propinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Buru mempunyai prospek yang besar untuk dikembangkan. Saya mendapat laporan tingkat produksi per ha jagung di Propinsi Maluku rata-rata sebesar 23,42 kuintal lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa propinsi, seperti Maluku Utara, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Dengan luas lahan yang tersedia di Kabupaten Buru (31.100 ha), Maluku Tenggara (31.600 ha), Maluku Tenggara Barat (40.400 ha), Maluku Tengah (46.200 ha) dan Kota Ambon (1.600 ha); serta dengan potensi lahan yang masih luas, saya harapkan jagung dapat berkembang lebih baik di Propinsi Maluku, termasuk di Kabupaten Buru.

Disamping itu, saya melihat pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Buru sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat:



- a. Ketersediaan lahan yang cukup luas;
- b. Masyarakat sudah memahami bahwa jagung merupakan komoditi bisnis yang menguntungkan;
- c. Membaiknya mekanisme berkembangnya perdagangan jagung akibat kemitraan;
- d. Adanya benih komposit dan meningkatkan produksi 6 - 8 ton/ha;
- e. Adanya kelembagaan yang menangani jagung yaitu: di setiap Propinsi dan Kabupaten sudah dibentuk Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ); untuk daerah Maluku dan sekitarnya telah dibentuk Celebes Com Belt (CCB) dengan program kerja hingga tahun 2010 akan menghasilkan produksi jagung sebanyak 5 juta ton; dan tingkat Nasional ada Dewan Jagung Nasional (DJN) yang akan memperjuangkan kepentingan Masyarakat Perjagungan.

Pada kesempatan ini saya meminta kepada pengurus Masyarakat Agribisnis Jagung baik tingkat kabupaten maupun propinsi untuk secara proaktif menggalang kemitraan dengan stake holder untuk mewujudkan swa sembada jagung.

Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang telah dirintis oleh Pemerintah Daerah, serta Masyarakat Agribisnis Jagung di Kabupaten Buru. Dengan berkembangnya komoditi jagung, berarti membuka lapangan kerja baru bagi para pengungsi dan sekaligus meningkatkan pendapatan.



Untuk peningkatan produksi, saya minta Saudara-saudara terus mengembangkan penggunaan jagung yang berproduksi tinggi, baik jagung komposit seperti varietas lamuru yang berproduksi tinggi, maupun jagung hibrida yang produksinya lebih tinggi lagi.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Di era otonomi daerah penekanan dan tanggung jawab pembangunan berada di daerah, maka peranan dan wewenang dari Saudara Gubernur, Bupati/walikota dan Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan sangat besar di dalam menentukan wama dan arah bagi keberhasilan pencapaian swasembada pangan tersebut. Komitmen pimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan pengembangan jagung di wilayahnya. Oleh karena itu saya berharap banyak kepada Saudara Gubernur dan Bupati/walikota agar dapat menggerakkan dan mendorong aparat instansi terkait bersama stake holder hulu dan hilir melakukan "Program Aksi" untuk menunjang keberhasilan swasembada jagung dan saya minta agar Saudara-saudara secepatnya mengambil langkah-langkah konkrit dan melaksanakan kegiatan nyata dalam konteks otonomi yang sudah berada di tangan Saudara-saudara, agar revitalisasi pertanian, kehutanan dan kelautan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat pertanian.

Hadirin yang saya hormati,



Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih kepada para petani dan semua pelaku agribisnis jagung yang telah bekerja keras meningkatkan produksi jagung. Pada saat ini kita bersama-sama melakukan tanam jagung di Desa Kramat, Dusun Air Buaya, Kabupaten Buru, dengan harapan mudah-mudahan kebutuhan jagung untuk Propinsi Maluku akan dapat dipenuhi. Untuk itu pada hari ini saya canangkan penanaman jagung di Pulau Buru ini dengan harapan akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di sini.

Demikian beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Atas perhatian Saudara-saudara sekalian saya sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA
PERINGATAN 1 ABAD LEMBAGA PENELITIAN TANAH
DI INDONESIA
BOGOR 28-29 JUNI 2005**

Hadirin yang saya hormati.

- Para Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 lingkup Departemen Pertanian dan instansi terkait,
- Para peneliti, khususnya yang menggeluti aspek sumberdaya lahan,

Assalamu'alaikum Warakhmatullaahi Wabarakhaatuh,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati satu abad lembaga penelitian tanah di Indonesia. Acara peringatan satu abad lembaga penelitian tanah ini saya anggap penting karena data, informasi, dan inovasi teknologi yang berkaitan dengan sumberdaya lahan mempunyai nilai strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Perkembangan pembangunan pertanian saat ini dan di masa yang akan datang semakin kompleks karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang saling terkait satu sama lain. Pertambahan penduduk Indonesia yang masih relatif tinggi dan perilaku konsumsi pangan yang



dinamis merupakan penyebab terjadinya peningkatan permintaan pangan, baik volume, kualitas, ataupun keragamannya. Pemenuhan permintaan atau konsumsi ini sejak dua dekade terakhir belum menggembirakan karena pada kenyataannya kita masih harus mengimpor beberapa komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, saya pun ingin mengingatkan bahwa ada pula prestasi yang dicapai, yaitu swasembada beras tahun 1984, yang kemudian diraih kembali tahun 2004 dan Insya Allah akan berlanjut ke tahun 2005.

Dalam hal ekspor produk pertanian kita masih menghadapi kendala mengenai konsistensi kontinuitas produksi dan kualitas. Semakin ketatnya kompetisi perdagangan komoditas pertanian menyebabkan beban kita bertambah besar untuk menghadapi perdagangan internasional tersebut.

Kinerja sektor pertanian seperti ini sering dipertanyakan oleh masyarakat luas. Berbagai komentar dari para pengamat dan praktisi pembangunan pertanian dilontarkan kepada peran lembaga penelitian dan para penelitiannya, partisipasi perguruan tinggi pertanian, dan utamanya kepada kinerja Departemen Pertanian. Komentar-komentar seperti ini dapat kita pahami dengan menyadari bahwa masyarakat Indonesia memahami Republik ini sebagai negara agraris dengan sumberdaya lahan yang relatif luas dan tenaga kerja yang melimpah.



Hadirin yang saya hormati

Sektor pertanian dalam arti luas memegang peranan sangat besar dalam pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pertumbuhan ekonomi makro, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan penumbuhan sektor-sektor ekonomi utama. Revitalisasi Pertanian merupakan strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian. Dengan memahami arti strategis sektor pertanian tersebut, pemerintah menetapkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu strategi utama pembangunan ekonomi. Presiden RI, Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah mencanangkan RPPK tersebut tanggal 3 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat.

Revitalisasi pertanian merupakan suatu usaha, proses, dan kebijakan untuk menyegarkan kembali “vitalisasi” pertanian guna mensejahterakan para petaninya. Langkah lanjut dari pencaanangan ini untuk lingkup sektor pertanian adalah operasionalisasinya, yang harus tercermin dalam pelaksanaan tiga program utama pembangunan pertanian yaitu: peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Melalui RPPK ini harapan perbaikan terhadap kondisi petani dalam lima tahun ke depan diantaranya adalah:



- (1) Terjadi pengurangan petani gurem dengan laju pengurangan 5 % per tahun.
- (2) Petani menguasai kegiatan usaha yang sesuai dengan skala keekonomiannya, termasuk dengan pengusahaan lahan petani yang lebih luas dari kondisi saat ini serta pengusahaan yang lebih intensif sekaligus ramah lingkungan dengan dukungan teknologi yang memadai.
- (3) Pangsa jumlah petani dalam struktur tenaga kerja nasional seimbang dengan pangsa kontribusi pertanian dalam struktur pendapatan nasional.
- (4) Petani memiliki akses untuk turut melakukan dan menguasai kegiatan hulu dan hilir dalam sistem produksi-distribusi pertanian (sistem agribisnis).
- (5) Petani memiliki akses sepenuhnya terhadap layanan dan sumberdaya produktif, seperti lahan, pembiayaan, informasi, teknologi, dan pasar.

Beberapa prioritas kebijakan dan strategi operasional RPPK akan dinyatakan dalam setiap instrumen kebijakan dan keputusan. Khusus yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya lahan, kebijakan tersebut diantaranya adalah:

Pertama, Manajemen pertanahan dan tata ruang yang meliputi:

- a. Penetapan dan penggunaan kebijakan perpajakan untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif yang ditelantarkan dan untuk pengurangan laju alih fungsi lahan, khususnya pada



hamparan pertanian yang telah mendapat fasilitas infrastruktur pertanian.

- b. Penegakan hukum tata-ruang, termasuk tata-ruang wilayah pesisir
- c. Penetapan, penegasan, dan penegakan hukum bagi tersedianya lahan pertanian abadi, baik lahan beririgasi maupun lahan kering.
- d. Memberikan fasilitasi dan infrastruktur bagi pengembangan pertanian lahan kering.
- e. Memberikan pengakuan, perhatian, dan perlindungan atas status tanah komunal dan sumberdaya lokal yang berciri terbuka (seperti mata air, danau, situ, dan sebagainya), untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bersama.
- f. Memberikan hak penggunaan tanah dalam jangka waktu yang memadai bagi pengembangan kegiatan usaha PPK yang sesuai.
- h. Melakukan proses hukum pertanahan secara tegas dan adil, dan menghukum kasus pelanggaran hukum pertanahan. Mengembangkan sistem informasi pertanahan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang handal dan aktual.
- g. Kedua, pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, yang meliputi:.
 - a. Penetapan, penegasan, dan penegakan hukum bagi kawasan lindung dan sumberdaya alam terlindungi; disertai pembatasan menuju penghentian konversi lahan pertanian dan Daerah Aliran Sungai.



- b. Pengembangan dan penguatan pengelolaan sumberdaya alam partisipatif, khususnya bagi sumberdaya yang berada di beberapa wilayah administrasi pemerintahan.

Hadirin yang berbahagia

Berbagai upaya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian untuk memperbaiki kinerja pertanian terus dilakukan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pemanfaatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian yang belum digarap secara optimal perlu dimanfaatkan. Begitu pula lahan pertanian yang saat ini sedang dimanfaatkan perlu dikelola secara lestari.

Lahan pertanian sebagai asset yang sangat berharga perlu diselamatkan, karena kalau tidak, maka bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak akan mengalami bencana sosial yang sangat besar kelak di kemudian hari. Sebagai gambaran dengan tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun 1,5% diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk akan menjadi 250 juta, bahkan bisa lebih. Dengan jumlah penduduk sebesar ini, sudah pasti intensitas penggunaan sumberdaya lahan akan mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, kehadiran kita bersama-sama di tempat ini akan sangatlah berarti kalau saudara-saudara bisa menghasilkan berbagai ide atau alternatif kebijakan dan strategi



pengelolaan sumberdaya lahan nasional untuk menyelamatkan generasi mendatang dari kekurangan bahan makanan, sesuai dengan semangat yang diangkat dalam RPPK. Lembaga penelitian tanah dan para penelitiannya, termasuk dari perguruan tinggi seyogyanya dapat mengisi RPPK ini melalui penyediaan data, informasi dan inovasi teknologi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya lahan.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Badan Litbang Pertanian dalam hal ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat melalui upaya yang terus menerus dilakukan untuk mencari informasi dan teknologi dalam bidang sumberdaya lahan. Saya yakin dengan informasi dan teknologi yang telah dihasilkan dapat mempermudah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan saat ini dan di masa yang akan datang.

Ke depan, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pelaksanaan pembangunan pertanian tidak semakin mudah tetapi akan semakin kompleks. Artinya kita semua dituntut untuk bekerja lebih profesional dalam arti lebih memahami tugas masing-masing. Peneliti lebih dituntut untuk menghasilkan suatu terobosan dan inovasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas utamanya petani. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau para peneliti bisa memahami permasalahan yang sedang dan akan dihadapi dalam hal pengelolaan sumberdaya lahan pertanian.



Oleh karena itu, sekali lagi, saya berharap melalui acara ini agar Saudara-saudara ikut memikirkan secara bersama-sama tentang masa depan pertanian Indonesia khususnya dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Dengan harapan-harapan yang saya telah kemukakan tadi, maka mudah-mudahan acara yang akan diselenggarakan selama tiga hari ini, yang sudah barang tentu memerlukan biaya, tenaga, waktu yang tidak sedikit, dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat luas.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, rangkaian acara peringatan satu abad lembaga penelitian tanah saya buka dengan resmi.

Wassalamu'alaikum Warakhmatulahi Wabarakhatuh.

Menteri Pertanian RI,
ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA PENCANANGAN TANAMJAGUNG**

**Desa Kramat, Dusun Air Buaya,
Kabupaten Buru, Prop. maluku**

Tanggal 24 Juni 2005

Yang Terhormat,

- o Saudara Gubernur Propinsi Maluku;
- o Saudara Ketua DPRD Propinsi Maluku;
- o Saudara Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Maluku
- o Saudara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru;
- o Saudara para pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Maluku dan instansi terkait lainnya;
- o Saudara yang mewakili assosiasi, organisasi profesi serta hadirin yang berbahagia.

Assalamualikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afjat. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya karena saat ini, saya dapat bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian khususnya para petani, segenap aparat terkait beserta para pengusaha dan anggota Asosiasi dan koperasi dalam acara pencanangan Tanam Jagung di Desa Kramat, Dusun Air Buaya yang



merupakan prakarsa dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan agribisnis jagung di Maluku ini.

Jagung merupakan salah satu bahan baku industri pakan ternak yang paling banyak dibutuhkan. Perkembangan produksi jagung di Indonesia lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari keberhasilan Program Aksi Masyarakat Agribisnis

Tanaman pangan (PROKSI MANTAP) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi di era otonomi daerah yang mampu mengakomodir perencanaan dari bawah serta melibatkan stake holder.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui perbaikan teknologi ditingkat petani, penggantian varietas jagung lokal ke jagung komposit atau dari jagung komposit ke jagung hibrida. Kalau pada tahun 2000 penggunaan benih hibrida baru berkisar 10 % dari areal tanam maka pada tahun 2004 penggunaan hibrida sudah mencapai kurang lebih 31%.

Dan saya yakin penggunaan jagung hibrida akan semakin luas mengingat produksinya yang cukup tinggi yang berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan para petani jagung pada khususnya.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada tahun 2004 berdasarkan angka tetap (ATAP) BPS, produksi jagung telah mencapai 11,2 juta ton, bila dibandingkan dengan produksi tahun 2003 (ATAP 2003) sebesar 10,8 juta ton mengalami peningkatan sebesar 3,7 0/0.

Pada tahun 2005 saya yakin akan terjadi lagi kenaikan produksi jagung mengingat semakin banyak para stake holder yang berminat untuk mengembangkan agribisnis jagung di Indonesia. Angka Ramalan I BPS tahun 2005 produksi sudah mencapai 11, 495 juta ton. Melihat perkembangan agribisnis jagung yang terus berkembang sasaran kita tahun 2005 sebesar 12 juta ton optimis akan tercapai.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Swasembada jagung mau tidak mau harus kita upayakan mengingat kebutuhan jagung dunia semakin meningkat, di lain pihak tingkat produksi belum mampu mengimbangi kebutuhan hal ini berdampak akan semakin menipisnya stok jagung dunia. Data terakhir menunjukkan kebutuhan jagung dunia sebesar 647.356 juta ton, sedangkan produksi hanya 612.510 juta ton. Sehingga minus 34.846 juta ton. Kondisi tersebut menyebabkan stok jagung dunia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 1999 stok jagung dunia mencapai 171.685 juta ton dan pada tahun 2004 hanya tersisa 67.622 juta ton. Jika kondisi tersebut terus berlangsung harga jagung akan semakin



tinggi. Disatu sisi, petani jagung akan diuntungkan, tetapi disisi lain harga pakan ternak dimana jagung sebagai bahan baku ikut naik yang pada akhirnya pengusaha ternak mengalami kesulitan. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi, maka upaya jalan keluarnya mau tidak mau kita harus mencukupi kebutuhan jagung dalam negeri. Bahkan saya akan mengupayakan dalam waktu 2 tahun kedepan mudah-mudahan kita telah ber-swastawembada jagung, sehingga kebutuhan jagung baik untuk pakan ternak maupun bahan baku industri lainnya tidak perlu kita import lagi. Hal ini sangat memungkinkan mengingat potensi lahan untuk pengembangan jagung cukup tersedia.

Berdasarkan data terakhir potensi lahan kering yang dapat digunakan untuk pengembangan jagung di Indonesia, tercatat seluas 3.283.882 ha, suatu jumlah yang cukup besar.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 11 Juni 2005, Bapak Presiden telah mencanangkan program revitalisasi pertanian, kelautan dan kehutanan.

Dalam bidang pertanian, komoditas yang diunggulkan adalah padi, jagung dan tebu gula. Oleh karena itu bila Saudara saudara mengusahakan komoditi jagung, sangatlah tepat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Kumpulan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2005



Pada tanggal 21 Juni beberapa hari yang lalu bertepatan dengan hari Krida Pertanian yang ke 33 saya menerima pengurus Dewan Jagung Nasional (DJN) beserta pengusaha pakan ternak dan produsen benih melaporkan beberapa butir kesepakatan hasil pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu :

- a. Perlu adanya standar harga minimum regional jagung dengan penetapan regional 1) Jabar - Banten, 2) Jateng - Jatim, 3) Sumut - NAD, 4) Sumbar - Sumsel - Jambi - Lampung, 5) Kalimantan, 6) Sulawesi, 7) Bali - Nusa Tenggara - Maluku - Papua.
- b. Mengusulkan adanya Lembaga Stabilitas Harga yang dapat membeli jagung pada panen raya dan mendistribusikan pada saat tidak panen raya.
- c. Menetapkan tarif bea masuk yang mengambang dimana ditetapkan tarif tinggi pada saat panen raya dan rendah pada saat tidak panen raya.
- d. Mengusulkan adanya undang-undang perlindungan produksi jagung dalam negeri.
- e. Dalam rangka meningkatkan produksi jagung dalam negeri akan dilakukan pengembangan jagung hibrida dan peningkatan areal tanam untuk tahap awal akan dilakukan di 6 propinsi dan 30 kabupaten dengan target tambahan produksi 3 juta ton.
- f. Untuk menyiapkan secara matang maka akan disusun bisnis plan dari masing-masing kabupaten yang akan melaksanakan sebagai dasar untuk memberikan Dana Alokasi Khusus atau



DAK yang akan diusulkan kepada pemerintah. Berdasarkan butir-butir tersebut serta hasil diskusi kami dengan Dewan Jagung Nasional dihasilkan beberapa kesepakatan: (a) Swasembada jagung akan dicapai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan dengan sasaran tambah produksi 3 juta ton, (b) Akan ditetapkan harga dasar minimal pembelian jagung ditingkat kecamatan secara regional. (c) Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian akan memfasilitasi kredit untuk pengembangan jagung. (d) Perlu perbaikan pasca panen guna perbaikan kualitas, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan swasta akan berupaya menyediakan sarana pasca panen seperti : dryer, com sheller, dan gudang penyimpanan.

Kesepakatan tersebut akan kita jadikan momen dalam rangka mengimplementasikan revitalisasi bidang pertanian untuk mencapai swasembada jagung.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Komoditi jagung di Propinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Buru mempunyai prospek yang besar untuk dikembangkan dimana tingkat produksi per ha (produktivitas) untuk jagung di Propinsi Maluku rata-rata sebesar 23,42 k/jha lebih tinggi dibandingkan propinsi-propinsi Maluku Utara, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Riau.

Dengan luas lahan yang ada di Kabupaten Buru (31.104



ha), Maluku Tenggara (31.552 ha), Maluku Tenggara Barat (40.416 ha), Maluku Tengah (46.194 ha) dan Kota Ambon (1.606 ha), serta dengan potensi lahan yang masih luas, saya harapkan jagung dapat berkembang lebih baik di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Buru.

Disamping itu, saya melihat pengembangan agribisnis jagung di Kab. Buru sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat (1) Ketersediaan lahan yang cukup luas yaitu 31.104 ha (2) Masyarakat sudah memahami bahwa jagung merupakan komoditi bisnis yang menguntungkan semua pihak; (3) Membaiknya mekanisme perdagangan jagung akibat berkembangnya kemitraan; (4) Adanya benih hibrida yang dapat meningkatkan produksi 6 - 8 ton/ha; (5) Adanya kelembagaan yang menangani jagung yaitu di setiap Provinsi dan Kabupaten sudah dibentuk Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ) dan untuk daerah Maluku dan sekitarnya telah dibentuk Celebes Com Belt (CCB) dengan program kerja hingga tahun 2010 akan menghasilkan produksi jagung sebanyak 5 juta ton. Di tingkat Nasional ada Dewan Jagung Nasional (DJN) yang akan memperjuangkan kepentingan Masyarakat Perjagungan.

Pada kesempatan ini saya meminta kepada pengurus MAJ baik tingkat kabupaten dan provinsi secara proaktif menggalang kemitraan dengan stake holder untuk mewujudkan swasembada jagung.



Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang telah dirintis oleh Pemerintah Daerah, serta Masyarakat Agribisnis Jagung di Kabupaten Buru. Dengan berkembangnya komoditi jagung, berarti membuka lapangan kerja baru bagi para pengungsi dan sekaligus meningkatkan pendapatan.

Untuk peningkatan produksi, saya minta Saudara terus mengembangkan penggunaan jagung yang berproduksi tinggi, pada tahap awal tidak ada salahnya saudara-saudara menggunakan jagung komposit seperti varietas lamuru, karena termasuk varietas yang berproduksi tinggi, namun secara bertahap agar diganti dengan jagung hibrida yang produksinya lebih tinggi lagi.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Di era otonomi daerah penekanan dan tanggung jawab pembangunan berada di daerah, maka peranan dan wewenang dari Saudara Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan sangat besar didalam menentukan wama dan arah bagi keberhasilan pencapaian swasembada pangan tersebut. Komitmen Pimpinan Daerah sangat menentukan keberhasilan pengembangan jagung di wilayahnya oleh karena itu saya berharap banyak kepada Saudara Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas agar dapat menggerakkan dan mendorong aparat instansi terkait bersama stake holder hulu dan hilir melakukan Program Aksi untuk menunjang keberhasilan



swasembada jagung dan saya minta agar Saudara secepatnya mengambil langkah-langkah konkrit dan melaksanakan "Action" dalam kontek otonomi yang sudah berada ditangan Saudara agar revitalisasi pertanian, kehutanan dan kelautan segera dirasakan oleh seluruh masyarakat pertanian.

Hadirin yang saya Hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada para petani dan semua pelaku Agribisnis jagung yang telah bekerja keras meningkatkan produksi jagung dan pada saat ini kita bersama-sama melakukan tanam jagung di Desa Kramat, Dusun Air Buaya, Kabupaten Buru mudah-mudahan kebutuhan jagung untuk Propinsi Maluku akan dapat dipenuhi. Untuk itu pada hari ini saya cananagn. oenanaman iaauna di Pulau Buru ini dengan harapan akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat disini.

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, atas perhatian Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan terima kasih.

Wassalammualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Buru, 24 Juni 2005

Menteri Pertanian

ttd

Dr .Ir. Anton Apriyantono, MS









